



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor:1425);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2014);
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015);
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
- u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 45);
- v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 121);
- w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 25);
- x. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
- y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.



Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber: Bappeda DIY, 2013)

DIY posisinya terletak diantara $7^{\circ}.33'$ - $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00'$ - $110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - m. Sosial



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- n. Ketenagakerjaan
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
 - p. Penanaman Modal
 - q. Kebudayaan
 - r. Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - w. Komunikasi dan Informatika
 - x. Perpustakaan
2. Urusan pilihan meliputi:
- a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
3. Urusan Keistimewaan meliputi:
- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Tata Ruang.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2018 masih mengacu pada Perda Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY terdiri dari 35 OPD sebagai Entitas Akuntansi ditambah dengan PPKD sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Adapun OPD Pemda DIY adalah sebagai berikut:

1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Inspektorat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja
	Dinas Daerah:
1.	Dinas Kebudayaan
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Dinas Kesehatan
5.	Dinas Sosial



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

6.	Dinas Perhubungan
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Dinas Pariwisata
11.	Dinas Pertanian
12.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Lembaga Teknis Daerah:
1.	Badan Kepegawaian Daerah
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
5.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal
6.	Badan Lingkungan Hidup
7.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia
10.	Rumah Sakit Paru Respira
	Lembaga Lain
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Sekretariat Parampara Praja
3.	Kantor Perwakilan Daerah
4.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemda DIY yang dilaksanakan oleh PPKD dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
 - 2.3. Rencana Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
 - 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
 - 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 - 5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
- Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab VII. Penutup



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah memperlihatkan kinerja sektor-sektor ekonomi masyarakat yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dicerminkan dari tingkat kondisi perekonomian daerah.

1. Sektor Unggulan

Peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan yang menjadi sektor penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah sektor yang berkontribusi besar secara konsisten dari waktu ke waktu terhadap produksi masyarakat secara total yang dicerminkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama dua tahun terakhir produksi daerah meningkat baik menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB meningkat dari 119,172 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 129,877 triliun di tahun 2018. Sementara itu PDRB ADHK meningkat dari 92,30 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 98,03 triliun rupiah di tahun 2018.

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto DIY Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017		2018	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.933.401	7.930.182	12.708.219	8.101.333
Pertambangan dan Penggalian	615.943	489.349	687.661	541.184
Industri Pengolahan	15.636.603	11.878.962	16.869.996	12.487.005
Pengadaan Listrik, Gas	173.689	151.681	186.513	156.706
Pengadaan Air	121.272	90.289	128.125	94.923
Konstruksi	11.303.630	8.830.612	13.354.792	9.987.059
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.241.621	7.787.488	11.156.434	8.219.289
Transportasi dan Pergudangan	6.783.681	4.976.406	7.469.964	5.304.844
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.304.099	8.788.711	13.273.486	9.383.603
Informasi dan Komunikasi	9.789.586	10.222.383	10.523.890	10.884.533
Jasa Keuangan	4.640.943	3.303.798	5.106.466	3.506.588
Real Estate	8.382.668	6.708.239	9.022.612	7.079.839
Jasa Perusahaan	1.207.970	1.086.912	1.309.148	1.146.812
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.213.350	6.956.541	10.949.666	7.239.152
Jasa Pendidikan	9.711.308	8.096.346	10.533.809	8.583.074
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.004.112	2.445.241	3.220.940	2.593.233
Jasa lainnya	3.109.029	2.558.882	3.375.735	2.717.386
PDRB	119.172.906	92.302.022	129.877.458	98.026.563

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Selama lima tahun terakhir, sektor yang merupakan penyumbang terbesar PDRB ADHB secara konsisten adalah industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun, pada tahun 2018, sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar dengan persentase sebesar 10,28%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada di urutan ketiga dengan persentase sebesar 9,78%. Selama empat tahun sebelumnya pangsa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih tinggi dibandingkan pangsa sektor konstruksi. Nilai *output* sektor tersebut pun meningkat, tetapi pangasanya menurun karena nilai PDRB meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan *output* sektor sehingga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu sektor unggulan DIY.

Tabel 1.5. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Tahu 2014 – 2018 (dalam Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,52	10,64	10,41	10,01	9,78
Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,56	0,54	0,52	0,53
Industri Pengolahan	13,59	13,11	13,22	13,12	12,99
Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,12	0,13	0,15	0,14
Pengadaan Air	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	9,40	9,37	9,35	9,49	10,28
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,27	8,22	8,48	8,59	8,59
Transportasi dan Pergudangan	5,72	5,68	5,68	5,69	5,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,04	10,24	10,23	10,32	10,22
Informasi dan Komunikasi	8,51	8,13	8,14	8,21	8,10
Jasa Keuangan	3,88	3,97	3,94	3,89	3,93
Real Estate	7,00	7,02	7,10	7,03	6,95
Jasa Perusahaan	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,07	8,26	8,38	8,57	8,43
Jasa Pendidikan	8,19	8,48	8,19	8,15	8,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,52	2,51	2,52	2,48
Jasa lainnya	2,53	2,55	2,57	2,61	2,60
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019 (data diolah)

a. Sektor Industri Pengolahan

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan penopang utama sektor industri di DIY. Jumlah IKM DIY yang terdiri dari industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, serta industri kerajinan pada tahun 2018 sebanyak 94.840 unit usaha atau mengalami peningkatan sebesar 3,98% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebanyak 91.214 unit usaha. IKM DIY didominasi oleh industri pangan dan industri kerajinan. Secara keseluruhan, IKM DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 351.425 tenaga kerja pada tahun 2018, atau meningkat 6,33% dari tahun 2017 yang menyerap sebanyak 330.508 tenaga kerja. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 1.6. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2014-2018

IKM	2014	2015	2016	2017	2018
Unit usaha (UU)	86.087	88.637	90.906	91.214	94.840
Tenaga kerja (orang)	318.858	326.669	333.980	330.508	351.425
Nilai investasi (RpJuta)	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.208.564	1.949.721
Nilai produksi (RpJuta)	3.399.909	3.489.769	3.643.222	12.463.258	12.749.271
Nilai bahan baku dan penolong (RpJuta)	1.524.806	1.550.832	1.593.631	8.620.133	7.335.020

Sumber: Disperindag DIY, 2019

Pada tahun 2018, IKM DIY mampu menghasilkan Nilai Tambah Produk sebesar Rp5.414.251.000,00, meningkat sebesar 40,88% dibandingkan dengan tahun 2017. Nilai tambah tersebut adalah selisih antara nilai produksi sebesar Rp12.749.271.000,00 dengan nilai bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp7.335.020.000,00.

b. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum membentuk struktur PDRB DIY tahun 2018 sebesar 10,22%. Sementara itu, laju pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2018 adalah sebesar 6,77%. Dinamika sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika kepariwisataan DIY. Jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik domestik maupun mancanegara mempunyai dampak pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena adanya kebutuhan atas tempat tinggal dan konsumsi selama tinggal di DIY.

Pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di DIY sebanyak 5.689.093 orang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara 416.374 wisatawan (7,3%) dan jumlah wisatawan domestik sebanyak 5.272.719 wisatawan (92,7%), atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,8% (459.795 orang). Namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2017 (14,9%). Penurunan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di DIY dipengaruhi oleh adanya bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun 2018. Pada bulan Agustus 2018 terjadi gempa bumi 7.0 SR di Lombok menyebabkan 100.000 wisatawan dari luar negeri membatalkan kedatangannya ke Indonesia, 80.000 diantaranya membatalkan kedatangan ke Bali. Hal ini kemudian mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY karena sebagian besar wisman datang melalui Bali.

Tabel 1.7. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	13.874	2,13	1,98
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	14.125	2,15	1,99

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2019 (datadiolah)

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Pada tahun 2017 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Hotel Bintang dan Non Bintang sebesar 2,13 hari, sedangkan pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tahun 2018 telah mencapai 2,15 hari. Peningkatan lama tinggal wisawatan mancanegara dipengaruhi oleh ragam destinasi dan atraksi yang ada dan dilaksanakan di DIY di sepanjang tahun 2018. Penyelenggaraan *event* pariwisata yang diagendakan pada bulan Juli-September serta lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara pada saat liburan musim panas di Eropa dan Amerika adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan mancanegara di DIY.

c. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara konsisten menyumbang di atas 10 persen PDRB ADHB meskipun nilainya fluktuatif dan cenderung menurun sejak tahun 2016. Namun, sektor tersebut dipandang penting mengingat jumlah penduduk dunia terus bertambah dan diprediksi akan mencapai 9,5 miliar pada tahun 2050. Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus perhatian kebijakan pemerintah. Dengan fluktuasi harga pangan dunia, berbagai kebijakan, program, dan investasi mulai lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, salah satunya dari aspek ketersediaan pangan melalui sektor pertanian. Produksi tanaman pangan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat DIY. Dalam lingkup yang lebih luas, sub sektor tanaman pangan mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas suatu wilayah bahkan negara melalui ketersediaan dan ketahanan pangan.

1) Tanaman Pangan

Beberapa kegiatan yang dialokasikan tahun 2018 semua diarahkan pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, disamping pengembangan beberapa komoditas lainnya, seperti tanaman serealia, tanaman aneka kacang, dan umbi-umbian. Kegiatan pendukung berupa penyediaan benih tanaman pangan, perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengujian mutu benih, serta peramalan serangan OPT.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan, ada berbagai tantangan antara lain: peningkatan jumlah penduduk, bencana alam di beberapa daerah, terus berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, dan belum meratanya daerah sentra produksi pangan. Sementara itu, berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi sub sektor tanaman pangan antara lain: skala penguasaan lahan oleh petani yang sangat kecil, status kepemilikan lahan (sebagian besar belum memiliki sertifikat), alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, persaingan antar komoditas, infrastruktur (sebagian jaringan irigasi dalam keadaan rusak, terbatasnya jalan usaha tani/jalan produksi), belum tersedianya benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) sesuai kriteria. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian DIY pada Tahun 2018, antara lain: melanjutkan program Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; memperluas fasilitasi penerapan budidaya dan tambahan bantuan benih; penanganan dan antisipasi dini OPT/DPI; serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi lain seperti Perum Bulog, Kodim, Korem, dan para pihak terkait lainnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 1.8 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2017-2018

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2017	2018*	2017	2018*	2017	2018*
1	Padi Sawah	114.385	107.954	59,28	59,90	678.530	646.639
2	Padi Ladang	44.433	45.341	45,59	47,39	202.576	214.887
	Padi	158.818	153.295	56,20	57,01	881.106	861.526
3	Jagung	62.521	62.315	49,87	50,18	311.764	312.683
4	Kedelai	6.533	8.894	13,25	12,50	8.656	11.117

Keterangan: * Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2019

Secara umum, hampir semua komoditas tanaman pangan mengalami penurunan luas panen, kecuali komoditas padi ladang dan kedelai. Hal ini disebabkan adanya pergeseran komoditas tanaman pangan dari komoditas ubi kayu dan ubi jalar ke padi ladang dan kedelai. Luas panen padi ladang meningkat 908 ha, namun luas panen padi total tahun 2018 turun sebesar 5.523 ha (-3,48%).

Tahun 2018 produksi jagung, kedelai dan kacang tanah mengalami kenaikan. Produksi jagung naik 919 ton (0,29%) karena produktivitas jagung naik 0,31 ku/ha (0,62%) dibandingkan 2017. Kenaikan ini disebabkan adanya program bantuan benih jagung hibrida dan pendampingan petani. Produksi kedelai naik disebabkan luas panen kedelai naik 2.361 ha (36,14%), didukung program bantuan benih kedelai dan pendampingan petani. Produksi kacang tanah naik karena cuaca/iklim yang mendukung sehingga produktivitas naik sebesar 5,34 ku/ha (45,49%).

2) Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial dalam struktur perekonomian DIY yang belum banyak dioptimalkan. Adapun pertumbuhan sektor ini masih didominasi oleh produksi hasil perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam, sawah, karamba, jaring apung, dan telaga. Komoditas unggulan di DIY yang telah ditetapkan yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname, dan ikan hias. Budidaya ikan di kolam masih mendominasi jumlah produksi perikanan di DIY. Selain itu, pengembangan usaha budidaya melalui teknik minapadi, ugadi (udang dan padi), minacabai, dan budidaya dengan sistem bioflok juga berhasil meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya di DIY.

Peningkatan produksi maupun nilai produksi perikanan budidaya sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perikanan budidaya, serta dipengaruhi oleh harga pasar. Selain itu, didukung juga dengan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem produksi dan pemasaran.

Sektor Perikanan tangkap juga menyokong produksi perikanan tangkap DIY. Hal ini didukung oleh kondisi DIY yang memiliki wilayah pantai sepanjang kurang lebih 113 km meliputi tiga wilayah kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo. Potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai 320.600 ton per tahun, sedangkan di Samudera Hindia potensi lestarnya sebesar 906.340 ton per tahun.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penangkapan ikan yang dilakukan selama ini jangkauannya melebihi 12 mil ke arah laut sesuai dengan kemampuan perahu yang digunakan sudah di atas 10 GT. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya penambahan jumlah kapal nelayan dan pelatihan kenelayanan. Optimalisasi pemanfaatan kapal berkapasitas 30 GT juga terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan.

Tabel 1.9. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2017-2018 (Unit)

Ukuran Kapal	2017	2018
<10 GT	436	491
≥10 GT	54	32

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2019

Pemanfaatan potensi sumberdaya melalui perikanan tangkap juga terus dioptimalkan melalui pengembangan pelabuhan perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap khususnya komoditas ikan tuna yang menjadi produk unggulan baik untuk pasar lokal maupun pasar luar negeri. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dilakukan dengan optimalisasi dan revitalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng antara lain melalui pembangunan fasilitas SPBU, fasilitas pelabuhan, pembangunan TPI Higienis, serta pembangunan *coldstorage*.

3) Hortikultura

Komoditas hortikultura yang mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan obat-obatan merupakan salah satu komoditas unggulan sektor pertanian dikarenakan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar dibanding sub sektor tanaman pangan. Beberapa komoditas sayuran seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit termasuk dalam komoditas yang mempengaruhi angka inflasi. Capaian produksi hortikultura di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10. Produksi Komoditas Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2017-2018

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2017	2018*
1.	Cabai besar	Ton	29.516	33.514
2.	Cabai rawit	Ton	8.386	9.681
3.	Bawang merah	Ton	13.980	14.434
4.	Mangga	Ton	32.238	57.678
5.	Durian	Ton	6.767	6.570
6.	Pisang	Ton	40.920	40.688
7.	Manggis	Ton	1.801	1.652

Keterangan: *Angka Sementara
Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2019

Peningkatan produksi cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah merupakan hasil dari peningkatan luas panen. Komoditas buah unggulan seperti durian, pisang, dan manggis mengalami sedikit penurunan kecuali mangga mengalami peningkatan. Jumlah tanaman



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

produktif buah mangga mengalami peningkatan populasi sehingga mendorong produksi mangga yang meningkat 25.440 ton atau meningkat 78,91% dibanding tahun 2017.

4) Perkebunan

Pengembangan sub sektor perkebunan di DIY diarahkan pada *specialty product* berbasis *cluster* serta integrasi perkebunan dengan wisata (agrowisata). Pemberdayaan kelembagaan petani pekebun saat ini tidak hanya mengupayakan peningkatan produksi, kualitas, maupun penganeekaragaman produk olahan, namun juga mengedepankan agrowisata yang sesuai dengan potensi wilayah setempat, antara lain: perkebunan teh di Kecamatan Samigaluh Kulon Progo, kopi di Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo Kulon Progo, serta kakao di Kecamatan Patuk dan Ponjong Gunungkidul.

Tabel 1.11. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2014-2018

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kelapa	53.775,40	58.725,92	54.606,52	47.318,93	55.078,30
2.	Kopi	865,23	766,00	584,67	2.933,75	508,54
3.	Jambu mete	452,36	567,90	421,29	277,78	294,12
4.	Kakao	1.597,67	2.540,79	1.608,96	1.896,12	1.678,10
5.	Tebu	14.896,78	11.251,80	10.206,37	7.988,90	6.731,80
	Jumlah	71.587,44	73.852,41	67.427,81	60.415,48	64.290,86

Sumber: DinasKehutanan dan Perkebunan DIY, 2019 (diolah)

Produksi perkebunan tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi sebesar 3.875,38 ton antara lain disebabkan dukungan faktor cuaca yang cukup bagus untuk komoditas kelapa. Penurunan luas areal tebu disebabkan rendahnya harga di pasar lelang pabrik gula. Selain itu, Harga Pokok Pembelian Pemerintah untuk gula sebesar Rp9.700,00 per kilogram ternyata tidak dapat menutup biaya produksinya. Akibatnya banyak petani tebu merugi dan beralih ke budidaya komoditas lain yang lebih menguntungkan.

5) Peternakan

Peternakan merupakan sub sektor pertanian yang memiliki peran besar pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Meningkatnya status ekonomi dan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemenuhan gizi berbanding lurus terhadap meningkatnya permintaan produk-produk asal hewan. Banyak usaha di bidang peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur, dan susu, misalnya usaha penggemukan sapi potong, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur, dan peternakan ayam pedaging.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Capaian populasi komoditas unggulan sub sektor peternakan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.12. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2017-2018

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2017	2018*
1.	Sapi Potong	309.960	298.165
2.	Sapi Perah	4.003	3.946
3.	Kambing	401.219	398.376
4.	Ayam Ras Petelur	3.418.237	3.568.052
5.	Ayam Ras Pedaging	6.668.834	6.854.639

Keterangan: * Angka Sementara 2018

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2019

Populasi sapi potong di DIY pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan populasi sapi potong tahun 2018 sebesar 11.795 ekor atau turun 3,80%. Penurunan populasi sapi perah tahun 2018 sebesar 57 ekor atau turun 1,4%. Penurunan populasi sapi di wilayah DIY terjadi karena peningkatan mutasi ternak keluar wilayah DIY. Mutasi tersebut tidak dapat dikendalikan oleh peternak sehingga berdampak pada penurunan populasi ternak sapi DIY. Penurunan populasi beberapa komoditas unggulan diimbangi dengan peningkatan populasi ternak lainnya sehingga secara keseluruhan masih ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

6) Kehutanan

Tren wisata alam yang terus berkembang di DIY menjadikan jasa lingkungan yang berasal dari sektor kehutanan berkontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di DIY. Selama tahun 2018, realisasi pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan mencapai Rp2.260.603.250,00 yang berasal dari karcis masuk, parkir, dan kegiatan lainnya. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2017 yakni sebesar Rp1.962.831.125,00.

Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan juga disumbang oleh produksi minyak kayu putih produksinya dapat melampaui target sebesar 44.296 liter padatahun 2018. Jumlah produksi minyak kayu putih pada tahun 2018 sudah sesuai dengan taksasi dengan pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT). Jumlah produksi minyak kayu putih dari tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.13. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2014-2018

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2019



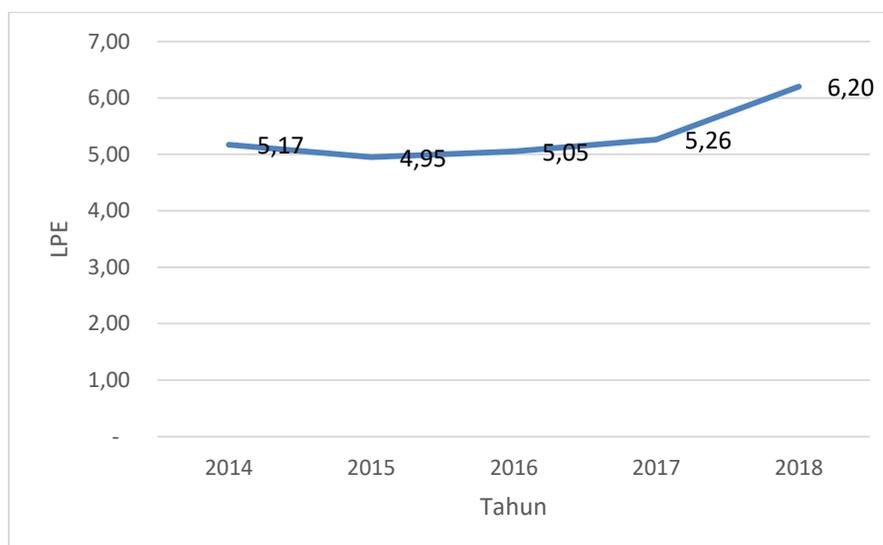
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil hutan kayu di DIY pada tahun 2018 berhasil menyumbang pendapatan sebesar Rp1.063.086.074,00 yang berasal dari tebangan kayu jati bulat dan kayu bulat campuran selama 1 tahun. Angka pendapatan ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 mencapai Rp661.161.046,00.

Pengelolaan hutan di DIY tidak hanya dilihat dari aspek ekonominya melalui peningkatan produksi saja, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan sosial agar tercipta pengelolaan hutan yang lestari sehingga pemanfaatan hutan menjadi lebih optimal guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY tumbuh dengan tren meningkat sejak tahun 2015. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2015 turun 0,22 poin menjadi 4,95% dari 5,17% di tahun sebelumnya. LPE senantiasa meningkat setelah tahun 2015 dengan capaian 6,20% di tahun 2018. Peningkatan LPE tahun 2018 merupakan kenaikan tertinggi pada periode 2015 – 2018 dengan kenaikan sebesar 0,94 poin. Berikut ini adalah gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar1.16. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahun 2014-2018 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Pada tahun 2018, semua lapangan usaha tumbuh positif, bahkan dua lapangan usaha tumbuh di atas 10% yaitu konstruksi serta pertambangan dan penggalian. Sektor konstruksi tumbuh 13,1% serta pertambangan dan penggalian tumbuh 10,59%. Pertumbuhan tertinggi ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 6,77%. Ketiga sektor tersebut tumbuh di atas LPE. Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 1.14. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (%)

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,10	2,60	1,46	1,94	2,16
2	Pertambangan dan Penggalian	2,11	0,12	0,42	3,39	10,59
3	Industri Pengolahan	3,82	1,75	5,07	5,74	5,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,53	(1,32)	14,26	3,96	5,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,91	2,90	2,36	3,46	5,13
6	Konstruksi	5,65	4,24	5,42	6,94	13,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,69	6,19	6,09	5,72	5,54
8	Transportasi dan Pergudangan	3,80	3,73	4,61	4,74	6,6
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,79	5,77	5,51	6,21	6,77
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	5,11	8,32	6,14	6,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	8,27	4,98	2,80	6,14
12	Real Estat	7,77	6,45	5,14	4,94	5,54
13	Jasa Perusahaan	7,61	7,31	3,43	5,86	5,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,18	5,57	4,51	4,06
15	Jasa Pendidikan	7,91	7,28	3,07	5,56	6,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	7,15	4,52	5,84	6,05
17	Jasa lainnya	5,29	8,00	5,70	5,76	6,06
DIY		5,18	4,94	5,05	5,26	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB pada tahun 2017 dan 2018. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2018 adalah 86.753.197 juta rupiah atau 57.522.317 juta rupiah pada PDRB ADHK. Meskipun demikian, pengeluaran konsumsi tumbuh relatif lambat dibanding LPE yaitu sebesar 3,95%. Kontributor terendah pembentukan PDRB adalah perubahan inventori dengan nilai sebesar 1.435.491 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 1.104.088 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 1.15 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017

No	Komponen Pengeluaran	2017		2018		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81.335.820	55.364.064	86.753.197	57.552.317	3,95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.756.395	2.589.250	4.095.046	2.657.407	2,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19.508.172	13.104.559	21.346.113	13.559.566	3,47
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	37.111.4368	24.791.862	43.173.678	27.313.862	10,17
5	Perubahan Inventori	1.368.184	1.066.314	1.435.491	1.104.088	3,54
6	Ekspor Luar Negeri	7.436.959	4.808.527	8.749.632	5.424.903	12,82
7	Impor Luar Negeri	6.540.719	4.905.222	7.206.068	5.210.391	6,22
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(24.845.137)	(4.517.332)	(28.469.631)	(4.375.109)	-3,15
PDRB DIY		119.131.000	92.302.202	119.172.906	98.026.564	6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

Kinerja ekonomi antara kabupaten/kota se-DIY masih belum merata dan terdapat dinamika antar wilayah. Selama tahun 2013 sampai 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Namun di tahun 2017, Kabupaten Kulon Progo mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 5,97%. Capaian Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan yang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tinggi mengingat pada tahun sebelumnya kabupaten tersebut mencapai pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,76%.

Tabel 1.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	4,87	4,57	4,62	4,76	5,97
Bantul	5,46	5,04	4,97	5,06	5,14
Gunungkidul	4,97	4,54	4,82	4,89	5,00
Sleman	5,89	5,30	5,18	5,25	5,35
Yogyakarta	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24
DIY	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26

Sumber: BPS DIY, 2019

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2014-2018 senantiasa meningkat. Nilainya adalah 34,15 juta rupiah di tahun 2018 yang meningkat 2,47 juta rupiah dari 31,68 juta rupiah pada tahun sebelumnya.

Inflasi

Pada periode 2013 sampai dengan 2018, inflasi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Laju inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahun 2017 adalah 4,20% yang kemudian menurun menjadi 2,66% di tahun berikutnya. Kenaikan harga tertinggi pada tahun 2018 terdapat pada kelompok pengeluaran sandang yang mencapai 3,61%, sedangkan yang terendah terdapat pada pengeluaran kesehatan sebesar 1,19%.

Tabel 1.17. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Umum	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66
1	Bahan Makanan	7,7	4,64	4,77	2,71	3,15
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,95	5,04	3,84	2,79	2,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,92	4,41	1,64	5,63	2,43
4	Sandang	3,61	5,87	3,04	3,84	3,61
5	Kesehatan	5,49	4,21	4,17	2,76	1,19
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,37	1,36	2,40	2,81	3,34
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	9,36	-2,51	-2,06	6,72	2,46

Sumber: BPS DIY, 2019

2.2. Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1. Visi dan Misi Jangka Panjang

Visi Jangka Panjang

Cita-cita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang tertuang dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 yang memiliki visi *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*.

DIY sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. DIY sebagai **pusat budaya terkemuka**, dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cita-cita menjadi **daerah tujuan wisata terkemuka** dapat dimaknai sebagai daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang **maju, mandiri, dan sejahtera**. Masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DIY menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
4. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2. Filosofi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dasar Filosofi

"Renaissance Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Di bawah payung paradigma "Renaissance Yogyakarta", Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia.

Konsep "Renaissance Yogyakarta" atau "Jogja Renaissance" merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaissance Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat Jogja Gumregah tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju pada peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaissance Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang melahirkan gejala-gejala yaitu: (1) *Bawana* Yogyakarta tidak *Hayu* lagi baik dalam dimensi *Bawana Alit-Bawana Ageng* maupun *Bawana Lahir-Bawana Batin*; (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai *sangkan paraning dumadi*-nya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut diatas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu "*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja*". **Abad Samudera Hindia** ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta kemiskinan di kawasan selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudera Hindia tentunya berada di wilayah selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dilihat dari angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di wilayah selatan DIY ini melatarbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tema visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan martabat warga miskin di wilayah bagian selatan khususnya, dan di seluruh wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi wilayah selatan DIY perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam "*Lima Kemuliaan*" atau "*Panca Mulia*" yakni:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat DIY, serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Visi

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan sebagai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel V-X Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan. Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	Pembangunan fasilitas- Fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect and forward effect</i>) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan ompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui penerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung oleh ketersediaan energi. Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.
Implementasi dalam RPJMD DIY			
	RPJMD DIY 2009 -2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	RPJMD DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)
Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

	sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”.	Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”	
--	---	---------------------------------------	--

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian diatas tema visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui **peningkatan**, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

1. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

1. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah DIY.
2. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
3. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.

2. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
3. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan kehidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan kehidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang diterjemahkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
6. Provinsi dengan nasional; dan
7. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:

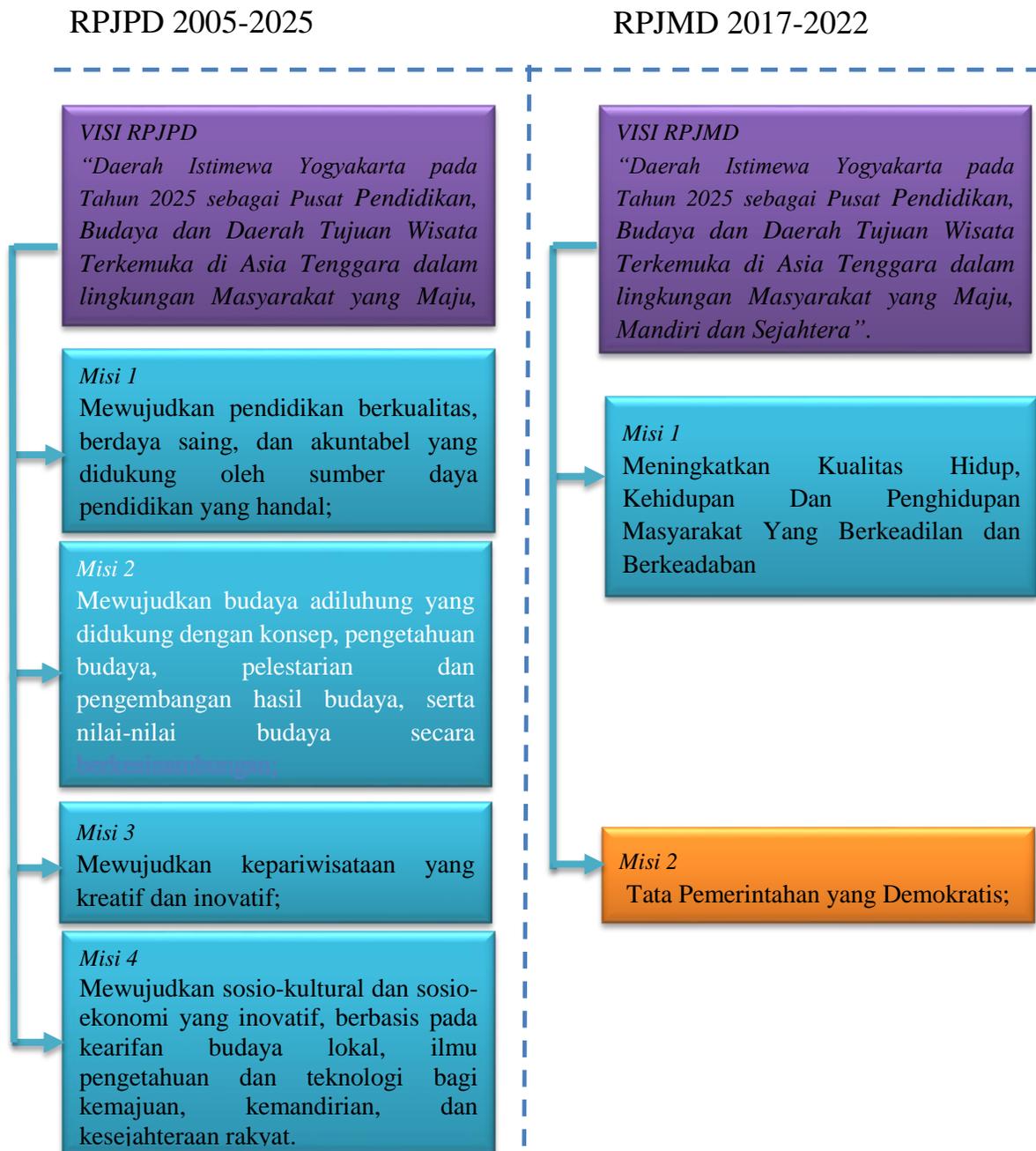
- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Skandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda DIY mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaanya misi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

kedua menjadi sebuah “*initial condition*” untuk terwujudnya Misi pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban”.



Gambar 2.x. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel. 2.x Tujuan yang hendak dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel. 2.x Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Gini Persentase Angka Kemiskinan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi Pertumbuhan Ekonomi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 	<ol style="list-style-type: none"> Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	a. bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

2.2.3. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012-2017

Pencapaian visi dan misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar strategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah. Adapun strategi, arah kebijakan dan perwujudan atas program pada RPJMD DIY 2017-2022 dalam rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut:

Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

VISI <i>Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</i>		
MISI 1 <i>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</i>		
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya derajat kualitas SDM	1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan
	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.
	3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum
	4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

		<p>permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan</p>
	<p>5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</p>	<p>1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh</p> <p>3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>4. Pengurangan resiko bencana</p> <p>5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta</p>
	<p>6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</p>	<p>1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru</p> <p>2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan</p>

<p>MISI 2 <i>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</i></p>		
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
<p>Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</p>	<p>1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif</p> <p>2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah</p> <p>3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik</p>
	<p>2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan</p>	<p>1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa</p> <p>2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa</p>
	<p>3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa</p> <p>2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten</p>

Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan dibawah ini:

<p>MISI 1 <i>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</i></p>		
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
<p>1. Meningkatnya derajat kualitas SDM</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan</p> <p>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan.</p> <p>3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY.</p>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 6. Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). 7. Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. 8. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin 4. Peningkatan penduduk berakses air bersih layak 5. Peningkatan penduduk berakses energi 6. Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah 7. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.
3. Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender 2. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum 5. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana
4. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	<p>Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi <i>stakeholder</i> pembangunan budaya benda dan tak benda. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

<p>6. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pengurangan resiko bencana 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) 3. Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja 5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian 6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat 7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10. Pengurangan resiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif
<p>6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara <i>New Yogyakarta International Airport</i> (NYIA) 2. Pengembangan kawasan selatan sebagai pusat pertumbuhan 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

MISI 2 <i>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</i>		
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.
2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa 2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada pemda dan kabupaten/kota
3. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa 2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fasilitasi penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. 2. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

Program

Berikut kami sampaikan Program Pemerintah Daerah (Program Pemda) yang merupakan program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dengan 5 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban		
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM		



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Harapan Lama Sekolah	
	3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	
	3. <i>Total Fertility Rate</i>	
	4. Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	
	5. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	
SASARAN Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.		
PROGRAM Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan		
PROGRAM Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	
SASARAN Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	
PROGRAM	1. Indeks Kualitas Air	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Indeks Kualitas Udara	
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	4. Indeks Resiko Bencana	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah		
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, dimana terdapat 3 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan		
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemampuan keuangan daerah 2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan		
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan. 2. Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa		
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

Indikator

Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Indikator



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

capaian tersebut merupakan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban				
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,38	80,29	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Harapan Lama Sekolah	15,23	15,51	
	3. Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	N/A	200	
	4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	5,96	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	N/A	2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72	
	3. <i>Total Fertility Rate</i>	N/A	2,1	
	4. Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	24	36	
	5. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	N/A	12,59	
SASARAN Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	1. Indeks Gini	0,4400	0,3917	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2. Persentase angka kemiskinan	12,36	11,23	
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin pada tahun n)	466.330	484.947	
	3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.552	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	10,98	11,46	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pelestarian budaya benda dan tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23%	11,22%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	N/A	12,99	
SASARAN Meningkatnya aktivitas yang perekonomian berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi.	5,21	5,24	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	58,58	
	3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	76,5	
	4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	21,11	
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	42,32	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,78	
	3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	0	
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Indeks kualitas Udara	86,39	87,06	
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50	
	4. Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI				
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK	N/A	WTP	Gubernur dan Wakil Gubernur
	2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	N/A	A	
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemampuan keuangan daerah	Sedang	Sedang	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	2. Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.424.672.744	
	3. Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,50	
	4. Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,20	
	5. Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,40	
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	100	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	2. Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	N/A	N/A	
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	19,83%	31,57%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan

2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

1. Tema Pembangunan Daerah

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tema pembangunan tahunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJPD dan RPJMD. Sehingga, penyusunan tema pembangunan DIY dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal tersebut, yaitu : RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Pada saat penyusunan dokumen RKPD 2018, dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan. Sehingga RKPD DIY Tahun 2018 mengacu pada dokumen



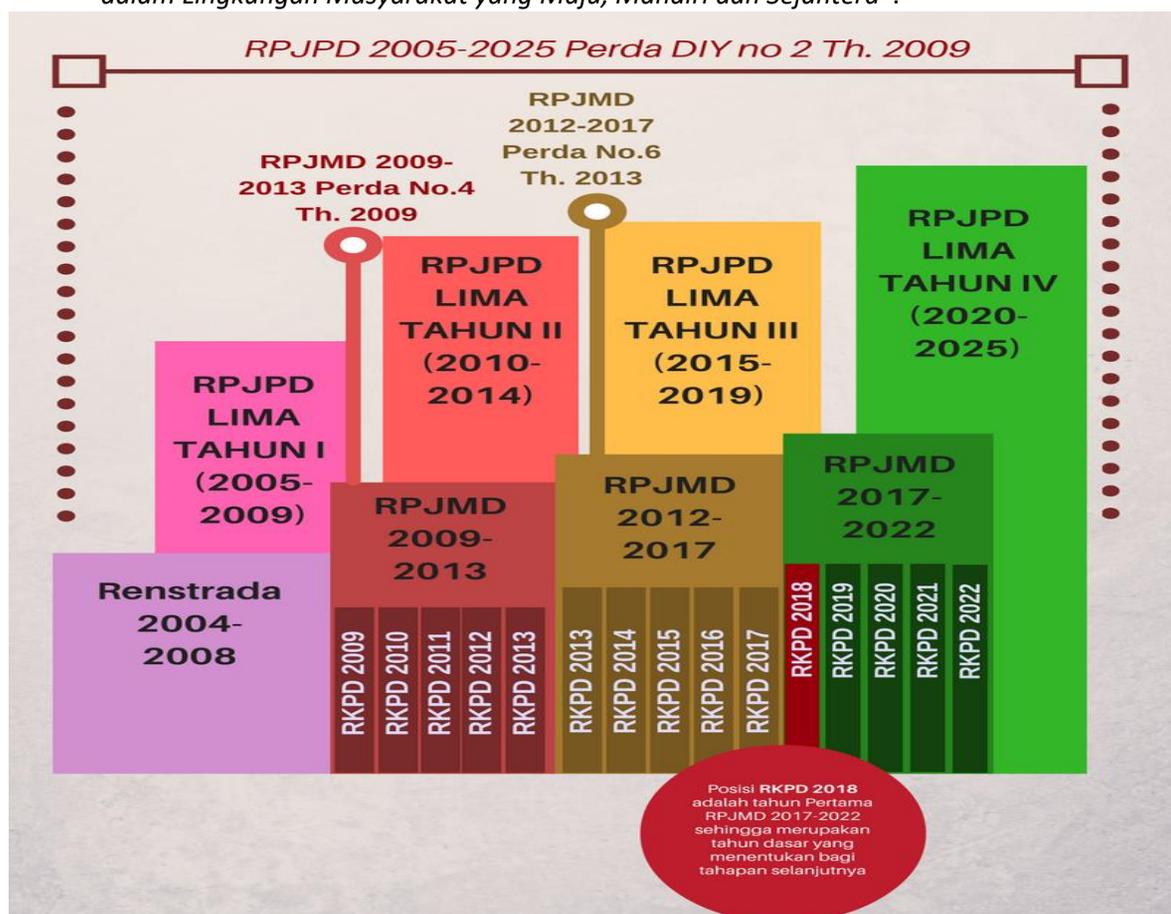
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Background Study RPJMD DIY 2017-2022. Penjabaran dari perumusan tema pembangunan daerah dalam RKPD DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2018

RKPD DIY Tahun 2018 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) dan Lima Tahun IV (2020–2025) RPJPD DIY Tahun 2005–2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah “*pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkandaya saing keunggulan daerah.*” Sedangkan tahapan Lima Tahun IV (2020–2025) memiliki penekanan untuk “*penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.*”

RPJPD DIY Tahun 2005–2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan RPJMD DIY 2017–2022 yang memasuki masa transisi pada tahun 2017–2018. Dokumen RPJMD DIY 2017–2022 sendiri memiliki peran kritical karena berada dalam posisi menjelang berakhirnya RPJPD DIY 2005–2025 dalam upaya mewujudkan visi “*Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*”.



Gambar 2.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017-2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2018 merupakan tahapan pembangunan pertama yang menjadi tahun dasar dari periode RPJMD DIY 2017-2022. Tahun 2017 sebagai tahun transisi saat masa jabatan Gubernur DIY berakhir dan dilanjutkan dengan periode berikutnya sesuai visi misi yang baru.

b. Internalisasi Paradigma Renaisans Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018

RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya disusun dalam upaya mewujudkan rumusan visi pembangunan jangka menengah DIY dalam *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022 yaitu "*Jogja Tuladha Utama*." Nilai-nilai dasar yang diangkat dalam rumusan visi tersebut ialah aspek nilai-nilai futuristik DIY yang kompetitif dibandingkan provinsi lain di Indonesia sekaligus merupakan mandat pelestarian nilai-nilai asli lama yang adiluhung dan nilai solutif sebagai rujukan nasional.

Visi *Jogja Tuladha Utama* merupakan upaya DIY untuk menjadi acuan nasional dan menempatkan diri dalam kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain ingin memberi landasan, *Jogja Tuladha Utama* berupaya untuk mewujudkan paradigma Renaisans Yogyakarta. Paradigma tersebut mengacu pada konsep *manunggaling kawula-gusti dan golong-gilig*, serta diekspresikan dengan sikap satria: *sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan. Paradigma tersebut diwujudkan dalam rangka mengejawantahkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* yang bermakna melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia.

RKPD Tahun 2018 berupaya mewujudkan Renaisans Yogyakarta melalui internalisasi 9 strategi yaitu: pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang, dan lingkungan. Melalui internalisasi tersebut, paradigma Renaisans Yogyakarta mencita-citakan peradaban baru kembali ke timur dalam kerangka arus balik perikehidupan *among tani dagang layar*, dimana basis visi kemaritiman dan jasa-jasa menjadi arus utama. Dari *among tani dagang layar* ialah paradigma DIY dalam mengikuti tren pergeseran peradaban ke timur. DIY berupaya membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma *among tani* menjadi *dagang layar* dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman. Laut Selatan merupakan halaman depan DIY sehingga harus menguatkan basis perekonomian di wilayah selatan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan penumbuhan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di pedesaan serta industri kelautan perikanan dan pariwisata maritim yang didukung oleh infrastruktur jalan selatan yang menjadi pilihan strategis. Arus balik dalam paradigma *among tani dagang layar* tidak menegasikan peran basis agraris yang sudah ada, dengan terus memperkuat basis pertanian yang telah ada.

c. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2018

Keistimewaan DIY dikuatkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat enam nilai dasar budaya, meliputi *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, *Manunggaling Kawula Gusti*, Tahta Untuk Rakyat, *Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, *Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari paradigma Renaisans Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan DIY. Semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di DIY juga harus dapat menjadi roh sekaligus



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2018, utamanya dalam melaksanakan kewenangan Urusan Keistimewaan yang terdiri dari: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; serta (5) Tata Ruang.

Urusan Keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Sehingga keistimewaan merupakan bagian inklusif dari perencanaan pembangunan yang selaras dalam tema RKPD Tahun 2018.

d. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2018 dengan Tema RKPD Tahun 2018

Tematik pembangunan tahun 2018 dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Tematik pembangunan disusun dalam memberikan fokus perencanaan pembangunan multidimensi yang menjadi kerangka dasar dalam perumusan tema pembangunan tahun 2018. Adapun tematik yang diangkat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018, meliputi :

- 1) Tematik Ketimpangan Wilayah;
- 2) Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
- 3) Tematik Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA);
- 4) Tematik Pembiayaan Pembangunan.

Tematik pembangunan tersebut dipilih berdasarkan isu pembangunan di DIY dengan latar belakang sebagai berikut:

1) Tematik Ketimpangan Kewilayahan

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah mencerminkan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antar wilayah harus selalu diupayakan. Demikian halnya dengan DIY yang masih dihadapkan pada ketimpangan wilayah, yang ditunjukkan oleh Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, yang hanya seluas sekitar 19% dari wilayah DIY tetapi menguasai sekitar 60% dari total PDRB DIY.

Faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi. Konsentrasi kegiatan ekonomi di DIY ada di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tidak mengherankan jika PDRB perkapita kedua wilayah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain. Faktor lain penyebab ketimpangan adalah alokasi investasi yang belum merata baik PMA maupun PMDN.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketimpangan antar wilayah pada periode 2011-2015 di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu ditandai dengan penurunan indeks Williamson dari 47,56% pada tahun 2011 menjadi 46,95% pada tahun 2015. Namun demikian, angka tersebut masih dipandang tinggi. Oleh karenanya diperlukan upaya pemerataan pembangunan dengan program-program afirmatif untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Meskipun upaya akselerasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul telah dilakukan, namun data menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih berada di bawah rata-rata DIY. Pertumbuhan ekonomi DIY masih disumbang oleh Sleman dan Yogyakarta. Pertumbuhan yang cukup pesat di Kabupaten Sleman dan Yogyakarta ini terutama didorong oleh sektor-sektor tersier seperti perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa.

Sebagai daerah penyangga utama, perkembangan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, porsi distribusinya mencapai sepertiga dari total PDRB DIY. Kabupaten Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat, sementara itu Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh, pangsa distribusinya di bawah Sleman yaitu sekitar 26%. Bantul sebagai penyangga lapis kedua perkembangan perkotaan pangsa distribusinya bergerak lebih meningkat dibanding kabupaten/kota lain meskipun masih di bawah 20%. Sementara dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65% dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. Letak geografis kedua kabupaten ini terpisah dari pusat Kota Yogyakarta, sehingga perkembangan ekonominya tidak dapat langsung mengandalkan rembesan mekarnya perkotaan. Dua kabupaten ini perlu terobosan investasi besar untuk mengembangkan potensi ekonomi, terutama peningkatan akses melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Oleh karena itu agar ketimpangan wilayah di DIY tidak semakin melebar dan pertumbuhan ekonomi semakin merata, isu ketimpangan wilayah ini dimunculkan dalam Tematik Pembangunan Tahun 2018 sehingga dapat diperoleh sinergi antar sektor dan kabupaten/kota dalam rangka upaya penurunan ketimpangan antar wilayah melalui program dan kegiatan yang dapat menumbuhkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

2) Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2016 sebesar 13,10% berada pada peringkat 13 tertinggi angka kemiskinan nasional dan masih berada di atas rata-rata nasional. Potret tingkat kemiskinan DIY menempatkan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di DIY, sehingga diperlukan intervensi khusus terhadap kabupaten-kabupaten tersebut agar jumlah penduduk miskin menurun sebagaimana target tingkat kemiskinan DIY tahun 2018 dalam RPJMN sebesar 10,9%.

Sesuai dengan Arahan Gubernur terhadap pembangunan tahun 2018 maka penurunan kemiskinan dibarengi pula dengan penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan ketimpangan wilayah. Ketimpangan pendapatan yang digambarkan melalui Indeks Gini pada tahun 2017 sebesar 0,425. Hal ini menggambarkan pembangunan di DIY baru



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat berpenghasilan tinggi dan tidak merata di seluruh kelas masyarakat.

Upaya penurunan kemiskinan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dimana penurunan kemiskinan setiap tahunnya masih berada dibawah 1%. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan dalam implementasinya masih terjadi hambatan dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya: (1) Validasi data; (2) Kebanyakan program/kegiatan yang kurang efektif; (3) Kurangnya sinergi dan implementasi program/kegiatan; (4) Eksekusi program yang terlambat; serta (5) Pendampingan program yang belum optimal.

Berdasarkan hal tersebut maka tematik penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dipilih dalam Musrenbang tahun 2017 agar dapat diperoleh strategi penurunan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan pendekatan kewilayahan sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang melibatkan antar sektor dan kabupaten/kota dalam upaya penurunan kemiskinan.

3) Tematik Pembangunan Bandara NYIA

Sehubungan dengan telah terlaksananya "*Babat Alas Nawung Krida*" dalam rangka mengawali Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* pada hari Jumat 27 Januari 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajarannya, Pemda DIY telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pasca Pembangunan Bandara yang dipimpin Gubernur DIY.

Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY dibangun di atas lahan seluas 587 hektar yang dibangun dalam 2 tahap. Tahap 1 pembangunan bandara tersebut meliputi terminal dengan luas 130.000 meter persegi, *runway* sepanjang 3.250 meter dengan lebar 60 meter, apron berkapasitas 35 pesawat, dengan estimasi mampu menampung 15 juta penumpang per tahunnya. Bandara tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi kekurangan di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. Pembangunan bandara baru di Temon tersebut perlu direspon dalam perencanaan pembangunan DIY tahun 2018.

4) Tematik Pembiayaan Pembangunan

Perubahan paradigma pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program* membuat banyak kebijakan anggaran perlu dirubah. Salah satunya adalah fokus pendanaan pada program-program besar yang mengungkit dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan nasional yang menetapkan pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 6,02% menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi DIY. Kondisi pertumbuhan ekonomi DIY adalah sebesar 5,05% pada tahun 2016.

Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan model-model pembiayaan lama yang konvensional. Dalam hal ini harus dilakukan terobosan pembiayaan pembangunan salah satunya dengan peningkatan peran serta swasta dalam



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Public Private Partnership* (PPP), *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang lain.

Sinergi antara pemerintah dan swasta perlu dilakukan sejak tahap awal yaitu perencanaan. Untuk itu tematik pembiayaan pembangunan ini dipilih dalam rangka menggali skema-skema pembiayaan pembangunan yang berasal dari pihak swasta. Selanjutnya tematik tersebut akan menjadi bagian integral perencanaan yang akan mewarnai konsep perencanaan tahun 2018, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

e. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2018

Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (*regional and urban planning*), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah kabupaten/kota. Terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :

- 1) Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi :
 - Prioritas 1 : Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Swasta;
 - Prioritas 2 : Jasa-jasa;
 - Prioritas 3 : Konstruksi;
 - Prioritas 4 : Perdagangan Hotel dan Restoran;
 - Prioritas 5 : Pengangkutan dan Komunikasi.
 - Prioritas 6 : Listrik, Gas, dan Air Bersih;
 - Prioritas 7 : Pertanian.
- 2) Pendekatan *backward and forward linkage* sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sektor yang dalam arti membangun sektor strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (*multiplier effect*) pada pembangunan sektor lain.
- 3) Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi: (1) Penanggulangan Kemiskinan; (2) Pengembangan Investasi Infrastruktur; (3) Pengendalian Konversi Lahan Terbangun; (4) Reformasi Birokrasi; serta (5) Pengembangan Industri Kreatif.
- 4) Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi: (1) Nilai Inflasi; (2) Angka Kemiskinan; (3) Nilai ICOR; dan (4) Ketimpangan Regional.

Aspek kewilayahan dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan tahun 2018, sehingga aspek tersebut sinergis.

Perumusan tema pembangunan 2018 mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025, tema indikatif pada dokumen *Background Study* RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Pilihan tema pembangunan yang ada perlu memperhatikan pula dasar filosofi keistimewaan,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

renaisans, fokus tematik, serta fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan tahun 2018 di DIY.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan tahun 2018 sekurangnya harus memuat 4 fokus tematik dan berbagai aspek yang diinternalisasi dan dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2016-2017, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah:

“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan DIY yang diindikasikan dalam *Background Study* RPJMD DIY 2017-2022 dapat dideskripsikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lebih mengedepankan upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan pendapatan domestik bruto per kapita yang ukurannya dapat dilihat dari meningkatnya indeks pembangunan manusia. Aspek tersebut mengedepankan upaya mewujudkan *quality of life*. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan. Kompetensi SDM yang berdaya saing tinggi dapat menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Strategi peningkatan kualitas SDM dilaksanakan dengan meningkatkan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non formal yang berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya yang handal dan siap memasuki kompetisi global. Pembangunan SDM tersebut harus memiliki orientasi pada hasil karya yang berkualitas tinggi.

b. Penguatan Kapasitas Ekonomi

Penguatan kapasitas ekonomi lebih diartikan upaya memberikan peran kesejahteraan kepada masyarakat yang hasil akhirnya lebih pada aspek ekonomi, yaitu pendapatan. Terdapat beberapa hal yang menjadi penekanan dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan hal tersebut, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting sebagai upaya peningkatan kualitas hidup warga DIY dalam rangka mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan mengarusutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ada peran kolektif dari semua lini tata kelola



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

pemerintahan baik sektor publik, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat madani yang partisipatif.

c. Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Aspek ini lebih mengedepankan upaya membangun sinergi antar wilayah, membangun rantai distribusi antar wilayah dalam kerangka membangun keterkaitan antara wilayah pusat dan sub pusat, serta membagi wilayah-wilayah *hinterland*, serta menjaga keterpaduan antar ruang dan lingkungan. Dalam hal ini stabilitas antara wilayah juga dilihat dari aspek meningkatnya kualitas lingkungan di DIY. Pembangunan wilayah di DIY diupayakan dengan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan penataan ruang yang berbasis keunikan budaya, alam, humanis, dan berwawasan global. Pembangunan wilayah yang menghormati sosiokultural masyarakat diharapkan dapat lebih memanusiakan warga, pemeratakan akses atas kesejahteraan lahir batin berupa penyediaan sarana prasarana dasar, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

Pengembangan wilayah juga harus menjaga kelestarian alam dimana keberlanjutan akan membawa manfaat investasi lingkungan hidup bagi anak-cucu di masa yang akan datang. Pembangunan wilayah seharusnya humanis serta membebaskan masyarakat dari diskriminasi (ras, suku, agama, kondisi fisik, dll). Pembangunan wilayah harus berorientasi global untuk membuka peluang kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

d. Penguatan Kapasitas Infrastruktur

Penguatan kapasitas infrastruktur lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang secara khusus mengarah pada layanan infrastruktur dasar. Dalam hal ini terkait dengan upaya mewujudkan layanan aksesibilitas, air minum, limbah dan sanitasi, listrik, serta hunian. Pembangunan infrastruktur ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan akses dan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, baik pada infrastruktur layanan dasar maupun infrastruktur untuk mendukung perekonomian.

e. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mewujudkan kinerja pemerintah secara lebih akuntabel dan profesional. Hal ini tercermin dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan mewujudkan opini pemeriksaan BPK secara lebih optimal.

f. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi penekanan di DIY sekaligus menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Pengembangan pariwisata diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara, serta meningkatkan pendapatan sektor pariwisata.

g. Pelestarian Nilai Budaya

Pelestarian nilai budaya menjadi bagian penting dalam melindungi, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan Jawa, khususnya DIY yang menjadi salah satu pusat budaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang muncul semenjak zaman mataram. Pelestarian nilai budaya dilandasi oleh semangat renaissance yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Budaya di DIY juga sangat dipengaruhi aspek tata nilai dan etika yang mengedepankan perwujudan stabilitas pembangunan wilayah.

h. Peningkatan Tata Nilai dan Etika

Peningkatan tata nilai dan etika lebih pada upaya memberikan pemahaman mendasar tentang pentingnya nilai dan budaya serta keamanan dan ketertiban pada masyarakat yang dibangun untuk mewujudkan stabilitas di DIY. Hal ini ke depan dapat didukung dari aspek pendidikan maupun aspek pengembangan konteks demokrasi, serta budaya masyarakat yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2018 sebesar Rp5.393.544.092.997,71 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.925.549.027.558,71, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.388.039.565.092,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp79.955.500.347,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebesar Rp5.443.179.144.512,93 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.040.723.348.530,93, Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp3.328.773.835.982,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp73.681.960.000,00.

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2018 sebesar Rp5.715.610.529.135,89 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.643.068.577.778,80, Belanja Modal sebesar Rp1.260.102.019.948,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp35.917.294.051,71 dan Transfer sebesar Rp776.522.637.357,38.

Sedangkan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp5.296.403.530.714,17 terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp3.391.193.567.029,05, Belanja Modal sebesar Rp1.132.827.726.327,74, Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 dan Transfer sebesar Rp 772.382.237.357,38.

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp146.775.613.798,76 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerimaan sebesar Rp 347.018.633.070,18 dan pengeluaran sebesar Rp22.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp325.018.633.070,18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp471.794.246.868,94 secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
URUSAN KONKUREN WAJIB PENDIDIKAN				
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
PENDAPATAN DISDIKPORA	3.414.733.722,00	4.686.459.550,00	1.271.725.828,00	137,24 %
Pendapatan Asli Daerah	3.414.733.722,00	4.686.459.550,00	1.271.725.828,00	137,24 %
Hasil Retribusi Daerah	1.105.250.000,00	1.639.131.410,00	533.881.410,00	148,30 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.309.483.722,00	3.047.328.140,00	737.844.418,00	131,95 %
BELANJA DISDIKPORA	1.327.372.081.501,00	1.257.674.728.685,00	(69.697.352.816,00)	94,75 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	742.451.304.486,00	728.142.489.165,00	(14.308.815.321,00)	98,07 %
Belanja Pegawai	742.451.304.486,00	728.142.489.165,00	(14.308.815.321,00)	98,07 %
BELANJA LANGSUNG	584.920.777.015,00	529.532.239.520,00	(55.388.537.495,00)	90,53 %
Program Administrasi Perkantoran	11.779.433.733,00	10.050.893.355,00	(1.728.540.378,00)	85,33 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9.978.333.000,00	9.413.182.497,00	(565.150.503,00)	94,34 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	2.018.918.300,00	1.961.077.400,00	(57.840.900,00)	97,14 %
Program Layanan Pendidikan Menengah	401.416.878.226,00	364.226.669.598,00	(37.190.208.628,00)	90,74 %
Program Layanan Pendidikan Khusus	25.467.168.840,00	23.671.288.074,00	(1.795.880.766,00)	92,95 %
Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	9.184.252.631,00	7.151.237.739,00	(2.033.014.892,00)	77,86 %
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	19.313.970.250,00	15.004.779.388,00	(4.309.190.862,00)	77,69 %
Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4.009.254.460	3.982.569.913,00	(26.684.547,00)	99,33 %
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	39.931.160.975,00	37.783.851.666,00	(2.147.309.309,00)	94,62 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Bantul	1.505.821.500,00	1.384.969.900,00	(120.851.600,00)	91,97 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Sleman	1.684.021.800,00	1.271.983.821,00	(412.037.979,00)	75,53 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kulon Progo	1.088.889.800,00	1.021.264.113,00	(67.625.687,00)	93,79 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Gunung Kidul	1.639.622.500,00	1.333.794.700,00	(305.827.800,00)	81,35 %
Program Layanan Pendidikan Menengah Kota	1.401.250.000,00	1.285.884.800,00	(115.365.200,00)	91,77 %
Program Pembinaan Kepemudaan	11.012.976.000,00	10.075.143.762,00	(937.832.238,00)	91,48 %
Program Pembinaan Olahraga	43.488.825.000,00	39.913.648.794,00	(3.575.176.206,00)	91,78 %
URUSAN WAJIB KESEHATAN				
DINAS KESEHATAN				
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN	8.506.500.000,00	10.311.327.306,35	1.804.827.306,35	121,22 %
Pendapatan Asli Daerah	8.506.500.000,00	10.311.327.306,35	1.804.827.306,35	121,22 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.506.500.000,00	10.311.327.306,35	1.804.827.306,35	121,22 %
BELANJA DINAS KESEHATAN	98.977.444.027,94	83.941.840.935,50	(15.035.603.092,44)	84,81 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.351.210.915,00	15.043.275.338,00	(307.935.577,00)	97,99 %
Belanja Pegawai	15.351.210.915,00	15.043.275.338,00	(307.935.577,00)	97,99 %
BELANJA LANGSUNG	83.626.233.112,94	68.898.565.597,50	(14.727.667.515,44)	82,39 %
Program Administrasi Perkantoran	2.051.405.744,00	1.706.838.530,00	(344.567.214,00)	83,20 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	878.637.000,00	744.102.435,00	(134.534.565,00)	84,69 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.072.000,00	30.071.500,00	(1.000.500,00)	96,78 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	415.343.400,00	410.110.400,00	(5.233.000,00)	98,74 %
Program Pelayanan Kesehatan	2.987.568.550,00	2.716.871.198,00	(270.697.352,00)	90,94 %
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.385.236.900,00	2.204.129.760,00	(181.107.140,00)	92,41 %
Program Kesehatan Masyarakat	2.799.946.500,00	2.712.660.668,00	(87.285.832,00)	96,88 %
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	815.480.500,00	800.151.366,00	(15.329.134,00)	98,12 %
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BALABKES	5.168.501.750,00	4.887.398.155,00	(281.103.595,00)	94,56 %
Program Pelayanan Pelatihan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES	7.613.604.021,00	5.909.178.880,50	(1.704.425.140,50)	77,61 %
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELJAMKESOS	58.479.436.747,94	46.777.052.705,00	(11.702.384.042,94)	79,99 %
URUSAN WAJIB KESEHATAN				
RUMAH SAKIT GRHASIA				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN R.S. GRHASIA	20.000.000.000,00	19.890.307.466,84	(109.692.533,16)	99,45 %
Pendapatan Asli Daerah	20.000.000.000,00	19.890.307.466,84	(109.692.533,16)	99,45 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20.000.000.000,00	19.890.307.466,84	(109.692.533,16)	99,45 %
BELANJA R.S. GRHASIA	48.778.197.304,71	39.084.583.954,00	(9.693.613.350,71)	80,12 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.150.337.952,00	16.932.352.797,00	(217.985.155,00)	98,73 %
Belanja Pegawai	17.150.337.952,00	16.932.352.797,00	(217.985.155,00)	98,73 %
BELANJA LANGSUNG	31.627.859.352,71	22.152.231.157,00	(9.475.628.195,71)	70,04 %
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS GRHASIA	31.627.859.352,71	22.152.231.157,00	(9.475.628.195,71)	70,04 %
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA				
PENDAPATAN R.S.P. RESPIRA	7.500.000.000,00	9.015.569.856,00	1.515.569.856,00	120,21 %
Pendapatan Asli Daerah	7.500.000.000,00	9.015.569.856,00	1.515.569.856,00	120,21 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.500.000.000,00	9.015.569.856,00	1.515.569.856,00	120,21 %
BELANJA R.S.P. RESPIRA	30.733.052.653,00	23.801.789.847,00	(6.931.262.806,00)	77,44 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.042.180.345,00	8.927.866.051,00	(114.314.294,00)	98,74 %
Belanja Pegawai	9.042.180.345,00	8.927.866.051,00	(114.314.294,00)	98,74 %
BELANJA LANGSUNG	21.690.872.308,00	14.873.923.796,00	(6.816.948.512,00)	68,57 %
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS RESPIRA	21.690.872.308,00	14.873.923.796,00	(6.816.948.512,00)	68,57 %
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM				
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM	8.577.416.150,00	9.294.052.852,16	716.636.702,16	108,35 %
Pendapatan Asli Daerah	8.577.416.150,00	9.294.052.852,16	716.636.702,16	108,35 %
Hasil Retribusi Daerah	5.166.911.150,00	5.785.981.416,16	619.070.266,16	111,98 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.410.505.000,00	3.508.071.436,00	97.566.436,00	102,86 %
BELANJA DINAS PUP-ESDM	473.121.672.907,00	430.170.370.964,00	(42.951.301.943,00)	90,92 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.455.593.848,00	18.993.053.862,00	(462.539.986,00)	97,62 %
Belanja Pegawai	19.455.593.848,00	18.993.053.862,00	(462.539.986,00)	97,62 %
BELANJA LANGSUNG	453.666.079.059,00	411.177.317.102,00	(42.488.761.957,00)	90,63 %
Program Administrasi Perkantoran	12.271.932.345,00	10.110.403.912,00	(2.161.528.433,00)	82,39 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	7.684.169.500,00	6.993.324.933,00	(690.844.567,00)	91,01 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	687.889.250,00	636.679.200,00	(51.210.050,00)	92,56 %
Program Penyelenggaraan Jalan	156.437.294.975,00	148.498.570.114,00	(7.938.724.861,00)	94,93 %
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	25.416.003.700,00	21.360.708.168,00	(4.055.295.532,00)	84,04 %
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase	30.983.551.362,00	29.879.383.641,00	(1.104.167.721,00)	96,44 %
Program Pengelolaan Persampahan, Air Minum, dan Air Limbah Regional	20.305.104.000,00	18.988.278.545,00	(1.316.825.455,00)	93,51 %
Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	4.024.029.687,00	3.676.955.424,00	(347.074.263,00)	91,37 %
Program Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Pemukiman	79.451.332.325,00	68.881.255.439,00	(10.570.076.886,00)	86,70 %
Program Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	84.478.246.975,00	75.672.755.676,00	(8.805.491.299,00)	89,58 %
Program Pengaturan dan Pengembangan Energi, Air Tanah, Geologi, dan Pertambangan	28.449.830.145,00	23.698.874.818,00	(4.750.955.327,00)	83,30 %
Program Pengawasan dan Pengendalian Energi, Air Tanah, Geologi, dan Pertambangan	3.476.694.795,00	2.780.127.232,00	(696.567.563,00)	79,96 %
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG				
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
BELANJA	597.414.610.012,00	582.606.673.886,79	(14.807.936.125,21)	97,52 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.411.618.878,00	2.365.877.116,00	(45.741.762,00)	98,10 %
Belanja Pegawai	2.411.618.878,00	2.365.877.116,00	(45.741.762,00)	98,10 %
BELANJA LANGSUNG	595.002.991.134,00	580.240.796.770,79	(14.762.194.363,21)	97,52 %
Program Administrasi Perkantoran	1.349.664.175,50	1.151.292.964,00	(198.371.211,50)	85,30 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.750.000.000,00	1.442.174.050,00	(307.825.950,00)	82,41 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	311.194.458,50	218.696.080,00	(92.498.378,50)	70,28 %
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	400.000.000,00	317.356.856,00	(82.643.144,00)	79,34 %
Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	1.470.132.500,00	1.418.901.906,00	(51.230.594,00)	96,52 %
Program Tertib Administrasi Pertanahan	200.000.000,00	153.693.500,00	(46.306.500,00)	76,85 %
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	15.874.200.000,00	14.367.781.078,00	(1.506.418.922,00)	90,51 %
Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.109.761.650,00	3.793.642.777,00	(316.118.873,00)	92,31 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan	1.695.936.000,00	1.470.763.800,00	(225.172.200,00)	86,72 %
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Pertanahan	1.360.490.350,00	566.023.100,00	(794.467.250,00)	41,60 %
Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	6.919.761.505,00	6.618.511.772,00	(301.249.733,00)	95,65 %
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	557.227.232.695,00	546.976.130.823,79	(10.251.101.871,21)	98,16 %
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	299.910.500,00	291.418.926,00	(8.491.574,00)	97,17 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Tata Ruang	828.700.000,00	644.551.838,00	(184.148.162,00)	77,78 %
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.206.007.300,00	809.857.300,00	(396.150.000,00)	67,15 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
BELANJA	10.447.570.405,00	9.710.661.281,00	(736.909.124,00)	92,95 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.465.038.080,00	3.408.090.909,00	(56.947.171,00)	98,36 %
Belanja Pegawai	3.465.038.080,00	3.408.090.909,00	(56.947.171,00)	98,36 %
BELANJA LANGSUNG	6.982.532.325,00	6.302.570.372,00	(679.961.953,00)	90,26 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	987.200.925,00	945.132.374,00	(42.068.551,00)	95,74 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	736.000.000,00	691.886.444,00	(44.113.556,00)	94,01 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	287.198.300,00	284.384.054,00	(2.814.246,00)	99,02 %
Program Pendidikan Politik Masyarakat	326.443.600,00	304.147.650,00	(22.295.950,00)	93,17 %
Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	4.645.689.500,00	4.077.019.850,00	(568.669.650,00)	87,76 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
BELANJA	17.457.791.565,00	16.757.925.599,00	(699.865.966,00)	95,99 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.545.505.540,00	7.384.743.171,00	(160.762.369,00)	97,87 %
Belanja Pegawai	7.545.505.540,00	7.384.743.171,00	(160.762.369,00)	97,87 %
BELANJA LANGSUNG	9.912.286.025,00	9.373.182.428,00	(539.103.597,00)	94,56 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.333.402.925,00	1.136.899.833,00	(196.503.092,00)	85,26 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	924.725.000,00	826.587.111,00	(98.137.889,00)	89,39 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	392.119.900,00	387.598.080,00	(4.521.820,00)	98,85 %
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal	1.647.621.500,00	1.612.251.500,00	(35.370.000,00)	97,85 %
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	4.719.988.450,00	4.553.806.904,00	(166.181.546,00)	96,48 %
Program Pembinaan dan Pelaksanaan Penegakkan Perda dan Perkada	894.428.250,00	856.039.000,00	(38.389.250,00)	95,71 %
URUSAN WAJIB KONKUREN WAJIB				
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA	89.848.249.543,00	23.441.947.346,40	(66.406.302.196,60)	26,09 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.939.278.013,00	2.926.878.432,00	(12.399.581,00)	99,58 %
Belanja Pegawai	2.939.278.013,00	2.926.878.432,00	(12.399.581,00)	99,58 %
BELANJA LANGSUNG	86.908.971.530,00	20.515.068.914,40	(66.393.902.615,60)	23,61 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.662.889.980,00	1.480.357.657,00	(182.532.323,00)	89,02 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.800.000,00	466.625.720,00	(25.174.280,00)	94,88 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	114.671.800,00	113.536.600,00	(1.135.200,00)	99,01 %
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.158.507.900,00	5.048.160.038,00	(110.347.862,00)	97,86 %
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	9.900.452.300,00	9.173.720.250,00	(726.732.050,00)	92,66 %
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	69.580.649.550,00	4.232.668.649,40	(65.347.980.900,60)	6,08 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
SOSIAL				
DINAS SOSIAL				
PENDAPATAN DINAS SOSIAL	672.000.000,00	672.000.000,00	-	100,00 %
Pendapatan Asli Daerah	672.000.000,00	672.000.000,00	-	100,00 %
Retribusi Daerah	672.000.000,00	672.000.000,00	-	100,00 %
BELANJA DINAS SOSIAL	50.773.501.177,00	48.818.330.507,00	(1.955.170.670,00)	96,15 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.170.728.908,00	15.907.565.376,00	(263.163.532,00)	98,37 %
Belanja Pegawai	16.170.728.908,00	15.907.565.376,00	(263.163.532,00)	98,37 %
BELANJA LANGSUNG	34.602.772.269,00	32.910.765.131,00	(1.692.007.138,00)	95,11 %
Program Administrasi Perkantoran	14.606.459.486,00	13.485.777.838,00	(1.120.681.648,00)	92,33 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.779.976.800,00	1.715.875.297,00	(64.101.503,00)	96,40 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	147.894.750,00	143.198.900,00	(4.695.850,00)	96,82 %
Program Rehabilitasi Sosial	4.216.519.575,00	3.936.441.118,00	(280.078.457,00)	93,36 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.886.029.500,00	1.808.315.450,00	(77.714.050,00)	95,88 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	1.661.822.877,00	1.650.307.350,00	(11.515.527,00)	99,31 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	904.113.769,00	883.452.751,00	(20.661.018,00)	97,71 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	746.870.800,00	739.149.300,00	(7.721.500,00)	98,97 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	771.286.450,00	769.977.850,00	(1.308.600,00)	99,83 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	1.214.886.000,00	1.208.985.600,00	(5.900.400,00)	99,51 %
Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	721.304.862,00	718.784.862,00	(2.520.000,00)	99,65 %
Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	5.945.607.400,00	5.850.498.815,00	(95.108.585,00)	98,40 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
TENAGA KERJA				
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
PENDAPATAN	1.114.030.000,00	1.705.873.000,00	591.843.000,00	153,13 %
Pendapatan Asli Daerah	1.114.030.000,00	1.705.873.000,00	591.843.000,00	153,13 %
Retribusi Daerah	1.110.430.000,00	1.697.273.000,00	586.843.000,00	152,85 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.600.000,00	8.600.000,00	5.000.000,00	238,89 %
BELANJA DISNAKERTRANS	33.843.270.900,00	32.373.763.653,00	(1.469.507.247,00)	95,66 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.139.642.832,00	13.857.217.452,00	(282.425.380,00)	98,00 %
Belanja Pegawai	14.139.642.832,00	13.857.217.452,00	(282.425.380,00)	98,00 %
BELANJA LANGSUNG	19.703.628.068,00	18.516.546.201,00	(1.187.081.867,00)	93,98 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.965.806.421,00	2.674.392.007,00	(291.414.414,00)	90,17 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.302.867.500,00	1.258.120.000,00	(44.747.500,00)	96,57 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	119.815.500,00	119.815.500,00	-	100,00 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	523.995.547,00	517.775.339,00	(6.220.208,00)	98,81 %
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.920.000.000,00	5.726.544.955,00	(193.455.045,00)	96,73 %
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	502.935.000,00	466.401.775,00	(36.533.225,00)	92,74 %
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	638.714.800,00	636.510.805,00	(2.203.995,00)	99,65 %
Program Pembinaan Pelatihan Stadarisasi dan Pemagangan	1.547.369.000,00	1.521.648.550,00	(25.720.450,00)	98,34 %
Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigran	5.417.775.300,00	4.854.039.970,00	(563.735.330,00)	89,59 %
Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	764.349.000,00	741.297.300,00	(23.051.700,00)	96,98 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT				
BELANJA BPPM	13.390.982.194,00	12.616.706.429,00	(774.275.765,00)	94,22 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.796.141.284,00	3.706.544.468,00	(89.596.816,00)	97,64 %
Belanja Pegawai	3.796.141.284,00	3.706.544.468,00	(89.596.816,00)	97,64 %
BELANJA LANGSUNG	9.594.840.910,00	8.910.161.961,00	(684.678.949,00)	92,86 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.248.627.794,00	1.170.058.451,00	(78.569.343,00)	93,71 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	754.181.000,00	667.074.600,00	(87.106.400,00)	88,45 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	141.205.616,00	138.710.045,00	(2.495.571,00)	98,23 %
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.914.997.450,00	1.854.208.950,00	(60.788.500,00)	96,83 %
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1.421.051.100,00	1.277.847.025,00	(143.204.075,00)	89,92 %
Program Pemberdayaan Masyarakat	1.822.351.600,00	1.703.151.990,00	(119.199.610,00)	93,46 %
Program Keberdayaan Masyarakat	859.732.900,00	703.543.400,00	(156.189.500,00)	81,83 %
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	250.208.500,00	237.922.200,00	(12.286.300,00)	95,09 %
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.182.484.950,00	1.157.645.300,00	(24.839.650,00)	97,90 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PANGAN				
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN				
BELANJA	7.505.145.752,00	7.348.066.622,00	(157.079.130,00)	97,91 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.214.412.002,00	4.170.340.456,00	(44.071.546,00)	98,95 %
Belanja Pegawai	4.214.412.002,00	4.170.340.456,00	(44.071.546,00)	98,95 %
BELANJA LANGSUNG	3.290.733.750,00	3.177.726.166,00	(113.007.584,00)	96,57 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	820.796.500,00	784.002.973,00	(36.793.527,00)	95,52 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.228.750,00	195.886.115,00	(18.342.635,00)	91,44 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.808.750,00	84.361.165,00	(1.447.585,00)	98,31 %
Program Peningkatan Ketersediaan Dan Akses Pangan	1.311.400.250,00	1.281.266.542,00	(30.133.708,00)	97,70 %
Program Keanekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	858.499.500,00	832.209.371,00	(26.290.129,00)	96,94 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
LINGKUNGAN HIDUP				
BADAN LINGKUNGAN HIDUP				
PENDAPATAN	10.000.000,00	44.185.000,00	34.185.000,00	441,85 %
Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00	44.185.000,00	34.185.000,00	441,85 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.000.000,00	44.185.000,00	34.185.000,00	441,85 %
BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	28.139.463.253,00	18.878.960.368,00	(9.260.502.885,00)	67,09 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.981.929.828,00	2.967.908.522,00	(14.021.306,00)	99,53 %
Belanja Pegawai	2.981.929.828,00	2.967.908.522,00	(14.021.306,00)	99,53 %
BELANJA LANGSUNG	25.157.533.425,00	15.911.051.846,00	(9.246.481.579,00)	63,25 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.160.634.200,00	1.083.075.788,00	(77.558.412,00)	93,32 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	714.776.000,00	585.908.617,00	(128.867.383,00)	81,97 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	787.456.775,00	778.260.634,00	(9.196.141,00)	98,83 %
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	3.011.987.650,00	2.777.031.996,00	(234.955.654,00)	92,20 %
Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	2.140.299.050,00	1.918.607.575,00	(221.691.475,00)	89,64 %
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	4.166.366.850,00	3.919.580.404,00	(246.786.446,00)	94,08 %
Program Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi	13.176.012.900,00	4.848.586.832,00	(8.327.426.068,00)	36,80 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PERHUBUNGAN				
DINAS PERHUBUNGAN				
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN	19.893.917.000,00	21.284.235.952,52	1.390.318.952,52	106,99 %
Pendapatan Asli Daerah	19.893.917.000,00	21.284.235.952,52	1.390.318.952,52	106,99 %
Hasil Retribusi Daerah	1.531.200.000,00	1.459.200.000,00	(72.000.000,00)	95,30 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.362.717.000,00	19.825.035.952,52	1.462.318.952,52	107,96 %
BELANJA	138.677.714.696,91	134.347.569.687,58	(4.330.145.009,33)	96,88 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.397.629.211,00	8.256.098.494,00	(141.530.717,00)	98,31 %
Belanja Pegawai	8.397.629.211,00	8.256.098.494,00	(141.530.717,00)	98,31 %
BELANJA LANGSUNG	130.280.085.485,91	126.091.471.193,58	(4.188.614.292,33)	96,78 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.621.532.225,00	4.031.625.811,00	(589.906.414,00)	87,24 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.181.976.950,00	1.170.200.551,00	(11.776.399,00)	99,00 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	629.102.300,00	622.552.572,00	(6.549.728,00)	98,96 %
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	109.426.471.510,91	106.599.368.773,58	(2.827.102.737,33)	97,42 %
Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	8.116.476.500,00	7.554.207.106,00	(562.269.394,00)	93,07 %
Program Pengembangan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	4.707.011.000,00	4.614.985.000,00	(92.026.000,00)	98,04 %
Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi	1.597.515.000,00	1.498.531.380,00	(98.983.620,00)	93,80 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PENDAPATAN DINAS KOMINFO	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Pendapatan Asli Daerah	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	3.300.000,00	3.300.000,00	-
BELANJA	21.836.147.556,00	20.894.492.020,00	(941.655.536,00)	95,69 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.945.435.716,00	3.860.370.992,00	(85.064.724,00)	97,84 %
Belanja Pegawai	3.945.435.716,00	3.860.370.992,00	(85.064.724,00)	97,84 %
BELANJA LANGSUNG	17.890.711.840,00	17.034.121.028,00	(856.590.812,00)	95,21 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.682.555.500,00	1.540.634.370,00	(141.921.130,00)	91,57 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.081.650.250,00	960.130.843,00	(121.519.407,00)	88,77 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	248.499.750,00	235.627.850,00	(12.871.900,00)	94,82 %
Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.306.903.040,00	3.108.307.733,00	(198.595.307,00)	93,99 %
Program Pengembangan Aplikasi Informatika	2.561.883.200,00	2.411.896.302,00	(149.986.898,00)	94,15 %
Program Layanan Teknologi Informasi	7.339.534.000,00	7.148.760.654,00	(190.773.346,00)	97,40 %
Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	1.669.686.100,00	1.628.763.276,00	(40.922.824,00)	97,55 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				
PENDAPATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	5.750.000,00	5.750.000,00	-
Pendapatan Asli Daerah	-	5.750.000,00	5.750.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	5.750.000,00	5.750.000,00	-
BELANJA	17.821.490.854,00	17.487.122.853,00	(334.368.001,00)	98,12 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.676.212.129,00	2.648.275.845,00	(27.936.284,00)	98,96 %
Belanja Pegawai	2.676.212.129,00	2.648.275.845,00	(27.936.284,00)	98,96 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA LANGSUNG	15.145.278.725,00	14.838.847.008,00	(306.431.717,00)	97,98 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.387.181.725,00	1.242.693.642,00	(144.488.083,00)	89,58 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.242.769.000,00	7.240.088.000,00	(2.681.000,00)	99,96 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99.264.500,00	95.851.962,00	(3.412.538,00)	96,56 %
Program Pengembangan UKM	3.482.782.500,00	3.383.113.300,00	(99.669.200,00)	97,14 %
Program Penguatan SDM Kelembagaan Koperasi	2.401.257.500,00	2.360.347.504,00	(40.909.996,00)	98,30 %
Program Peningkatan Akses Pembiayaan	282.070.500,00	275.879.500,00	(6.191.000,00)	97,81 %
Program Pengawasan Koperasi dan UKM	249.953.000,00	240.873.100,00	(9.079.900,00)	96,37 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PENANAMAN MODAL				
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL				
BELANJA	5.136.340.826,00	4.828.511.677,00	(307.829.149,00)	94,01 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.105.355.326,00	1.944.992.559,00	(160.362.767,00)	92,38 %
Belanja Pegawai	2.105.355.326,00	1.944.992.559,00	(160.362.767,00)	92,38 %
BELANJA LANGSUNG	3.030.985.500,00	2.883.519.118,00	(147.466.382,00)	95,13 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	846.250.500,00	804.030.481,00	(42.220.019,00)	95,01 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.590.000,00	111.384.998,00	(5.205.002,00)	95,54 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	128.000.000,00	127.855.000,00	(145.000,00)	99,89 %
Program Perencanaan dan Peningkatan Iklim Investasi	1.092.895.000,00	1.013.693.946,00	(79.201.054,00)	92,75 %
Program Promosi Investasi	747.250.000,00	734.174.693,00	(13.075.307,00)	98,25 %
Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi	100.000.000,00	92.380.000,00	(7.620.000,00)	92,38 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PENANAMAN MODAL				
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)				
PENDAPATAN	667.797.400,00	419.508.000,00	(248.289.400,00)	62,82 %
Pendapatan Asli Daerah	667.797.400,00	419.508.000,00	(248.289.400,00)	62,82 %
Retribusi Daerah	667.797.400,00	419.508.000,00	(248.289.400,00)	62,82 %
BELANJA	5.366.285.958,00	4.511.955.748,00	(854.330.210,00)	84,08 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.080.953.433,00	1.028.832.571,00	(52.120.862,00)	95,18 %
Belanja Pegawai	1.080.953.433,00	1.028.832.571,00	(52.120.862,00)	95,18 %
BELANJA LANGSUNG	4.285.332.525,00	3.483.123.177,00	(802.209.348,00)	81,28 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	880.205.875,00	759.947.304,00	(120.258.571,00)	86,34 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	819.371.000,00	552.429.673,00	(266.941.327,00)	67,42 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	76.168.000,00	74.277.750,00	(1.890.250,00)	97,52 %
Program Pelayanan Perijinan	2.509.587.650,00	2.096.468.450,00	(413.119.200,00)	83,54 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
KEBUDAYAAN				
DINAS KEBUDAYAAN				
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	375.500.000,00	484.730.500,00	109.230.500,00	129,09 %
Pendapatan Asli Daerah	375.500.000,00	484.730.500,00	109.230.500,00	129,09 %
Hasil Retribusi Daerah	375.500.000,00	484.730.500,00	109.230.500,00	129,09 %
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	351.559.986.111,00	327.357.150.597,57	(24.202.835.513,43)	93,12 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.113.914.555,00	8.881.479.365,00	(232.435.190,00)	97,45 %
Belanja Pegawai	9.113.914.555,00	8.881.479.365,00	(232.435.190,00)	97,45 %
BELANJA LANGSUNG	342.446.071.556,00	318.475.671.232,57	(23.970.400.323,43)	93,00 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.480.050.506,00	4.864.262.296,00	(615.788.210,00)	88,76 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.342.170.300,00	1.167.602.748,00	(174.567.552,00)	86,99 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	290.850.750,00	254.149.210,00	(36.701.540,00)	87,38 %
Program Sejarah, Sastra dan Permuseuman	27.845.431.950,00	23.923.608.412,72	(3.921.823.537,28)	85,92 %
Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	2.101.095.100,00	2.056.894.718,00	(44.200.382,00)	97,90 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Penguatan Museum Sonobudoyo	8.213.813.250,00	7.581.358.212,00	(632.455.038,00)	92,30 %
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	54.497.697.850,00	49.610.163.760,85	(4.887.534.089,15)	91,03 %
Program Pengelolaan Taman Budaya	56.894.152.600,00	56.590.474.516,00	(303.678.084,00)	99,47 %
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	18.000.949.100,00	16.518.783.500,00	(1.482.165.600,00)	91,77 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	6.020.310.635,00	4.653.582.727,00	(1.366.727.908,00)	77,30 %
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	27.399.596.400,00	26.398.387.298,00	(1.001.209.102,00)	96,35 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni	115.057.083.977,00	106.981.728.246,00	(8.075.355.731,00)	92,98 %
Program Pendidikan Berbasis Budaya	11.931.567.638,00	10.972.956.338,00	(958.611.300,00)	91,97 %
Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	7.371.301.500,00	6.901.719.250,00	(469.582.250,00)	93,63 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
PERPUSTAKAAN				
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				
PENDAPATAN	225.000.000,00	401.113.900,00	176.113.900,00	178,27 %
Pendapatan Asli Daerah	225.000.000,00	401.113.900,00	176.113.900,00	178,27 %
Hasil Retribusi Daerah	225.000.000,00	401.113.900,00	176.113.900,00	178,27 %
BELANJA	65.047.914.977,00	62.589.636.222,81	(2.458.278.754,19)	96,22 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.113.050.627,00	6.995.373.721,00	(117.676.906,00)	98,35 %
Gaji pegawai	7.113.050.627,00	6.995.373.721,00	(117.676.906,00)	98,35 %
BELANJA LANGSUNG	57.934.864.350,00	55.594.262.501,81	(2.340.601.848,19)	95,96 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.715.718.050,00	5.227.797.064,00	(487.920.986,00)	91,46 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39.891.946.600,00	38.745.472.852,81	(1.146.473.747,19)	97,13 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	103.768.550,00	103.758.500,00	(10.050,00)	99,99 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	607.134.000,00	593.800.555,00	(13.333.445,00)	97,80 %
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	2.251.108.500,00	2.211.429.975,00	(39.678.525,00)	98,24 %
Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	2.528.093.450,00	2.261.747.850,00	(266.345.600,00)	89,46 %
Program Layanan Perpustakaan	4.746.446.700,00	4.450.437.355,00	(296.009.345,00)	93,76 %
Program Perlindungan dan Konservasi Arsip	978.728.000,00	945.595.550,00	(33.132.450,00)	96,61 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1.111.920.500,00	1.054.222.800,00	(57.697.700,00)	94,81 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN				
KELAUTAN DAN PERIKANAN				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PENDAPATAN	1.451.267.950,00	1.473.284.875,00	22.016.925,00	101,52 %
Pendapatan Asli Daerah	1.451.267.950,00	1.473.284.875,00	22.016.925,00	101,52 %
Hasil Retrebusi Daerah	1.451.267.950,00	1.460.989.000,00	9.721.050,00	100,67 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.550.000,00	12.295.875,00	3.745.875,00	143,81 %
BELANJA	23.404.378.259,00	22.680.312.808,00	(724.065.451,00)	96,91 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.413.517.728,00	7.262.120.706,00	(151.397.022,00)	97,96 %
Belanja Pegawai	7.413.517.728,00	7.262.120.706,00	(151.397.022,00)	97,96 %
BELANJA LANGSUNG	15.990.860.531,00	15.418.192.102,00	(572.668.429,00)	96,42 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.659.486.221,00	3.431.683.128,00	(227.803.093,00)	93,77 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.761.349.000,00	1.725.506.270,00	(35.842.730,00)	97,97 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	382.434.050,00	382.103.800,00	(330.250,00)	99,91 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.369.211.700,00	2.321.489.700,00	(47.722.000,00)	97,99 %
Program Pengelolaan Pelabuhan	159.646.360,00	147.018.700,00	(12.627.660,00)	92,09 %
Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	2.725.400.100,00	2.644.679.300,00	(80.720.800,00)	97,04 %
Program Rehabilitasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1.191.771.250,00	1.166.890.300,00	(24.880.950,00)	97,91 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.079.604.800,00	1.030.480.720,00	(49.124.080,00)	95,45 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.661.957.050,00	2.568.340.184,00	(93.616.866,00)	96,48 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN				
PARIWISATA				
DINAS PARIWISATA				
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA	100.000.000,00	96.262.055,00	(3.737.945,00)	96,26 %
Pendapatan Asli Daerah	100.000.000,00	96.262.055,00	(3.737.945,00)	96,26 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	100.000.000,00	96.262.055,00	(3.737.945,00)	96,26 %
BELANJA DINAS PARIWISATA	38.057.815.304,00	35.428.298.604,00	(2.629.516.700,00)	93,09 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.592.490.875,00	3.520.007.987,00	(72.482.888,00)	97,98 %
Belanja Pegawai	3.592.490.875,00	3.520.007.987,00	(72.482.888,00)	97,98 %
BELANJA LANGSUNG	34.465.324.429,00	31.908.290.617,00	(2.557.033.812,00)	92,58 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.475.455.679,00	1.443.548.860,00	(31.906.819,00)	97,84 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	620.130.000,00	601.069.500,00	(19.060.500,00)	96,93 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	114.970.000,00	113.358.548,00	(1.611.452,00)	98,60 %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.546.201.500,00	3.313.587.084,00	(232.614.416,00)	93,44 %
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	24.779.277.500,00	22.636.953.450,00	(2.142.324.050,00)	91,35 %
Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	3.198.147.250,00	3.079.984.675,00	(118.162.575,00)	96,31 %
Program Pengembangan Industri Pariwisata	731.142.500,00	719.788.500,00	(11.354.000,00)	98,45 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN				
PERTANIAN				
DINAS PERTANIAN				
PENDAPATAN	1.139.120.000,00	1.700.159.424,00	561.039.424,00	149,25 %
Pendapatan Asli Daerah	1.139.120.000,00	1.700.159.424,00	561.039.424,00	149,25 %
Hasil Retribusi Daerah	1.139.120.000,00	1.606.895.569,00	467.775.569,00	141,06 %
Lain-Lain PAD Yang Sah		93.263.855,00	93.263.855,00	#DIV/0!
BELANJA	88.410.615.566,00	79.912.220.974,14	(8.498.394.591,86)	90,39 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.453.163.694,00	19.014.811.363,00	(438.352.331,00)	97,75 %
Belanja Pegawai	19.453.163.694,00	19.014.811.363,00	(438.352.331,00)	97,75 %
BELANJA LANGSUNG	68.957.451.872,00	60.897.409.611,14	(8.060.042.260,86)	88,31 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.022.730.848,00	2.775.153.030,00	(247.577.818,00)	91,81 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.013.259.250,00	3.715.406.299,00	(297.852.951,00)	92,58 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	194.995.500,00	190.118.250,00	(4.877.250,00)	97,50 %
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	51.321.561.269,00	44.511.587.821,14	(6.809.973.447,86)	86,73 %
Program Peningkatan Produksi Hortikultura	3.263.598.750,00	2.866.875.860,00	(396.722.890,00)	87,84 %
Program Peningkatan Populasi Peternakan	754.697.000,00	739.297.125,00	(15.399.875,00)	97,96 %
Program Pengembangan Pembibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan	4.038.670.000,00	3.882.084.447,00	(156.585.553,00)	96,12 %
Program Pengembangan Perbenihan	1.450.255.015,00	1.343.131.627,00	(107.123.388,00)	92,61 %
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	456.068.590,00	438.332.200,00	(17.736.390,00)	96,11 %
Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih	170.944.450,00	170.818.252,00	(126.198,00)	99,93 %
Program Perlindungan Tanaman Pertanian	270.671.200,00	264.604.700,00	(6.066.500,00)	97,76 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN				
PERTANIAN DAN KEHUTANAN				
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN				
PENDAPATAN DISHUTBUN	13.486.704.053,00	13.964.735.114,00	478.031.061,00	103,54 %
Pendapatan Asli Daerah	13.486.704.053,00	13.964.735.114,00	478.031.061,00	103,54 %
Hasil Retribusi Daerah	11.370.402.803,00	11.683.653.614,00	313.250.811,00	102,75 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.116.301.250,00	2.281.081.500,00	164.780.250,00	107,79 %
BELANJA DISHUTBUN	41.256.336.183,24	39.535.833.115,00	(1.720.503.068,24)	95,83 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.671.801.204,00	21.276.076.977,00	(395.724.227,00)	98,17 %
Belanja Pegawai	21.671.801.204,00	21.276.076.977,00	(395.724.227,00)	98,17 %
BELANJA LANGSUNG	19.584.534.979,24	18.259.756.138,00	(1.324.778.841,24)	93,24 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.343.077.400,00	3.112.121.666,00	(230.955.734,00)	93,09 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.423.327.002,24	2.152.913.011,00	(270.413.991,24)	88,84 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	210.350.000,00	162.906.830,00	(47.443.170,00)	77,45 %
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	2.591.530.000,00	2.478.159.390,00	(113.370.610,00)	95,63 %
Program Rehabilitasi Hutan dan Perlindungan	4.459.617.000,00	4.245.867.330,00	(213.749.670,00)	95,21 %
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	658.485.000,00	638.199.000,00	(20.286.000,00)	96,92 %
Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan	5.898.148.577,00	5.469.588.911,00	(428.559.666,00)	92,73 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN				
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
PENDAPATAN	162.500.000,00	193.395.496,00	30.895.496,00	119,01 %
Pendapatan Asli Daerah	162.500.000,00	193.395.496,00	30.895.496,00	119,01 %
Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	173.395.496,00	23.395.496,00	115,60 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.500.000,00	20.000.000,00	7.500.000,00	160,00 %
BELANJA	21.186.947.323,00	19.589.715.345,00	(1.597.231.978,00)	92,46 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.540.394.323,00	7.730.664.336,00	(809.729.987,00)	90,52 %
Belanja Pegawai	8.540.394.323,00	7.730.664.336,00	(809.729.987,00)	90,52 %
BELANJA LANGSUNG	12.646.553.000,00	11.859.051.009,00	(787.501.991,00)	93,77 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.919.968.650,00	1.718.145.573,00	(201.823.077,00)	89,49 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	515.767.000,00	504.866.872,00	(10.900.128,00)	97,89 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	239.019.000,00	218.470.059,00	(20.548.941,00)	91,40 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	2.103.254.850,00	2.001.525.475,00	(101.729.375,00)	95,16 %
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	2.311.505.000,00	2.152.009.800,00	(159.495.200,00)	93,10 %
Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	664.788.500,00	602.420.892,00	(62.367.608,00)	90,62 %
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	903.000.000,00	876.864.138,00	(26.135.862,00)	97,11 %
Program Pembinaan Industri Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	3.690.325.000,00	3.489.031.000,00	(201.294.000,00)	94,55 %
Program Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika	298.925.000,00	295.717.200,00	(3.207.800,00)	98,93 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				
BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	3.053.143.646,00	3.053.143.646,00	-	100,00 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.053.143.646,00	3.053.143.646,00	-	100,00 %
Belanja Pegawai	3.053.143.646,00	3.053.143.646,00	-	100,00 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
SEKRETARIAT DAERAH				
PENDAPATAN	316.700.000,00	316.700.000,00	-	100,00 %
Pendapatan Asli Daerah	316.700.000,00	316.700.000,00	-	100,00 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	316.700.000,00	316.700.000,00	-	100,00 %
BELANJA SETDA	86.011.880.523,50	81.155.476.754,00	(4.856.403.769,50)	94,35 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.740.408.241,00	21.601.129.393,00	(139.278.848,00)	99,36 %
Belanja Pegawai	21.740.408.241,00	21.601.129.393,00	(139.278.848,00)	99,36 %
BELANJA LANGSUNG	64.271.472.282,50	59.554.347.361,00	(4.717.124.921,50)	92,66 %
Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.224.960.639,00	2.156.612.123,00	(68.348.516,00)	96,93 %
Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	458.222.100,00	456.606.150,00	(1.615.950,00)	99,65 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	740.204.000,00	654.214.800,00	(85.989.200,00)	88,38 %
Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.722.860.000,00	3.441.474.718,00	(281.385.282,00)	92,44 %
Program Penyusunan Kebijakan Urusan Keistimewaan	2.782.232.500,00	2.556.522.014,00	(225.710.486,00)	91,89 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Keistimewaan	1.909.373.500,00	1.900.175.660,00	(9.197.840,00)	99,52 %
Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	3.230.037.000,00	2.619.450.693,00	(610.586.307,00)	81,10 %
Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	1.460.293.000,00	1.345.348.650,00	(114.944.350,00)	92,13 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.097.250.978,00	8.156.894.190,00	(940.356.788,00)	89,66 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.528.254.500,00	4.306.442.124,00	(221.812.376,00)	95,10 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	640.621.519,50	618.809.350,00	(21.812.169,50)	96,60 %
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.082.295.400,00	1.081.801.175,00	(494.225,00)	99,95 %
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	299.095.000,00	292.157.264,00	(6.937.736,00)	97,68 %
Program Bantuan dan Layanan Hukum	2.419.362.296,00	2.264.323.676,00	(155.038.620,00)	93,59 %
Program Pengawasan Produk Hukum	621.053.800,00	617.178.105,00	(3.875.695,00)	99,38 %
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.332.290.750,00	2.757.525.067,00	(574.765.683,00)	82,75 %
Program Pelayanan Kerumahtanggaan	5.581.686.850,00	5.398.683.393,00	(183.003.457,00)	96,72 %
Program Pelayanan Keprotokolan	2.587.090.000,00	2.465.499.708,00	(121.590.292,00)	95,30 %
Program Dokumentasi Hukum	572.421.550,00	551.842.586,00	(20.578.964,00)	96,40 %
Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	968.930.500,00	863.241.100,00	(105.689.400,00)	89,09 %
Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	890.035.000,00	881.058.800,00	(8.976.200,00)	98,99 %
Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	618.031.500,00	586.624.300,00	(31.407.200,00)	94,92 %
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Stadarisasi	1.104.497.400,00	964.756.262,00	(139.741.138,00)	87,35 %
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.460.275.800,00	1.362.869.325,00	(97.406.475,00)	93,33 %
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Daerah Perekonomian	195.659.500,00	195.549.212,00	(110.288,00)	99,94 %
Program Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	353.579.400,00	349.522.500,00	(4.056.900,00)	98,85 %
Program Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Daerah	1.399.432.600,00	1.305.527.487,00	(93.905.113,00)	93,29 %
Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	488.757.000,00	486.461.700,00	(2.295.300,00)	99,53 %
Program Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	150.464.500,00	143.848.729,00	(6.615.771,00)	95,60 %
Program Pengelolaan Kebijakan Sumber Daya Manusia	518.595.000,00	465.956.898,00	(52.638.102,00)	89,85 %
Program Pengelolaan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	129.935.200,00	123.999.211,00	(5.935.989,00)	95,43 %
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Daerah	8.097.766.500,00	7.599.251.841,00	(498.514.659,00)	93,84 %
Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	205.907.000,00	200.425.000,00	(5.482.000,00)	97,34 %
Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	200.000.000,00	194.109.100,00	(5.890.900,00)	97,05 %
Program Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	200.000.000,00	189.584.450,00	(10.415.550,00)	94,79 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT PARAMPARAJA				
BELANJA	1.035.656.548,00	1.020.043.491,00	(14.066.274,00)	98,49 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	734.552.448,00	720.486.174,00	(14.066.274,00)	98,09 %
Belanja Pegawai	734.552.448,00	720.486.174,00	(14.066.274,00)	98,09 %
BELANJA LANGSUNG	301.104.100,00	299.557.317,00	(1.546.783,00)	99,49 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.456.600,00	166.023.819,00	(1.432.781,00)	99,14 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.075.000,00	90.013.598,00	(61.402,00)	99,93 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.572.500,00	43.519.900,00	(52.600,00)	99,88 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
KANTOR PERWAKILAN DAERAH				
PENDAPATAN KAPERDA	450.000.000,00	527.605.000,00	77.605.000,00	117,25 %
Pendapatan Asli Daerah	450.000.000,00	527.605.000,00	77.605.000,00	117,25 %
Hasil Retribusi Daerah	450.000.000,00	527.605.000,00	77.605.000,00	117,25 %
BELANJA	5.592.979.367,00	5.421.101.997,00	(171.877.370,00)	96,93 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.038.447.667,00	1.027.587.388,00	(10.860.279,00)	98,95 %
Belanja Pegawai	1.038.447.667,00	1.027.587.388,00	(10.860.279,00)	98,95 %
BELANJA LANGSUNG	4.554.531.700,00	4.393.514.609,00	(161.017.091,00)	96,46 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.076.976.150,00	1.985.452.677,00	(91.523.473,00)	95,59 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	875.088.750,00	833.171.994,00	(41.916.756,00)	95,21 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.660.000,00	110.660.000,00	-	100,00 %
Program Peningkatan Fasilitas Layanan Kantor Perwakilan Daerah	593.406.800,00	571.792.120,00	(21.614.680,00)	96,36 %
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dan Seni Budaya Daerah	898.400.000,00	892.437.818,00	(5.962.182,00)	99,34 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
BELANJA DPRD	38.066.735.000,00	35.622.840.762,00	(2.443.894.238,00)	93,58 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.066.735.000,00	35.622.840.762,00	(2.443.894.238,00)	93,58 %
Belanja Pegawai	38.066.735.000,00	35.622.840.762,00	(2.443.894.238,00)	93,58 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DPRD				
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	84.322.786.954,00	66.716.997.580,00	(17.605.789.374,00)	79,12 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.826.084.254,00	4.759.143.704,00	(66.940.550,00)	98,61 %
Belanja Pegawai	4.826.084.254,00	4.759.143.704,00	(66.940.550,00)	98,61 %
BELANJA LANGSUNG	79.496.702.700,00	61.957.853.876,00	(17.538.848.824,00)	77,94 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.952.678.900,00	3.396.794.512,00	(555.884.388,00)	85,94 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.889.729.000,00	2.397.273.420,00	(492.455.580,00)	82,96 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	259.756.600,00	246.325.223,00	(13.431.377,00)	94,83 %
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	40.471.003.100,00	28.362.170.953,00	(12.108.832.147,00)	70,08 %
Program Pelayanan Kerumahtanggaan	3.402.115.000,00	3.071.492.700,00	(330.622.300,00)	90,28 %
Program Pengembangan Regulasi Daerah	7.987.753.800,00	6.879.051.156,00	(1.108.702.644,00)	86,12 %
Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	20.533.666.300,00	17.604.745.912,00	(2.928.920.388,00)	85,74 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT				
BELANJA INSPEKTORAT	15.169.897.791,00	14.456.093.419,00	(713.804.372,00)	95,29 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.316.937.224,00	5.215.257.243,00	(101.679.981,00)	98,09 %
Belanja Pegawai	5.316.937.224,00	5.215.257.243,00	(101.679.981,00)	98,09 %
BELANJA LANGSUNG	9.852.960.567,00	9.240.836.176,00	(612.124.391,00)	93,79 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.668.643.567,00	1.456.228.705,00	(212.414.862,00)	87,27 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	805.407.750,00	630.053.440,00	(175.354.310,00)	78,23 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	91.405.000,00	81.853.933,00	(9.551.067,00)	89,55 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55.910.000,00	55.209.500,00	(700.500,00)	98,75 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	7.231.594.250,00	7.017.490.598,00	(214.103.652,00)	97,04 %
URUSAN KONKUREN WAJIB				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA	22.301.442.364,50	20.703.856.331,00	(1.597.586.033,50)	92,84 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.544.977.745,00	6.418.915.813,00	(126.061.932,00)	98,07 %
Belanja Pegawai	6.544.977.745,00	6.418.915.813,00	(126.061.932,00)	98,07 %
BELANJA LANGSUNG	15.756.464.619,50	14.284.940.518,00	(1.471.524.101,50)	90,66 %
Program Pengembangan Statistik Daerah	1.261.752.900,00	1.206.633.489,00	(55.119.411,00)	95,63 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.022.659.850,00	1.800.512.897,00	(222.146.953,00)	89,02 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.011.010.350,00	758.589.675,00	(252.420.675,00)	75,03 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	527.389.019,50	440.038.670,00	(87.350.349,50)	83,44 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.932.091.300,00	3.433.857.861,00	(498.233.439,00)	87,33 %
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	825.104.000,00	770.003.140,00	(55.100.860,00)	93,32 %
Program Perencanaan Sosial Budaya	1.690.316.500,00	1.630.793.961,00	(59.522.539,00)	96,48 %
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	1.404.762.850,00	1.320.405.250,00	(84.357.600,00)	93,99 %
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	915.482.650,00	855.850.930,00	(59.631.720,00)	93,49 %
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	2.165.895.200,00	2.068.254.645,00	(97.640.555,00)	95,49 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN				
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET				
PENDAPATAN DPPKA	1.828.036.366.283,71	1.934.918.131.183,06	106.881.764.899,35	105,85 %
Pajak Daerah	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	59.832.031.253,00	103,61 %
Hasil Retribusi Daerah	6.607.252.095,00	6.991.961.130,00	384.709.035,00	105,82 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.897.784.674,86	85.097.737.606,37	(800.047.068,49)	99,07 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	78.071.642.328,85	125.536.714.008,69	47.465.071.679,84	160,80 %
BELANJA DPPKA	143.800.071.600,00	131.352.709.134,00	(12.447.362.466,00)	91,34 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	89.963.980.325,00	82.334.769.253,00	(7.629.211.072,00)	91,52 %
Belanja Pegawai	89.963.980.325,00	82.334.769.253,00	(7.629.211.072,00)	91,52 %
BELANJA LANGSUNG	53.836.091.275,00	49.017.939.881,00	(4.818.151.394,00)	91,05 %
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.207.623.805,00	8.179.342.688,00	(1.028.281.117,00)	88,83 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.364.040.220,00	16.832.523.688,00	(2.531.516.532,00)	86,93 %
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	338.386.500,00	332.941.000,00	(5.445.500,00)	98,39 %
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.952.561.500,00	2.687.567.510,00	(264.993.990,00)	91,02 %
Program Penganggaran Belanja Daerah	3.811.517.700,00	3.643.685.640,00	(167.832.060,00)	95,60 %
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2.087.429.250,00	2.030.314.922,00	(57.114.328,00)	97,26 %
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	907.768.375,00	884.223.649,00	(23.544.726,00)	97,41 %
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.736.523.200,00	1.663.275.494,00	(73.247.706,00)	95,78 %
Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta	1.767.120.000,00	1.742.005.750,00	(25.114.250,00)	98,58 %
Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Bantul	2.314.078.000,00	2.093.021.212,00	(221.056.788,00)	90,45 %
Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Kulon Progo	1.260.442.000,00	1.220.633.600,00	(39.808.400,00)	96,84 %
Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Gunungkidul	1.167.918.000,00	1.144.162.150,00	(23.755.850,00)	97,97 %
Program Peningkatan Pendapatan KPPD Kabupaten Sleman	2.181.322.000,00	2.091.133.700,00	(90.188.300,00)	95,87 %
Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah	4.739.360.725,00	4.473.108.878,00	(266.251.847,00)	94,38 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN				
PPKD/BUD				
PENDAPATAN	3.467.995.065.439,00	3.402.455.795.982,00	(65.539.269.457,00)	98,11 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang	
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Perimbangan	2.376.710.501.213,00	2.317.436.811.403,00	(59.273.689.810,00)	97,51 %
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.091.284.564.226,00	1.085.018.984.579,00	(6.265.579.647,00)	99,43 %
BELANJA	1.450.331.861.409,09	1.359.867.783.041,38	(90.464.078.367,71)	93,76 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.450.331.861.409,09	1.359.867.783.041,38	(90.464.078.367,71)	93,76 %
Belanja Hibah	637.041.930.000,00	587.035.545.684,00	(50.006.384.316,00)	92,15 %
Belanja Bantuan Sosial	850.000.000,00	450.000.000,00	(400.000.000,00)	52,94 %
Belanja Bagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	692.463.991.157,38	692.463.991.157,38	-	100,00 %
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des	84.058.646.200,00	79.918.246.200,00	(4.140.400.000,00)	95,07 %
Belanja Tak Terduga	35.917.294.051,71	-	(35.917.294.051,71)	-
Pembiayaan Netto	322.066.436.138,18	325.018.633.070,18	2.952.196.932,00	100,92 %
Penerimaan Pembiayaan	344.066.436.138	347.018.633.070	2.952.196.932,00	100,86 %
Pengeluaran Pembiayaan	22.000.000.000	22.000.000.000	-	100,00 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
PENDAPATAN	1.494.400.000,00	1.367.050.000,00	(127.350.000,00)	91,48 %
Hasil Retribusi Daerah	1.494.400.000,00	1.364.800.000,00	(129.600.000,00)	91,33 %
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	2.250.000,00	2.250.000,00	-
BELANJA	199.636.247.722,00	198.773.608.911,00	(862.638.811,00)	99,57 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	182.933.780.912,00	182.703.042.964,00	(230.737.948,00)	99,87 %
Belanja Pegawai	182.933.780.912,00	182.703.042.964,00	(230.737.948,00)	99,87 %
BELANJA LANGSUNG	16.702.466.810,00	16.070.565.947,00	(631.900.863,00)	96,22 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.109.683.475,00	2.012.826.132,00	(96.857.343,00)	95,41 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.222.994.400,00	1.211.444.710,00	(11.549.690,00)	99,06 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	217.492.525,00	215.058.879,00	(2.433.646,00)	98,88 %
Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	2.840.390.600,00	2.577.264.202,00	(263.126.398,00)	90,74 %
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pembinaan Karir Pegawai	5.794.493.010,00	5.695.524.432,00	(98.968.578,00)	98,29 %
Program Pembinaan dan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	1.947.118.200,00	1.900.058.737,00	(47.059.463,00)	97,58 %
Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah	124.230.000,00	122.413.984,00	(1.816.016,00)	98,54 %
Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai	2.446.064.600,00	2.335.974.871,00	(110.089.729,00)	95,50 %
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN				
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
PENDAPATAN BANDIKLAT	7.256.150.000,00	7.291.725.000,00	35.575.000,00	100,49 %
Pendapatan Asli Daerah	7.256.150.000,00	7.291.725.000,00	35.575.000,00	100,49 %
Hasil Retribusi Daerah	7.256.150.000,00	7.291.725.000,00	35.575.000,00	100,49 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	690.375.000,00	690.575.000,00	200.000,00	100,03 %
BELANJA	20.722.819.402,00	19.356.040.338,00	(1.366.779.064,00)	93,40 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.453.053.277,00	4.355.889.342,00	(97.163.935,00)	97,82 %
Belanja Pegawai	4.453.053.277,00	4.355.889.342,00	(97.163.935,00)	97,82 %
BELANJA LANGSUNG	16.269.766.125,00	15.000.150.996,00	(1.269.615.129,00)	92,20 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.027.658.250,00	1.998.596.507,00	(29.061.743,00)	98,57 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.251.737.250,00	3.005.104.175,00	(246.633.075,00)	92,42 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	340.985.925,00	336.789.090,00	(4.196.835,00)	98,77 %
Program Pendidikan Penjenjangan	6.285.339.000,00	5.862.860.194,00	(422.478.806,00)	93,28 %
Program Pendidikan Teknis Fungsional	3.252.492.700,00	2.701.415.180,00	(551.077.520,00)	83,06 %
Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	197.900.000,00	195.959.500,00	(1.940.500,00)	99,02 %
Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	913.653.000,00	899.426.350,00	(14.226.650,00)	98,44 %



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tegen Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening KasDaerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	<ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/ataub. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atauc. Wajib pajak kooperatif, dan/ataud. Wajib pajak likuid, dan/ataue. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/ataub. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atauc. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/ataud. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	<ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/ataub. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atauc. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/ataud. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	<ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/ataub. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atauc. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/ataud. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/ataue. Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	<ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/ataub. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
--------	---



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:

- a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja
 - f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
 - g) Belanja Barang Dana BOS
 - h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
 - j) Belanja Hibah Barang/Jasa
 - k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
- 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
- 5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
- 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
- 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

j. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.

18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.

19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:

- a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
- c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
- Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
 - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya persiapan tempat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
 - c) Biaya pemasangan.
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
- a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
- h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
- i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
 - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
 - h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
- a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
 - d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
 - e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjampakaikan.
 - f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
 - g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tersebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan franchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi software, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
 - b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
 - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
 - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
 - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
 - c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
 - d) *Software* diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
 - f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- 7) **Pengukuran Aset Tak Berwujud**
- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
 - d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
 - e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
 - f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.
- 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) **Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas**
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.
Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
 - b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
 - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) **Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan**

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - b) **Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan**
 - Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan.

Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
- c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
- a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5. 1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	2018 (Audited)	2017 (Audited)
5. 1. 1. <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp5.443.179.144.512,93</u>	<u>Rp5.085.241.219.288,27</u>

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp5.393.544.092.997,71realisasi sebesar Rp5.443.179.144.512,93 atau 100,92%. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp357.937.925.224,66 atau 7,04% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp5.085.241.219.288,27 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah</u>	<u>Rp2.040.723.348.530,93</u>	<u>Rp1.851.973.396.065,27</u>
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 sebesar Rp1.925.549.027.558,71 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp2.040.723.348.530,93 atau 105,98%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp188.749.952.465,66 atau 10,19% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.851.973.396.065,27. dengan rincian sebagai berikut:

a. <u>Pajak Daerah</u>	<u>Rp1.717.291.718.438,00</u>	<u>Rp1.583.875.063.883,00</u>
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.657.459.687.185,00 dan realisasi sebesar Rp1.717.291.718.438,00 atau 103,61%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp133.416.654.555,00 atau 8,42% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.583.875.063.883,00. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah				
a.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	725.000.000.000,00	750.872.115.115,00	103,57	676.181.543.500,00
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	474.000.000.000,00	498.264.771.600,00	105,12	460.314.185.500,00
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	256.000.000.000,00	265.535.612.694,00	103,72	239.782.907.643,00
d.	Pajak Air Permukaan	354.000.000,00	513.531.844,00	145,07	405.193.888,00
e.	Pajak Rokok	202.105.687.185,00	202.105.687.185,00	100,00	207.191.233.352,00
	Jumlah	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	103,61	1.583.875.063.883,00

b. <u>Retribusi Daerah</u>	<u>Rp43.625.223.035,16</u>	<u>Rp41.432.293.725,53</u>
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp40.772.681.398,00 dan realisasi sebesar Rp43.625.223.035,16 atau 107,00%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.192.929.309,63 atau 5,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 sebesar Rp41.432.293.725,53. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah**

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
2	Hasil Retribusi Daerah				
a.	Retribusi Jasa Umum	12.669.646.000,00	13.103.746.066,16	103,43	14.596.927.391,53
b.	Retribusi Jasa Usaha	27.435.237.998,00	30.136.708.969,00	109,85	26.167.568.934,00
c.	Retribusi Perijinan Tertentu	667.797.400,00	384.768.000,00	57,62	667.797.400,00
	Jumlah	40.772.681.398,00	43.625.223.035,16	107,00	41.432.293.725,53

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp12.669.646.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.103.746.066,16 atau 103,43% terdiri dari Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Persampahan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum**

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.719.600.000,00	8.617.800.000,00	98,83	6.803.288.400,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	3.749.312.800,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.950.046.000,00	4.485.946.066,16	113,57	4.044.326.191,53
	Jumlah	12.669.646.000,00	13.103.746.066,16	103,43	14.596.927.391,53

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp8.719.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.617.800.000,00 atau 98,83%. Meskipun Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2018 tidak mencapai target tetapi mengalami kenaikan sebesar Rp1.814.511.600,00 atau 26,67% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp6.803.288.400,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KPA Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja) sebesar Rp396.000.000,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp403.200.000,00.
- 2) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp6.857.000.000,00 atau 100,51% dari anggaran sebesar Rp6.822.000.000,00.
- 3) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.364.800.000,00 atau 91,33% dari anggaran sebesar Rp1.494.400.000,00. Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Kepegawaian Daerah tidak mencapai target karena terdapat pembatalan dari mitra yang telah mengajukan permohonan kerja sama pengukuran kompetensi.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2018 sudah tidak dianggarkan lagi karena KPA Balai Laboratorium Kesehatan mulai Tahun 2018 telah ditetapkan sebagai unit kerja BLUD sehingga pendapatan pada KPA Balai Laboratorium Kesehatan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp3.950.046.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.485.946.066,16 atau 113,57% merupakan pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (KPA Balai PISAM). Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp441.619.874,63 atau 10,92% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.044.326.191,53.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp27.435.237.998,00 dan realisasi sebesar Rp30.136.708.969,00 atau 109,85% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.504.011.245,00	14.418.069.299,00	115,31	13.043.091.897,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	92.630.000,00	100.408.000,00	108,40	79.600.000,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	690.670.000,00	708.205.000,00	102,54	698.115.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	27.275.000,00	31.580.000,00	115,78	34.913.500,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	189.000.000,00	235.730.500,00	124,73	242.551.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	13.931.651.753,00	14.642.716.170,00	105,10	12.069.297.537,00
	Jumlah	27.435.237.998,00	30.136.708.969,00	109,85	26.167.568.934,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp12.504.011.245,00 dan realisasi sebesar Rp14.418.069.299,00 atau 115,31%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.977.402,00 atau 10,54% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.043.091.897,00.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp14.418.069.299,00 berada pada beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.639.131.410,00 atau 148,30% dari anggaran sebesar Rp1.105.250.000,00.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.225.750.350,00 atau 106,46% dari anggaran sebesar Rp1.151.365.150,00.
- 3) Dinas Sosial sebesar Rp672.000.000,00 atau 100% dari anggaran.
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.062.923.000,00 atau 228,29% dari anggaran sebesar Rp465.610.000,00.
- 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.459.200.000,00 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp1.531.200.000,00.
- 6) Dinas Kebudayaan sebesar Rp249.000.000,00 atau 133,51% dari anggaran sebesar Rp186.500.000,00.
- 7) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp401.113.900,00 atau 178,27% dari anggaran sebesar Rp225.000.000,00.
- 8) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp20.990.000,00 atau 116,06% dari anggaran sebesar Rp18.085.000,00.
- 9) Dinas Pertanian sebesar Rp83.825.569,00 atau 265,31% dari anggaran sebesar Rp31.595.000,00.
- 10) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp149.856.940,00 atau 136,69% dari anggaran sebesar Rp109.634.000,00.
- 11) Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp128.000.000,00 atau 216,95% dari anggaran sebesar Rp59.000.000,00.
- 12) DPPKA sebesar Rp6.891.553.130,00 atau 105,79% dari anggaran sebesar Rp6.514.622.095,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

13) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp434.725.000,00 atau 100,13% dari anggaran sebesar Rp434.150.000,00.

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda DIY. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp92.630.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.408.000,00% pada DPPKA. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp20.808.000,00 atau 26,14% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp79.600.000,00. Rincian penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp100.408.000,00 meliputi penerimaan retribusi dari tempat penitipan kendaraan bermotor pada KPPD Kota Yogyakarta sebesar Rp25.000.000,00, KPPD Kabupaten Bantul sebesar Rp23.600.000,00, KPPD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp15.498.000,00, KPPD Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp13.310.000,00 dan KPPD Kabupaten Sleman sebesar Rp23.000.000,00.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp690.670.000,00 dan realisasi sebesar Rp708.205.000,00 atau 102,54%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.090.000,00 atau 1,45% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp698.115.000,00. Rincian penerimaan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp708.205.000,00 terdiri dari beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp68.150.000,00 atau 121,59% dari anggaran sebesar Rp56.050.000,00.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp238.350.000,00 atau 98,65% dari anggaran sebesar Rp241.620.000,00.
- 3) Kantor Perwakilan Daerah sebesar Rp399.605.000,00 atau 102,20% dari anggaran sebesar Rp391.000.000,00.
- 4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp2.100.000,00 atau 105% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp27.275.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.580.000,00 atau 115,78% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KPA Pelabuhan Perikanan Pantai. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.333.500,00 atau 9,55% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp34.913.500,00.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp189.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp235.730.500,00 atau 124,73% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan KPA Museum Sonobudoyo. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp6.820.500,00 atau 2,81% dibandingkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp242.551.000,00.

Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp13.931.651.753,00 dan realisasi sebesar Rp14.642.716.170,00 atau 105,10% pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp6.135.000,00 atau 64,92% dari anggaran sebesar Rp9.450.000,00.
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp173.395.496,00 atau 115,60% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.
- 3) Dinas Pertanian sebesar Rp1.523.070.000,00 atau 137,52% dari anggaran sebesar Rp1.107.525.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp11.531.696.674,00 atau 102,42% dari anggaran sebesar Rp11.258.768.803,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut merupakan hasil penjualan minyak kayu putih.
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.408.419.000,00 atau 100,18% dari anggaran sebesar Rp1.405.907.950,00.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp667.797.400,00 dan realisasi sebesar Rp384.768.000,00 atau 57,62% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek	63.484.600,00	62.964.000,00	99,18	63.484.600,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	600.000,00	-	-
3	Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing)	604.312.800,00	321.204.000,00	53,15	604.312.800,00
	Jumlah	667.797.400,00	384.768.000,00	57,62	667.797.400,00

Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp63.484.600,00 dan realisasi sebesar Rp62.964.000,00 atau 99,18%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2018 tidak mencapai target karena adanya perubahan peraturan bahwa penerbitan izin insidentil bagi angkutan umum dalam trayek yang semula boleh dilakukan oleh perorangan menjadi wajib berbadan hukum.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp600.000,00.
- 3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp604.312.800,00 dan realisasi sebesar Rp321.204.000,00 atau 53,15%. Realisasi Perpanjangan IMTA Tahun 2018 tidak mencapai target karena sebanyak 6 (enam) tenaga kerja asing tidak mengajukan perpanjangan IMTA karena perusahaan sudah mampu melakukan alih keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja Indonesia dan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengatur bahwa WNA Pemegang Saham yang bekerja sebagai Direksi atau Dewan Komisaris tidak wajib memiliki izin.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp85.097.737.606,37** **Rp71.411.759.885,57**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp85.897.784.674,86 dan realisasi sebesar Rp85.097.737.606,37 atau 99,07% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp13.685.977.720,80 atau 19,16% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp71.411.759.885,57. dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
a.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	81.091.032.278,00	80.291.032.277,80	99,01	67.834.036.446,70
b.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	214.865.140,00	214.865.140,00	100,00	231.768.123,00
c.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank	4.591.887.256,86	4.591.840.188,57	100,00	3.345.955.315,87
	Jumlah	85.897.784.674,86	85.097.737.606,37	99,07	71.411.759.885,57

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp81.091.032.278,00 dan realisasi sebesar Rp80.291.032.277,80 atau 99,01%. Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp12.456.995.831,10 atau 18,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp67.834.036.446,70. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp80.291.032.277,80 meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	800.000.000,00		-	1.015.510.000,00
2	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	79.201.315.078,00	79.201.315.077,80	100,00	66.132.661.551,70
3	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)	1.089.717.200,00	1.089.717.200,00	100,00	685.864.895,00
	Jumlah	81.091.032.278,00	80.291.032.277,80	99,01	67.834.036.446,70

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 karena PT. Tarumartani terlambat menyetorkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yaitu baru disetorkan pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp800.000.000,00.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp214.865.140,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.591.887.256,86 dan realisasi sebesar Rp4.591.840.188,57 atau 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.591.840.188,57 mengalami kenaikan sebesar Rp1.245.884.872,70 atau 37,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.345.955.315,87.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp194.708.669.451,40 Rp155.254.278.571,17

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp141.418.874.300,85 dan realisasi sebesar Rp194.708.669.451,40 atau 137,68%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp39.454.390.880,23 atau 25,41% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2017 sebesar Rp155.254.278.571,17. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.871.575.253,00	1.959.302.600,00	104,69	1.354.906.426,00
b.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	14.958.447,00	548.007.447,00	3.663,53	163.468.000,00
c.	Penerimaan Jasa Giro	11.000.000.000,00	12.974.277.154,00	117,95	10.655.890.362,00
d.	Pendapatan Bunga	20.128.124.200,00	31.006.085.967,84	154,04	28.187.386.914,27
e.	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	6.660.000,00	15.260.000,00	229,13	76.250.000,00
f.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	438.595.654,47	-	279.294.322,10
g.	Pendapatan Denda Pajak	42.038.154.450,00	62.117.042.060,00	147,76	53.150.113.250,00
h.	Pendapatan Denda Retribusi	2.330.450,00	29.172.830,00	1.251,81	119.670.800,00
i.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	71.190.000,00	-	43.000.000,00
j.	Pendapatan dari Pengembalian	835.211.654,00	1.062.611.141,00	127,23	427.488.788,00
k.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	690.375.000,00	690.575.000,00	100,03	791.500.000,00
l.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	923.986.250,00	1.278.730.827,00		749.263.142,00
m.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			-	
n.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	38.188.097.275,00	41.989.877.800,19	109,96	34.719.419.571,56
o.	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	25.719.401.321,85	40.527.940.969,90	157,58	24.536.626.995,24
	Jumlah	141.418.874.300,85	194.708.669.451,40	137,68	155.254.278.571,17

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp1.871.575.253,00 dan realisasi sebesar Rp1.959.302.600,00 atau 104,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	971.575.253,00	1.194.652.600,00	122,96
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	900.000.000,00	764.650.000,00	84,96
	Jumlah	1.871.575.253,00	1.959.302.600,00	104,69

Penjelasan:

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp971.575.253,00 dan realisasi sebesar Rp1.194.652.600,00 atau 122,96% dari target, merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp764.650.000,00 atau 84,96% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh DPPKA.

Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp14.958.447,00 dan realisasi sebesar Rp548.007.447,00 atau 3.663,53% merupakan hasil Penjualan Alat Tepat Guna sebesar Rp20.000.000,00, Penjualan Produksi dari SMK sebesar Rp2.458.447,00 dan Penjualan/Lelang Hewan Ternak sebesar Rp525.549.000,00.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp12.974.277.154,00 atau 117,95% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp12.355.554.097,00 dan jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp618.723.057,00.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp20.128.124.00,00 realisasi sebesar Rp31.006.085.967,84 atau 154,04% meliputi Pendapatan bunga deposito sebesar Rp30.750.999.967,84 dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp255.086.000,00. Rincian Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp30.750.999.967,84 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank BPD sebesar Rp5.156.249.997,00.
- 2) Bank BNI sebesar Rp8.317.397.255,00.
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp477.328.767,12
- 4) Bank BTN sebesar Rp10.988.808.219,16.
- 5) Bank BRI sebesar Rp5.343.342.509,00.
- 6) Bank Mandiri Syariah sebesar Rp467.873.220,56

Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp6.660.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.260.000,00 atau 229,13% merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil kelalaian yang dilakukan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp438.595.654,47. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada DPPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp42.038.154.450,00 dan realisasi sebesar Rp62.117.042.060,00 atau 147,76%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp59.015.173.660,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.101.868.400,00. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp8.966.928.810,00 atau 16,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp53.150.113.250,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.330.450,00 dan realisasi sebesar Rp29.172.830,00 atau 1.251,81%. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada DPPKA sebesar Rp29.120.830,00 dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp52.000,00. Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp90.497.970,00 atau 75,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp119.670.800,00.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda Tahun 2018 tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp71.190.000,00 merupakan denda pelanggaran SPM pada Dinas Perhubungan sebesar Rp58.350.000,00 dan Denda Dana Bergulir pada DPPKA sebesar Rp12.840.000,00.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp835.211.654,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.062.611.141,00 atau 127,23%. Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- 1) Pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan sebesar Rp273.904.654,00.
- 2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp3.492.006,00.
- 3) Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp14.630.073,00.
- 4) Pengembalian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp770.584.408,00.

Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat

Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp690.375.000,00 dan realisasi sebesar Rp690.575.000,00 atau 100,03% dari target. Pendapatan tersebut merupakan penerimaan dari Diklat Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp923.986.250,00 dan realisasi sebesar Rp1.278.730.827,00 atau 138,39%. Pemanfaatan kekayaan daerah tersebut dalam bentuk sewa dengan rincian:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sewa Tanah dan Bangunan	18.301.250,00	24.801.250,00	135,52
2	Sewa Lahan	100.000.000,00	205.462.055,00	205,46
3	Pengelolaan Terminal	362.717.000,00	447.824.000,00	123,46
4.	Penggunaan Asrama	-	800.000,00	#DIV/0!
5	Penggunaan Aula	24.500.000,00	77.100.000,00	314,69
6	Sewa Tempat/Ruangan	58.431.000,00	122.654.522,00	209,91
7	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kompleks Kepatihan	316.700.000,00	316.700.000,00	100,00
8	Sewa Bangunan dan Sebagian Tanah Transfer Point	-	6.500.000,00	#DIV/0!
9	Sewa Bangunan Untuk Kantin	41.837.000,00	58.412.000,00	139,62
10	Sewa Bangunan Untuk Fotocopy	1.500.000,00	4.900.000,00	326,67
11	Sewa Bangunan Untuk Koperasi	-	5.500.000,00	#DIV/0!
12	Sewa Ruang Usaha Fotocopi dan Koperasi	-	5.900.000,00	#DIV/0!
13	Sewa Sebagian Tanah (Untuk Usaha Warung di Karang Duwet, Paliyan, Gunungkidul)	-	2.177.000,00	#DIV/0!
	Jumlah	923.986.250,00	1.278.730.827,00	138,39

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp38.188.097.275,00 dan realisasi sebesar Rp41.989.877.800,19 atau 109,96%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp7.270.458.228,63 atau 20,94% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2017 yaitu sebesar Rp34.719.419.571,56. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	RS. Ghrasia	20.000.000.000,00	19.890.307.466,84	99,45
2	RS Paru Respira	7.500.000.000,00	9.015.569.856,00	120,21
3	Balai Latihan Pendidikan dan Teknik	2.181.597.275,00	2.772.673.171,00	127,09
4.	Bapel Jamkesos	67.300.000,00	106.583.855,35	158,37
5	Balai Pelatihan Kesehatan	4.250.000.000,00	4.835.492.103,00	113,78
6	Balai Laboratorium Kesehatan	4.189.200.000,00	5.369.251.348,00	128,17
	Jumlah	38.188.097.275,00	41.989.877.800,19	109,96

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada RS Ghrasia dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.890.307.466,84 atau sebesar 99,45% dari anggaran, tidak mencapai target karena menurunnya jumlah pasien rawap inap.

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp25.719.401.321,85 dan direalisasikan sebesar Rp40.900.997.529,00 atau 159,03% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	7.694.566.321,85	21.477.980.577,38	279,13
2	PendapatanTiket Trans Jogja	18.000.000.000,00	19.304.361.952,52	107,25
3	Pengujian Air dan Air Limbah di Laborator	8.575.000,00	39.520.000,00	460,87
4	Sewa GOR Amongrogo	4.500.000,00	32.740.000,00	727,56
5	Sewa Youth Center	3.700.000,00	10.255.000,00	277,16
6	Sewa Mandala Krida	6.000.000,00	26.650.000,00	444,17
7	Sewa Halaman Parkir Stadion Mandala Kri	2.060.000,00	9.490.000,00	460,68
	Jumlah	25.719.401.321,85	40.900.997.529,90	159,03

Penjelasan:

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp7.694.566.321,85 dan direalisasikan sebesar Rp21.477.980.577,38 merupakan penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	420.122.731,46	420.360.921,46	100,06
2	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	2.098.000.000,00	2.260.603.250,00	107,75
3	Penjualan Air Curah	3.410.505.000,00	3.503.946.436,00	102,74
4	Tindak Lanjut Hasil Temuan	1.726.915.590,39	8.186.595.467,58	474,06
5	Surat Keterangan Asal Ikan	5.000.000,00	6.165.875,00	123,32
6	Pengujian Lab/Hi/AI Test	50.000,00	-	-
7	Padi Non Konsumsi	-	60.213.855,00	-
8	Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Baru	32.548.000,00	41.713.000,00	128,16
9	Sapi Potong Paksa	-	29.000.000,00	-
10	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor di Laboratorium	1.425.000,00	4.665.000,00	327,37
11	Lain-lain	-	6.591.660.212,34	-
	Jumlah	7.694.566.321,85	21.104.924.017,38	274,28

Berdasarkan tabel di atas Penerimaan Lain-lain direalisasikan sebesar Rp6.591.660.212,34 di dalamnya termasuk penerimaan pengembalian Pajak Rokok dari BPJS sebesar Rp5.906.320.018 dan sisanya sebesar Rp685.340.194,34 merupakan penerimaan pada rekening Kas Daerah yang tidak bisa diidentifikasi dengan jelas karena keterbatasan informasi pada bukti penyetorannya.

Pendapatan Tiket Trans Jogja dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.304.361.952,52 atau 107,25% merupakan penerimaan dari hasil penjualan tiket Trans Jogja yang dikelola oleh PT. Anindya Mitra Internasional dan disajikan sebagai pendapatan Dinas Perhubungan. Realisasi Pendapatan Tiket Trans Jogja Tahun 2018 sebesar Rp19.304.361.952,52 mengalami kenaikan sebesar Rp304.718.213,71 atau 1,6% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tiket Trans Jogja Tahun 2017 sebesar Rp18.999.643.738,81.

Pendapatan Pengujian Air dan Air Limbah di Laboratorium dianggarkan sebesar Rp8.575.000,00 dan realisasi sebesar Rp39.520.000,00 atau 460,87% merupakan penerimaan pendapatan pada Badan Lingkungan Hidup.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendapatan Sewa GOR Amongrogo dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp32.740.000,00 atau 727,56%. Pendapatan Sewa GOR Amongrogo dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).

Pendapatan Sewa Youth Center dianggarkan sebesar Rp3.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.255.000,00 atau 277,16%. Pendapatan Sewa Youth Center dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).

Pendapatan Sewa Mandala Krida dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.650.000,00 atau 444,17%. Pendapatan Sewa Mandala Krida dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).

Pendapatan Sewa Halaman Parkir Stadion Mandala Krida dianggarkan sebesar Rp2.060.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.490.000,00 atau 460,68%. Pendapatan Sewa Halaman Parkir Stadion Mandala Krida dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai BPO).

5.1.1.2 Pendapatan Transfer **Rp3.328.773.835.982,00** **Rp3.218.782.586.692,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp3.388.039.565.092,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.328.773.835.982,00 atau 98,25%. Meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp3.328.773.835.982,00 mengalami kenaikan sebesar Rp109.991.249.290,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 sebesar Rp3.218.782.586.692,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
a.	Bagi Hasil Pajak	135.632.688.000,00	93.097.809.176,00	68,64	98.447.376.907,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	33.269.000,00	44.756.323,00	134,53	36.078.889,00
c.	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	99,99	1.314.372.147.000,00
d.	Dana Alokasi Khusus	926.672.397.213,00	910.032.137.851,00	98,20	967.000.859.044,00
	Jumlah	2.376.710.501.213,00	2.317.436.811.403,00	97,51	2.379.856.461.840,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Keistimewaan	973.435.532.429,00	973.435.532.429,00	100,00	784.272.397.752,00
	Dana Penyesuaian	37.250.000.000,00	37.250.000.000,00	100,00	53.998.349.000,00
	Jumlah	1.010.685.532.429,00	1.010.685.532.429,00	100,00	838.270.746.752,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi atau Pemda Lainnya				
	Bantuan Keuangan	643.531.450,00	651.492.150,00	101,24	655.378.100,00
	Jumlah	643.531.450,00	651.492.150,00	101,24	655.378.100,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.388.039.565.092,00	3.328.773.835.982,00	98,25	3.218.782.586.692,00

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp135.632.688.000,00 dan realisasi sebesar Rp93.097.809.176,00 atau 68,64%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.349.567.731,00 atau 5,43% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hasil Pajak Tahun 2017 yaitu sebesar Rp98.447.376.907,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.769.208.000,00	2.559.863.535,00	92,44	3.810.550.000,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	127.960.426.000,00	85.634.891.641,00	66,92	88.686.819.187,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	4.903.054.000,00	4.903.054.000,00	100,00	5.950.007.720,00
	Jumlah	135.632.688.000,00	93.097.809.176,00	68,64	98.447.376.907,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp33.269.000,00 dan realisasi sebesar Rp44.756.323,00 atau 134,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi SDH	5.768.000,00	21.775.632,00	377,52	19.361.624,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	27.501.000,00	22.980.691,00	83,56	16.717.265,00
	Jumlah	33.269.000,00	44.756.323,00	134,53	36.078.889,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi SDH dianggarkan sebesar Rp5.768.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.775.632,00 atau 377,52%. Realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan transfer dari pusat.

Pendapatan dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp27.501.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.980.691,00 atau sebesar 83,56% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.314.372.147.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.314.262.108.053,00 atau 99,99%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp110.038.947,00 atau 0,01% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.314.372.147,00.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp926.672.397.213,00 dan realisasi Rp910.032.137.851,00 atau 98,20%. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp56.968.721.193,00 atau 5,89% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 yaitu sebesar Rp967.000.859.044,00. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A.	DAK Fisik				
1	DAK Pendidikan	27.352.000.000,00	25.304.240.230,00	92,51	57.083.381.160,00
2	DAK Kesehatan	184.717.000,00	166.674.360,00	90,23	1.154.198.580,00
3	DAK Infrastruktur Jalan	20.037.000.000,00	19.955.456.700,00	99,59	27.585.554.000,00
4	DAK Infrastruktur Irigasi	5.436.000.000,00	4.534.071.000,00	83,41	5.828.257.400,00
5	DAK Kelautan dan Perikanan	731.289.000,00	718.331.500,00	98,23	4.312.218.500,00
6	DAK Pertanian	3.000.000.000,00	2.797.284.000,00	93,24	3.099.739.000,00
7	DAK Kehutanan	3.273.000.000,00	3.148.632.380,00	-	-
9	Dana Alokasi Khusus Energi Skala Kecil	3.219.000.000,00	2.848.135.275,00	88,48	647.639.500,00
10	DAK Pariwisata	-	-	-	709.973.600,00
11	Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran DAK	-	-	-	14.917.069.000,00
	Jumlah	63.233.006.000,00	59.472.825.445,00	94,05	115.338.030.740,00
B.	DAK Non Fisik				
1	Bantuan Operasional Sekolah	607.759.554.000,00	578.172.872.800,00	95,13	565.206.926.000,00
2	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	2.469.565.605,00	2.469.565.605,00	100,00	2.333.757.400,00
3	Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	1.192.603.001,00	1.192.603.001,00	-	-
4	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	1.136.156.000,00
5	Dana Tunjangan Profesi Guru	249.971.828.607,00	266.678.431.000,00	106,68	280.809.638.904,00
6	Dana Tambahan Penghasilan Guru	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	2.176.350.000,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2.017.940.000,00	2.017.940.000,00	100,00	
	Jumlah	863.439.391.213,00	850.559.312.406,00	98,51	851.662.828.304,00
	Jumlah Total	926.672.397.213,00	910.032.137.851,00	98,20	967.000.859.044,00

Dana Keistimewaan Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp973.435.532.429,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Lampiran V sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2017 sebesar Rp26.564.467.571,00 sehingga menjadi sebesar Rp973.435.532.429,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2018 adalah sebesar Rp973.435.532.429,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp37.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp37.250.000.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp16.748.349.000,00 atau 31,02% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2017 yaitu sebesar Rp53.998.349.000,00.

Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp643.531.450,00 dan realisasi Rp651.492.150,00 atau 101,24%. Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp651.492.150,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp69.065.410,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp90.088.660,00 (109,69%) dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp492.338.080,00 (100%).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Sleman melebihi dari anggaran sebesar Rp7.960.000,00 atau 9,69% merupakan pembayaran kekurangan Tahun 2017.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp73.681.960.000,00** **Rp14.485.236.531,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 merupakan Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp79.955.500.347,00 dan realisasi sebesar Rp73.681.960.000,00 atau 92,15%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp65.470.263.816,00 atau 451,98% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp14.485.236.531,00. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penerimaan dana hibah dari Pemerintah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp65.128.307.500,00 pada Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-1/MK.7/2018 tanggal 7 November 2018. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
a.	Rupiah Murni	65.128.307.500,00	65.128.307.000,00	100,00	-
b.	Multilateral	6.312.092.847,00		-	6.341.238.531,00
	Jumlah	71.440.400.347,00	65.128.307.000,00	91,16	6.341.238.531,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri				
a.	Dealer Otomotif	5.120.000.000,00	4.816.853.000,00	94,08	4.574.898.000,00
b.	Main Dealer	25.500.000,00	28.800.000,00	112,94	32.100.000,00
c.	PT. Jasa Raharja	3.369.600.000,00	3.708.000.000,00	110,04	3.537.000.000,00
	Jumlah	8.515.100.000,00	8.553.653.000,00	100,45	8.143.998.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah	79.955.500.347,00	73.681.960.000,00	92,15	14.485.236.531,00

5.1.2 Belanja **Rp4.524.021.293.356,79** **Rp4.195.049.264.563,98**

Anggaran Belanja Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp4.939.087.891.778,51 termasuk di dalamnya anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2018, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp4.524.021.293.356,79 atau 91,60%. Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp4.524.021.293.356,79 mengalami peningkatan sebesar Rp328.972.028.792,81 atau 7,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.195.049.264.563,98.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.2.1 Belanja Operasi Rp3.391.193.567.029,05 Rp3.140.664.073.385,38

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp3.643.068.577.778,80 dan realisasi sebesar Rp3.391.193.567.029,05 atau 93,09%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 sebesar Rp3.391.193.567.029,05 mengalami kenaikan sebesar Rp250.529.493.643,67 atau 7,98% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.140.664.073.385,38. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Rp1.512.793.109.461,00 Rp1.428.694.957.043,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.559.435.473.588,00 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.314.890.942.471,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp244.544.531.117,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp1.512.793.109.461,00 terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.284.965.484.793,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp227.827.624.668,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp84.098.152.418,00 atau 5,89% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.428.694.957.043,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.284.965.484.793,00 atau 97,72% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Gaji dan Tunjangan				
a.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	611.182.511.582,00	598.040.243.718,00	(13.142.267.864,00)	97,85
b.	Tunjangan Keluarga	57.673.353.975,00	55.657.721.523,00	(2.015.632.452,00)	96,51
c.	Tunjangan Jabatan	13.217.792.000,00	12.869.348.000,00	(348.444.000,00)	97,36
d.	Tunjangan Fungsional	38.661.136.375,00	37.948.642.000,00	(712.494.375,00)	98,16
e.	Tunjangan Fungsional Umum	10.289.944.500,00	9.738.004.000,00	(551.940.500,00)	94,64
f.	Tunjangan Beras	29.924.315.898,00	28.030.015.084,00	(1.894.300.814,00)	93,67
g.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.244.319.985,00	956.226.465,00	(288.093.520,00)	76,85
h.	Pembulatan Gaji	9.749.931,00	7.346.254,00	(2.403.677,00)	75,35
j.	Uang Paket	149.940.000,00	149.040.000,00	(900.000,00)	99,40
k.	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	47.632.500,00	(130.500,00)	99,73
l.	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	95.004.000,00	(522.000,00)	99,45
m.	Tunjangan Badan Anggaran	51.417.000,00	49.459.500,00	(1.957.500,00)	96,19
n.	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	11.223.000,00	-	100,00
o.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	82.541.250,00	47.262.750,00	(35.278.500,00)	57,26
p.	Tunjangan Perumahan	11.275.200.000,00	9.789.600.000,00	(1.485.600.000,00)	86,82
r.	Uang Jasa Pengabdian	60.000.000,00	13.500.000,00	(46.500.000,00)	22,50
s.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00
t.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdas	28.449.000,00	27.013.500,00	(1.435.500,00)	94,95
u.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian	7.084.590.090,00	6.035.419.326,00	(1.049.170.764,00)	85,19
v.	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	18.471.007.932,00	16.880.782.566,00	(1.590.225.366,00)	91,39
w.	Tunjangan Bahaya Radiasi	139.900.000,00	134.550.000,00	(5.350.000,00)	96,18
x.	Tunjangan Reses	2.475.000.000,00	2.460.000.000,00	(15.000.000,00)	99,39
y.	Tunjangan Transportasi	8.586.360.000,00	8.530.240.000,00	(56.120.000,00)	99,35
	Jumlah	811.122.041.518,00	787.878.274.186,00	(23.243.767.332,00)	97,13
2	Tambahan Penghasilan PNS				
a.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.205.177.000,00	537.000.000,00	(1.668.177.000,00)	24,35
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	266.718.031.000,00	262.164.197.115,00	(4.553.833.885,00)	98,29
c.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	176.551.494.241,00	176.482.696.206,00	(68.798.035,00)	99,96
d.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Biaya Hidup	691.200.000,00	615.150.000,00	(76.050.000,00)	89,00
	Jumlah	446.165.902.241,00	439.799.043.321,00	(6.366.858.920,00)	98,57



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH				
a.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.840.000.000,00	(60.000.000,00)	99,39
b.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.825.000.000,00	2.825.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	12.725.000.000,00	12.665.000.000,00	(60.000.000,00)	99,53
4	Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
a.	Biaya Insentif Pajak Daerah	43.660.620.000,00	43.650.000.000,00	(10.620.000,00)	99,98
	Jumlah	43.660.620.000,00	43.650.000.000,00	(10.620.000,00)	99,98
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	585.608.943,00	370.382.400,00	(215.226.543,00)	63,25
b.	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	611.735.847,00	602.784.886,00	(8.950.961,00)	98,54
c.	Insentif Pemungutan Retribusi Perijinan Tertentu	20.033.922,00	-	(20.033.922,00)	0,00
	Jumlah	1.217.378.712,00	973.167.286,00	(244.211.426,00)	79,94
	Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung	1.314.890.942.471,00	1.284.965.484.793,00	(29.925.457.678,00)	97,72

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp26.815.286.774,00 atau 2,13% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.258.150.198.019,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2018 per OPDa adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per SKPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	742.451.304.486,00	728.142.489.165,00	(14.308.815.321,00)	98,07
2	Dinas Kesehatan	15.351.210.915,00	15.043.275.338,00	(307.935.577,00)	97,99
3	RS Grhasia	17.150.337.952,00	16.932.352.797,00	(217.985.155,00)	98,73
4	RS. Respira	9.042.180.345,00	8.927.866.051,00	(114.314.294,00)	98,74
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	19.455.593.848,00	18.993.053.862,00	(462.539.986,00)	97,62
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.411.618.878,00	2.365.877.116,00	(45.741.762,00)	98,10
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.465.038.080,00	3.408.090.909,00	(56.947.171,00)	98,36
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.545.505.540,00	7.384.743.171,00	(160.762.369,00)	97,87
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.939.278.013,00	2.926.878.432,00	(12.399.581,00)	99,58
10	Dinas Sosial	16.170.728.908,00	15.907.565.376,00	(263.163.532,00)	98,37
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.139.642.832,00	13.857.217.452,00	(282.425.380,00)	98,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	3.796.141.284,00	3.706.544.468,00	(89.596.816,00)	97,64
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.214.412.002,00	4.170.340.456,00	(44.071.546,00)	98,95
14	Badan Lingkungan Hidup	2.981.929.828,00	2.967.908.522,00	(14.021.306,00)	99,53
15	Dinas Perhubungan	8.397.629.211,00	8.256.098.494,00	(141.530.717,00)	98,31
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.945.435.716,00	3.860.370.992,00	(85.064.724,00)	97,84
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.676.212.129,00	2.648.275.845,00	(27.936.284,00)	98,96
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.105.355.326,00	1.944.992.559,00	(160.362.767,00)	92,38
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.080.953.433,00	1.028.832.571,00	(52.120.862,00)	95,18
20	Dinas Kebudayaan	9.113.914.555,00	8.881.479.365,00	(232.435.190,00)	97,45
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.113.050.627,00	6.995.373.721,00	(117.676.906,00)	98,35
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.413.517.728,00	7.262.120.706,00	(151.397.022,00)	97,96
23	Dinas Pariwisata	3.592.490.875,00	3.520.007.987,00	(72.482.888,00)	97,98
24	Dinas Pertanian	19.453.163.694,00	19.014.811.363,00	(438.352.331,00)	97,75
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	21.671.801.204,00	21.276.076.977,00	(395.724.227,00)	98,17
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.540.394.323,00	7.730.664.336,00	(809.729.987,00)	90,52
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	3.053.143.646,00	3.053.114.726,00	(28.920,00)	100,00
28	Sekretariat Daerah	21.740.408.241,00	21.601.129.393,00	(139.278.848,00)	99,36
29	Sekretariat Paramparapraja	734.552.448,00	720.486.174,00	(14.066.274,00)	98,09
30	Kantor Perwakilan Daerah	1.038.447.667,00	1.027.587.388,00	(10.860.279,00)	98,95
31	DPRD	38.066.735.000,00	35.622.840.762,00	(2.443.894.238,00)	93,58
32	Sekretariat DPRD	4.826.084.254,00	4.759.143.704,00	(66.940.550,00)	98,61
33	Inspektorat	5.316.937.224,00	5.215.257.243,00	(101.679.981,00)	98,09
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.544.977.745,00	6.418.915.813,00	(126.061.932,00)	98,07
35	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	89.963.980.325,00	82.334.769.253,00	(7.629.211.072,00)	91,52
36	Badan Kepegawaian Daerah	182.933.780.912,00	182.703.042.964,00	(230.737.948,00)	99,87
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.453.053.277,00	4.355.889.342,00	(97.163.935,00)	97,82
	Jumlah	1.314.890.942.471,00	1.284.965.484.793,00	(29.925.457.678,00)	97,72

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2018 sebesar Rp227.827.624.668,00 mengalami kenaikan sebesar Rp57.282.865.644,00 atau 33,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2017 yaitu sebesar Rp170.544.759.024,00.

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp227.827.624.668,00 atau 96,16% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Honorarium PNS	74.629.572.814,00	66.985.644.558,00	(7.643.928.256,00)	89,76
2	Honorarium Non PNS	150.834.113.703,00	143.233.110.564,00	(7.601.003.139,00)	94,96
3	Uang Lembur	544.360.000,00	487.537.500,00	(56.822.500,00)	89,56
4	Belanja Pegawai BLUD	15.954.249.450,00	15.181.390.496,00	(772.858.954,00)	95,16
5	Belanja Pegawai BOS	2.582.235.150,00	1.939.941.550,00	(642.293.600,00)	75,13
	Jumlah	244.544.531.117,00	227.827.624.668,00	(16.716.906.449,00)	93,16

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2018 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per SKPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	80.317.247.810,00	72.681.294.630,00	(7.635.953.180,00)	90,49
2	Dinas Kesehatan	4.373.210.352,00	4.165.447.150,00	(207.763.202,00)	95,25
3	RS Grhasia	8.994.102.000,00	8.569.441.612,00	(424.660.388,00)	95,28
4	RS. Respira	2.829.068.500,00	2.753.538.500,00	(75.530.000,00)	97,33
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	25.136.852.700,00	23.778.268.900,00	(1.358.583.800,00)	94,60
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	10.113.052.900,00	9.093.555.100,00	(1.019.497.800,00)	89,92
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.349.104.000,00	2.317.110.050,00	(31.993.950,00)	98,64
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.544.094.250,00	4.325.480.150,00	(218.614.100,00)	95,19
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.888.450.100,00	3.402.976.150,00	(485.473.950,00)	87,51
10	Dinas Sosial	7.333.835.700,00	7.224.934.750,00	(108.900.950,00)	98,52
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.144.152.614,00	2.106.602.838,00	(37.549.776,00)	98,25
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.905.360.000,00	1.881.040.000,00	(24.320.000,00)	98,72
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	689.871.150,00	659.704.750,00	(30.166.400,00)	95,63
14	Badan Lingkungan Hidup	2.884.172.100,00	2.592.360.600,00	(291.811.500,00)	89,88
15	Dinas Perhubungan	3.262.377.200,00	3.197.101.550,00	(65.275.650,00)	98,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.152.606.400,00	1.107.467.050,00	(45.139.350,00)	96,08
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.400.280.750,00	2.306.175.600,00	(94.105.150,00)	96,08
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	283.265.800,00	258.727.166,00	(24.538.634,00)	91,34
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	462.545.550,00	408.860.450,00	(53.685.100,00)	88,39
20	Dinas Kebudayaan	17.148.486.050,00	15.615.288.050,00	(1.533.198.000,00)	91,06
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.556.751.500,00	1.530.394.000,00	(26.357.500,00)	98,31
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.343.020.266,00	2.177.961.750,00	(165.058.516,00)	92,96
23	Dinas Pariwisata	1.211.041.708,00	1.183.805.208,00	(27.236.500,00)	97,75
24	Dinas Pertanian	4.728.968.590,00	4.462.322.200,00	(266.646.390,00)	94,36
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	6.323.524.027,00	6.020.609.792,00	(302.914.235,00)	95,21
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.671.235.000,00	1.601.179.200,00	(70.055.800,00)	95,81
27	Sekretariat Daerah	15.035.641.650,00	13.963.827.450,00	(1.071.814.200,00)	92,87
28	Sekretariat Paramapraja	72.687.600,00	72.687.600,00	-	100,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	1.430.332.000,00	1.430.332.000,00	-	100,00
30	Sekretariat DPRD	2.879.032.900,00	2.672.447.900,00	(206.585.000,00)	92,82
31	Inspektorat	5.866.791.600,00	5.675.544.572,00	(191.247.028,00)	96,74
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.630.619.000,00	4.355.710.600,00	(274.908.400,00)	94,06
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	9.353.813.350,00	9.210.898.350,00	(142.915.000,00)	98,47
34	Badan Kepegawaian Daerah	3.889.241.000,00	3.792.879.000,00	(96.362.000,00)	97,52
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.339.695.000,00	1.231.650.000,00	(108.045.000,00)	91,94
	Jumlah	244.544.531.117,00	227.827.624.668,00	(16.716.906.449,00)	93,16



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp1.122.418.868.628,08 Rp1.079.167.300.856,38

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.122.418.868.628,08 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.290.914.911.884,05 dikurangi dengan realisasi Belanja HibahBarang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp131.904.619.931,57 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp36.591.423.324,40 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Konversi Belanja Hibah Barang Ke Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	1.445.741.174.190,80	1.290.914.911.884,05	89,29	1.136.518.067.342,38
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga:	(187.003.743.000,00)	(168.496.043.255,97)	90,10	(57.350.766.486,00)
a.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak	(142.105.913.500,00)	(131.904.619.931,57)	92,82	(50.461.684.116,00)
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(44.897.829.500,00)	(36.591.423.324,40)	81,50	(6.889.082.370,00)
	Jumlah	1.258.737.431.190,80	1.122.418.868.628,08	89,17	1.079.167.300.856,38

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Selanjutnya penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar anggaran dan Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi dikurangi dengan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dan anggaran serta realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2018sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp1.445.741.174.190,80dan realisasi sebesar Rp1.290.914.911.884,05 atau 89,29%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp154.396.844.541,67 atau 13,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.136.518.067.342,38. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.975.624.942,00	23.502.862.851,00	(1.472.762.091,00)	94,10
2	Belanja Bahan/Material	78.417.947.785,00	71.993.294.644,00	(6.424.653.141,00)	91,81
3	Belanja Jasa Kantor	302.963.035.349,91	278.534.806.032,58	(24.428.229.317,33)	91,94
4	Belanja Premi Asuransi	2.589.581.129,00	1.865.500.538,00	(724.080.591,00)	72,04
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.441.843.705,00	18.177.058.007,00	(3.264.785.698,00)	84,77
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.834.477.947,00	26.174.848.027,00	(2.659.629.920,00)	90,78
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.536.009.170,00	12.815.174.596,00	(2.720.834.574,00)	82,49
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.588.360.300,00	8.386.432.704,00	(1.201.927.596,00)	87,46
9	Belanja Sewa Alat Berat	728.000.000,00	716.283.000,00	(11.717.000,00)	98,39
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.754.276.700,00	34.972.528.572,00	(2.781.748.128,00)	92,63
11	Belanja Makanan dan Minuman	89.909.073.400,00	79.175.333.002,00	(10.733.740.398,00)	88,06
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	633.230.000,00	616.678.000,00	(16.552.000,00)	97,39
13	Belanja Pakaian Kerja	4.653.234.300,00	4.399.066.309,00	(254.167.991,00)	94,54
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.635.209.000,00	5.443.184.860,00	(192.024.140,00)	96,59
15	Belanja Perjalanan Dinas	114.999.396.297,00	91.715.650.579,00	(23.283.745.718,00)	79,75
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	41.076.885.050,00	40.647.419.900,00	(429.465.150,00)	98,95
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknik PNS	4.388.181.185,00	3.820.963.062,00	(567.218.123,00)	87,07
18	Belanja Pemeliharaan	62.745.327.990,24	60.583.769.786,00	(2.161.558.204,24)	96,56
19	Belanja Jasa Konsultasi	64.829.959.020,00	60.863.157.695,00	(3.966.801.325,00)	93,88
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.442.484.879,65	81.401.839.150,50	(29.040.645.729,15)	73,71
21	Belanja Hibah Barang/Jasa	142.105.913.500,00	131.904.619.931,57	(10.201.293.568,43)	92,82
22	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	44.897.829.500,00	36.591.423.324,40	(8.306.406.175,60)	81,50
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	130.056.872.750,00	118.992.744.640,00	(11.064.128.110,00)	91,49
24	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	15.615.882.500,00	14.882.730.000,00	(733.152.500,00)	95,31
25	Belanja Barang dan Jasa BOS	90.922.380.041,00	82.737.542.673,00	(8.184.837.368,00)	91,00
26	Efisiensi	157.750,00	-	(157.750,00)	0,00
	Jumlah	1.445.741.174.190,80	1.290.914.911.884,05	(154.826.262.306,75)	89,29

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 per OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	331.434.421.880,00	298.354.824.537,00	(33.079.597.343,00)	90,02
2	Dinas Kesehatan	77.901.996.010,94	63.412.837.087,50	(14.489.158.923,44)	81,40
3	RS Grhasia	21.205.788.252,71	12.277.447.885,00	(8.928.340.367,71)	57,90
4	RS. Respira	17.570.951.808,00	10.899.464.370,00	(6.671.487.438,00)	62,03
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	207.459.341.052,00	182.825.373.941,00	(24.633.967.111,00)	88,13
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	39.235.994.763,00	35.242.288.030,00	(3.993.706.733,00)	89,82
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.633.428.325,00	3.985.460.322,00	(647.968.003,00)	86,02
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.677.591.775,00	4.440.847.278,00	(236.744.497,00)	94,94
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.583.475.930,00	12.275.996.764,40	(1.307.479.165,60)	90,37
10	Dinas Sosial	27.268.936.569,00	25.685.830.381,00	(1.583.106.188,00)	94,19
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.257.427.954,00	16.109.708.363,00	(1.147.719.591,00)	93,35
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	7.550.091.910,00	6.894.680.361,00	(655.411.549,00)	91,32
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2.600.862.600,00	2.518.021.416,00	(82.841.184,00)	96,81
14	Badan Lingkungan Hidup	10.936.782.225,00	9.983.605.985,00	(953.176.240,00)	91,28
15	Dinas Perhubungan	114.511.748.785,91	112.142.390.005,58	(2.369.358.780,33)	97,93
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.393.116.540,00	11.846.838.018,00	(546.278.522,00)	95,59
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.687.938.975,00	5.478.415.408,00	(209.523.567,00)	96,32
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.747.719.700,00	2.624.791.952,00	(122.927.748,00)	95,53
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	3.192.372.475,00	2.697.893.927,00	(494.478.548,00)	84,51
20	Dinas Kebudayaan	247.556.909.606,00	227.339.952.223,57	(20.216.957.382,43)	91,83
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	18.311.477.650,00	17.070.132.999,00	(1.241.344.651,00)	93,22
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.623.560.265,00	12.234.625.752,00	(388.934.513,00)	96,92
23	Dinas Pariwisata	16.207.347.721,00	15.760.325.909,00	(447.021.812,00)	97,24
24	Dinas Pertanian	15.048.410.032,00	12.676.864.712,00	(2.371.545.320,00)	84,24
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.495.143.952,24	11.512.225.246,00	(982.918.706,24)	92,13
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.840.318.000,00	10.124.336.337,00	(715.981.663,00)	93,40
27	Sekretariat Daerah	45.529.570.132,50	41.976.042.040,00	(3.553.528.092,50)	92,20
28	Sekretariat Paramparapraja	224.816.500,00	223.285.017,00	(1.531.483,00)	99,32
29	Kantor Perwakilan Daerah	2.571.730.950,00	2.437.289.609,00	(134.441.341,00)	94,77
30	Sekretariat DPRD	75.207.479.800,00	57.912.212.426,00	(17.295.267.374,00)	77,00
31	Inspektorat	3.986.168.967,00	3.565.291.604,00	(420.877.363,00)	89,44
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.842.301.269,50	9.677.559.918,00	(1.164.741.351,50)	89,26
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	27.834.501.130,00	25.553.828.317,00	(2.280.672.813,00)	91,81
34	Badan Kepegawaian Daerah	12.294.602.810,00	11.772.123.947,00	(522.478.863,00)	95,75
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	12.316.847.875,00	11.382.099.796,00	(934.748.079,00)	92,41
	Jumlah	1.445.741.174.190,80	1.290.914.911.884,05	(154.826.262.306,75)	89,29

c. Belanja Bunga

Rp0,00

Rp 0,00

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

e. Belanja Hibah Rp718.940.165.615,57 Rp624.821.733.116,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 sebesar Rp718.940.165.615,57 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp587.035.545.684,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp131.904.619.931,57. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp94.118.432.499,57 atau 15,06% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp624.821.733.116,00.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD sebesar Rp637.041.930.000,00 dan realisasi sebesar Rp587.035.545.684,00 atau 92,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
a.	Hibah Urusan Pendidikan	550.876.730.000,00	511.445.545.684,00	(39.431.184.316,00)	92,84
b.	Hibah Urusan Kesehatan	920.000.000,00	920.000.000,00	-	100,00
c.	Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00
e.	Hibah Urusan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
f.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	-	100,00
	Hibah Urusan Pangan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00
	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00
g.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	4.325.000.000,00	4.060.000.000,00	(265.000.000,00)	93,87
h.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)	60,00
i.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	6.310.200.000,00	-	(6.310.200.000,00)	0,00
j.	Hibah Urusan Keistimewaan	61.300.000.000,00	61.300.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	637.041.930.000,00	587.035.545.684,00	(50.006.384.316,00)	92,15

Penjelasan Belanja Hibah (uang) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp550.876.730.000,00 dan realisasi sebesar Rp511.445.545.684,00 atau 92,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	BOSNAS DIKAS/SM	494.068.000.000,00	457.182.588.184,00	(36.885.411.816,00)	92,53
2	BOSDA SM Swasta	36.447.290.000,00	35.360.287.500,00	(1.087.002.500,00)	97,02
3	BOSDA SLB	5.325.440.000,00	4.951.670.000,00	(373.770.000,00)	92,98
4	Penyelenggaraan Ujian	136.000.000,00	136.000.000,00	-	100,00
5	Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.900.000.000,00	13.815.000.000,00	(1.085.000.000,00)	92,72
	Jumlah	550.876.730.000,00	511.445.545.684,00	(39.431.184.316,00)	92,84



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penjelasan:

Hibah BOSNAS DIKDAS/SM dianggarkan sebesar Rp494.068.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp457.182.588.184,00 atau 92,53% diberikan kepada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah BOSDA SM Swasta dianggarkan sebesar Rp36.447.290.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.360.287.500,00 atau 97,02% diberikan kepada Sekolah Menengah yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah BOSDA SLB dianggarkan sebesar Rp5.325.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.951.670.000,00 atau 92,98% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untuk Penyelenggaraan Ujian dianggarkan sebesar Rp136.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada UPT Pengelola Pendidikan pada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hibah untuk Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp14.900.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.815.000.000,00 atau 92,72% diberikan kepada:

Tabel 5.28
Rincian Hibah Penguatan Kelembagaan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Lembaga Orang Tua Asuh (LOTA) DIY	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
2	KONI DIY	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	-	100,00
3	National Paralympic Committee (NPC) DIY	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	100,00
4	Dewan Pendidikan DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
5	Kwarda DIY	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
6	KNPI DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
7	PGRI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
8	Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah DIY	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	0,00
9	Badan Musyawarah Pengurus Swasta (BMPS) DIY	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	0,00
10	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak (GOPTKI) DIY	65.000.000,00	-	(65.000.000,00)	0,00
	Jumlah	14.900.000.000,00	13.815.000.000,00	(1.085.000.000,00)	92,72

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp920.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.29
Rincian Penerima Hibah Urusan Kesehatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	KPAD DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
2	PMI DIY	420.000.000,00	420.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	920.000.000,00	920.000.000,00	-	100,00

3) Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Politik dengan anggaran sebesar Rp110.000.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Penerima Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	PWRI DIY	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00
2	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DIY	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00

4) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada Komda Lansia DIY.

5) Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp1.545.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	LPMK Pandeyan	100.000.000	100.000.000	-	100,00
2	LPMD Srimartani	75.000.000	75.000.000	-	100,00
3	LPMD Sidorejo	75.000.000	75.000.000	-	100,00
4	LPMD Purwodadi	75.000.000	75.000.000	-	100,00
5	LPMD Trimulyo	75.000.000	75.000.000	-	100,00
6	LPMK Terban	75.000.000	75.000.000	-	100,00
7	LPMD Wedomartani	75.000.000	75.000.000	-	100,00
8	LPMD Pagerharjo	75.000.000	75.000.000	-	100,00
9	LPMD Argosari	75.000.000	75.000.000	-	100,00
10	LPMD Sawahan	75.000.000	75.000.000	-	100,00
11	Prima Sejahtera	37.000.000	37.000.000	-	100,00
12	Niaga	37.000.000	37.000.000	-	100,00
13	Mandiri	37.000.000	37.000.000	-	100,00
14	Sejahtera Bersama	37.000.000	37.000.000	-	100,00
15	Ngalang Sejahtera	37.000.000	37.000.000	-	100,00
16	Mekar	37.000.000	37.000.000	-	100,00
17	Melati	37.000.000	37.000.000	-	100,00
18	Sumber Rejeki	37.000.000	37.000.000	-	100,00
19	Kartini Menoreh	37.000.000	37.000.000	-	100,00
20	Srikandi Agung	37.000.000	37.000.000	-	100,00
21	LPMD Balecatur	100.000.000	100.000.000	-	100,00
22	LPMK Pakuncen	75.000.000	75.000.000	-	100,00
23	LPMD Tegalarjo	75.000.000	75.000.000	-	100,00
24	LPMD Depok	75.000.000	75.000.000	-	100,00
25	LPMD Mulyodadi	75.000.000	75.000.000	-	100,00
	Jumlah	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	-	100,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

6) Hibah Urusan Ketahanan Pangan

Hibah Urusan Ketahanan Pangan dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan anggaran sebesar Rp80.000.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Hibah Urusan Ketahanan Pangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Kelompok Tani Ngudi Rejeki	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
2	KWT Sumber Tani	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
3	Gapoktan Catur Legowo	20.000.000,00	20.000.000,00		
4	Gapoktan Sumberrahayu	20.000.000,00	20.000.000,00		
	Jumlah	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00

7) Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika

Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Hibah dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY sebesar Rp500.000.000,00.

8) Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dikelola oleh OPD Teknis Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar Rp4.325.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.060.000.000,00 atau 93,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Baznas DIY	150.000.000	150.000.000	-	100,00
2	PW NU DIY	100.000.000	100.000.000	-	100,00
3	PWM DIY	100.000.000	100.000.000	-	100,00
4	MUI DIY	200.000.000	200.000.000	-	100,00
5	PHDI DIY	100.000.000	100.000.000	-	100,00
6	PGI DIY	100.000.000	100.000.000	-	100,00
7	KEVIKEPAN DIY	100.000.000	100.000.000	-	100,00
8	Bantuan untuk Tempat Ibadah	3.475.000.000,00	3.210.000.000,00	(265.000.000,00)	92,37
	Jumlah	4.325.000.000,00	4.060.000.000,00	(265.000.000,00)	93,87

9) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 60%. Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.34
Rincian Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Desa Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul (Pembuatan landasan pacu paralayang, papan nama embung, gazebo, kamar mandi)	500.000.000,00
2	Desa Kemandang, Tanjungsari, Gunungkidul (Peningkatan sarpras garam rakyat)	450.000.000,00
3	Desa Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul (Peningkatan sarpras garam rakyat)	300.000.000,00
4	Desa Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh Kulon Progo (Peningkatan sarpras garam rakyat)	500.000.000,00
5	Desa Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo (Pembangunan talud penguat tanggul utama embung Gorolangu untuk pengembangan kawasan buah)	500.000.000,00
6	Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman (Akses wisata, talud, pedestrian, instalasi air, rumah kuliner, toilet, gazebo, letter)	500.000.000,00
7	Desa Trihanggo, Gamping, Sleman (Pengembangan industri ikan hias)	500.000.000,00
8	Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul (Pembangunan gedung serba guna)	500.000.000,00
9	Desa Mangunan, Dlingo, Bantul (Pengembangan pariwisata)	500.000.000,00
10	Desa Muntuk, Dlingo, Bantul (Pengembangan pariwisata)	400.000.000,00
11	Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Pengembangan pariwisata)	350.000.000,00
12	Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul (Pengembangan pariwisata)	500.000.000,00
13	Desa Hargotirto, Kokap, Kulon Progo (Pengembangan pariwisata)	250.000.000,00
14	Desa Gading, Playen, Gunungkidul (Pengembangan wahana di Taman Hutan Raya Bunder)	250.000.000,00
	Jumlah	6.000.000.000,00

10) Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi

Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi dianggarkan sebesar Rp6.310.200.000,00 dan tidak direalisasikan karena tidak terjadi erupsi merapi yang butuh penanganan pasca erupsi. Alokasi anggaran hibah untuk penanganan pasca erupsi Merapi berasal dari sisa sumbangan masyarakat ketika terjadi erupsi merapi.

11) Hibah Urusan Keistimewaan

Hibah Urusan Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp61.300.000.000,00 dan realisasi 100% untuk Fasilitas Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya kepada Kraton Yogyakarta sebesar Rp45.300.000.000,00 dan Puro Pakualaman sebesar Rp16.000.000.000,00.

Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan pada OPD sebesar Rp142.105.913.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp131.904.619.931,57 atau 92,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Belanja Hibah Barang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.396.623.400,00	4.275.284.280,00	(121.339.120,00)	97,24
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	79.124.122.200,00	73.941.925.468,00	(5.182.196.732,00)	93,45
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	71.900.000,00	60.824.000,00	(11.076.000,00)	84,60
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.920.060.000,00	3.368.548.270,00	(551.511.730,00)	85,93
5	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	150.000.000,00	139.757.669,00	(10.242.331,00)	93,17
6	Dinas Koperasi, Mikro dan UKM	701.950.000,00	640.839.000,00	(61.111.000,00)	91,29
7	Dinas Kebudayaan	42.405.017.050,00	38.777.990.144,57	(3.627.026.905,43)	91,45
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.629.435.000,00	2.525.863.420,00	(103.571.580,00)	96,06
9	Dinas Pertanian	2.961.330.000,00	2.664.900.685,00	(296.429.315,00)	89,99
10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.510.640.600,00	2.381.633.095,00	(129.007.505,00)	94,86
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.234.835.250,00	3.127.053.900,00	(107.781.350,00)	96,67
	Jumlah	142.105.913.500,00	131.904.619.931,57	(10.201.293.568,43)	92,82



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	632.700.000,00	568.531.300,00	Belanja bahan bangunan untuk pembangunan Lab.IPA dan perabot untuk SMA swasta
2.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	2.806.923.400,00	2.804.722.980,00	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SLB swasta▪ Rehabilitasi Sekolah untuk SLB swasta▪ Pengadaan ALat alat Peraga /Praktik Sekolah swasta
3.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	957.000.000,00	902.030.000,00	<ul style="list-style-type: none">▪ Belanja Alat dan Barang sebagai modal berwirausaha untuk kelompok Gedangsari dan Saptosari untuk guide pariwisata▪ Belanja Laktop/Notebook/Printer Sebagai Modal Berwirausaha untuk Pemasaran Online
	Jumlah	4.396.623.400,00	4.275.284.280,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.800.000.000,00	4.337.796.443,00	Pengadaan Pipa dan Accesories SPAMDES untuk Forum PAMASKARTA DIY
2.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi	16.000.000.000,00	14.912.935.100,00	Pembangunan Insfrastruktur Permukiman pada Kawasan Strategis Provinsi
3.	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	18.665.704.000,00	17.571.301.700,00	PSU Permukiman
4.	Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi	3.621.138.000,00	3.359.894.325,00	Pembuatan sumur bor air tanah
5.	Pengaturan dan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi	551.378.000,00	412.196.275,00	Pembuatan sumur resapan
6.	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	7.126.710.200,00	5.893.522.275,00	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga
7.	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	2.500.000.000,00	2.488.883.950,00	Rehabilitasi VIP Room dan Bangunan Penunjang Bandara Adisutjipto
8.	Peningkatan Kualitas Perumahan/Permukiman Kumuh	25.859.192.000,00	24.965.395.400,00	Penanganan PSU kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul, Sleman, Kota dan Kulon Progo
	Jumlah	79.124.122.200,00	73.941.925.468,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	71.900.000,00	60.824.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Lembaga Kasultanan dan Kadipaten (Lemari Tahan Api)
	Jumlah	71.900.000,00	60.824.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	1.413.560.000,00	1.322.932.500,00	Toolkit Pelatihan Sepeda Motor, Pelatihan Pengolahan Makanan, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Audio Video dan Pelatihan Las Listrik untuk kelompok masyarakat
2.	Pembentukan Kesempatan Kerja	2.236.200.000,00	1.789.779.970,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan kelompok usaha pengolahan makanan ▪ Peralatan Kelompok Usaha Pengolahan Kayu ▪ Peralatan Kelompok Usaha Pengolahan Bambu ▪ Peralatan Kelompok Usaha Fashion
3.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	270.300.000,00	255.835.800,00	Bantuan peralatan usaha pengolahan makanan
	Jumlah	3.920.060.000,00	3.368.548.270,00	

Rincian Hibah Barang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Distribusi Pangan Masyarakat	120.000.000,00	109.757.669,00	Hibah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
2.	Penyediaan Cadangan Pangan	30.000.000,00	30.000.000,00	Hibah pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk Kelompok Girwana 5 dan Kelompok Pamiketan
	Jumlah	150.000.000,00	139.757.669,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Koperasi, Mikro dan UKM

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	701.950.000,00	640.839.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Preneur di desa Kanigoro, Kepek (perak,kayu dan jahit) 2 akt x 20 pelaku UMKM dan Desa Tegalrejo (produksi Bordir, batik, batu, mebel, makanan olahan dan bambu) 2 akt x 20 pelaku usaha ▪ Kampung Preneur sebanyak 5 Akt x 20 orang di Pringgokusuman, Pawirodirjan, Pandean, Prenggan, Gedongkiwo
	Jumlah	701.950.000,00	640.839.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	6.242.828.000,00	6.144.652.393,57	Pembangunan Museum Seniman, Yayasan Museum Seniman Giri Spto – Girirejo, Wukirsari, Imogiri, Bantul.
2.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	25.625.162.050,00	23.671.714.935,85	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemugaran Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta - Kompleks Srimanganti dan Kasatriyan ▪ Pemugaran Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta - Pendapa Dalem Mangkubumen ▪ Pemugaran Rehabilitasi WBCB Aset Pura



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
				Pakualaman - Pesanggrahan Hargopeni <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemugaran Rehabilitasi WBCB Aset Pura Pakualaman - Makam Girigondo ▪ Pemugaran Rehabilitasi WBCB Aset Pura Pakualaman - Bioskop Permata ▪ Rehabilitasi Aset Kraton Yogyakarta - Dinding Benteng ▪ Rehabilitasi Aset Pemerintah - RS TK III dr Soetarto (Jl. Juadi No.19, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta) ▪ Pemugaran Rehabilitasi Aset Pura Pakualaman Gandhok
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3.509.890.000,00	2.491.330.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Gamelan Kuningan Laras Pelog Slendro ▪ Gamelan Besi Pencu Kuningan Laras Pelog Slendro ▪ Peralatan Musik Kesenian ▪ Pakaian Kesenian
4.	Pengembangan Lumbung Mataraman	195.000.000,00	191.845.685,00	Kebutuhan demplot Lumbung Mataraman
5.	Pengembangan Teknologi Produksi Gamelan	52.624.000,00	52.000.000,00	Pengadaan peralatan pembuatan moulding gamelan
6.	Pengembangan Batik Jogja	229.600.000,00	199.000.000,00	Peralatan untuk Peningkatan IKM Batik
7.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	3.286.400.000,00	3.149.695.334,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Gamelan Perunggu untuk Desa Budaya ▪ Pengadaan Balai Budaya untuk Desa Budaya
8.	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa	3.263.513.000,00	2.853.616.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gamelan Besi Kencon Kuningan untuk 47 Desa ▪ Hibah Pakian Bergodo untuk 18 Sanggar Seni
	Jumlah	42.405.017.050,00	38.777.990.144,57	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	1.694.035.000,00	1.654.511.500,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan Sarana Produksi Budidaya Ikan
2.	Pengembangan Perikanan Tangkap	642.450.000,00	630.482.920,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaring Gillnet Milinium ▪ Jaring Gillnet Monofilament dan Pancing Rawai Dasar ▪ Pancing Hand Line ▪ Pancing Rawai ▪ Pancing Hand Line dan Line Houler Manual
3.	Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	292.950.000,00	240.869.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan dan Fasilitasi Olahan Ikan Bagi 3 Kecamatan Miskin ▪ Pelatihan dan Fasilitasi Olahan Ikan Bagi Pengolah Pemula
	Jumlah	2.629.435.000,00	2.525.863.420,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pertanian

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Budidaya Tanaman Pangan	302.200.000,00	301.796.100,00	
2.	Budidaya Tanaman Hortikultura	2.146.455.000,00	1.858.934.710,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan Pompa Air dan Selang ▪ Bantuan APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) ▪ Bantuan Saprodi ▪ Bantuan sarana dan prasarana budidaya sayuran/hortikultura di lahan pekarangan ▪ Pemeliharaan Durian (Nglanggeran Tonogoro 10 ha, Kleco 10 ha dan Gorolangu : 10 ha) ▪ Saprodi untuk Pemeliharaan Jambu Kristal ▪ Kawasan embung Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul 10 ha ▪ Pengembangan Klengkeng (Tonogoro 5 ha, Sriten 5 ha) ▪ Pengembangan Krisan KT Seruni Menoreh, Dusun karang, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, KP ▪ Sarana dan prasarana produksi untuk budidaya di lahan surjan ▪ Pembangunan embung kecil/bak penampungan saluran irigasi
3.	Budidaya Itik Turi	166.895.000,00	159.809.375,00	Pengadaan itik Turi
4.	Budidaya Peternakan	345.780.000,00	344.360.500,00	Pengadaan kambing PE, Kambing Bligon dan Kandang Panggung
	Jumlah	2.961.330.000,00	2.664.900.685,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Kehutanan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengelolaan Pasca Panen	276.950.000,00	270.895.665,00	Pelatihan Peningkatan kemampuan kapasitas lembaga petani perkebunan Fasilitasi Packaging produk olahan perkebunan
2.	Pengelolaan Tanaman Tembakau (Cukai)	92.100.000,00	91.024.450,00	Hibah Fasilitasi Alat Pengolahan Tembakau Sarpras dan Pendampingan (kultivator)
3.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	2.003.265.600,00	1.883.627.980,00	Pembangunan Gully Plug Pengkayaan Hutan Rakyat
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	138.325.000,00	136.085.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KUP Pengolahan Kayu Pertukangan (KTH Ayam, ▪ Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo ; KTHNgudi Mulyo,Plampang III, Kalitejo, Kokap, Kulon Progo ▪ KUP Budidaya Lebah Madu (KTH Ngudi Rejeki I,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tompak, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul) ▪ KUP Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KTH LestariMaju, Sentonorejo, Jogotirto, Berbah, Sleman ; ▪ KTH Rukun Mudo,Plesedan, Srimulyo, Piyungan, Bantul)
	Jumlah	2.510.640.600,00	2.381.633.095,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	1.300.000.000,00	1.228.595.900,00	Bantuan peralatan untuk 34 kelompok usaha
2.	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia, dan Aneka	1.783.790.250,00	1.748.178.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan jahit untuk Pelatihan IKM Produk Pakaian Jadi dan Tekstil ▪ Peralatan tenun untuk Pelatihan IKM tenun ▪ Peralatan untuk Peningkatan Kemampuan Produk Olahan Coklat ▪ Peralatan untuk Pelatihan Pengembangan Desain IKM Meubel Kayu ▪ Peralatan untuk Pelatihan Pengembangan Desain IKM Meubel Bambu ▪ Peralatan untuk Pengembangan WUB Anyaman Bambu ▪ Peralatan untuk Pelatihan Kemasan Gula Semut ▪ Peralatan untuk Pelatihan Produk Herbal Biofarmaka ▪ Peralatan untuk Kelompok kerajinan serat alam Selang Makmur,Selang, Wonosari, GK ▪ Peralatan untuk Kelompok Kerajinan Imitasi Lestari Craft ,Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul ▪ Peralatan untuk Kerajinan Bambu Karya Mandiri, Rejosari, Semin, Gunungkidul- ▪ Peralatan Produksi untuk Kelompok IKM Olahan Pangan ▪ Peralatan untuk Paguyuban PengrajinTatah Sungging Kulit "



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pucung Manunggal ", Pucung Dk Karangasem 05 Wukirsari, Imogiri. ▪ Peralatan untuk Kelompok Mebel Kayu Fajar Mulia Dusun Melikan ▪ Wonolelo Pleret Bantul
3.	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil, Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika	151.045.000,00	150.280.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan untuk Pelatihan IKM Logam di Bantul (Kelompok Rukun Karya Lestari, Desa Bangunjiwo, ▪ Kec. Kasihan, Kab. Bantul) ▪ Pelatihan IKM Logam di Kulonprogo(Kelompok Bina Karya, d.a. Bendungan, Wates,Kulonprogo)
	Jumlah	3.234.835.250,00	3.127.053.900,00	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah.

Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 digabung menjadi:

**Tabel 5.36
Konversi Belanja Hibah**

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang	637.041.930.000,00	587.035.545.684,00	92,15	574.360.049.000,00
2	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	142.105.913.500,00	131.904.619.931,57	92,82	50.461.684.116,00
	Jumlah	779.147.843.500,00	718.940.165.615,57	92,27	624.821.733.116,00

f. Belanja Bantuan Sosial Rp37.041.423.324,40 Rp7.980.082.370,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018 sebesar Rp37.041.423.324,40 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp450.000.000,00 pada PPKD dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa pada OPD sebesar Rp36.591.423.324,40.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan sebesar Rp400.000.000,00.

Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 telah direalisasikan 100% untuk program pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin sebanyak 15 penerima.

Untuk Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 namun tidak direalisasikan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan pada SKPD sebesar Rp44.897.829.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp36.591.423.324,40 atau 81,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	42.862.339.000,00	34.631.319.805,00	(8.231.019.195,00)	80,80
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.857.196.000,00	1.781.906.019,40	(75.289.980,60)	95,95
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	178.294.500,00	178.197.500,00	(97.000,00)	99,95
	Jumlah	44.897.829.500,00	36.591.423.324,40	(8.306.406.175,60)	81,50

Penjelasan:

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp42.862.339.000,00 dan realisasi sebesar Rp34.631.319.805,00 atau 80,80% merupakan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp1.857.196.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.781.906.019,40 atau 95,95% merupakan pemberian bantuan untuk masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dianggarkan sebesar Rp178.294.500,00 dan realisasi sebesar Rp178.197.500,00 atau 99,95% merupakan bantuan alat-alat perbekalan kelompok transmigrasi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 digabung menjadi:

Tabel 5.38
Konversi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang	850.000.000,00	450.000.000,00	52,94	1.091.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.897.829.500,00	36.591.423.324,40	81,50	6.889.082.370,00
	Jumlah	45.747.829.500,00	37.041.423.324,40	80,97	7.980.082.370,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp1.132.827.726.327,74

Rp1.046.730.141.538,60

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.132.827.726.327,74 atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp1.260.102.019.948,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp86.097.584.789,14 atau 8,23%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.046.730.141.538,60. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. **Belanja Modal Tanah** **Rp362.819.024.678,00** **Rp247.052.455.730,00**

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp370.656.819.004,00 dan realisasi sebesar Rp362.819.024.678,00 atau 97,89% dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	14.999.996.000,00	10.088.104.775,00	(4.911.891.225,00)	67,25
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	345.796.684.604,00	344.051.081.940,00	(1.745.602.664,00)	99,50
3	Dinas Kebudayaan	9.823.238.400,00	8.668.789.163,00	(1.154.449.237,00)	88,25
4	DPPKA	36.900.000,00	11.048.800,00	(25.851.200,00)	29,94
	Jumlah	370.656.819.004,00	362.819.024.678,00	(7.837.794.326,00)	97,89

Penjelasan:

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM dianggarkan sebesar Rp14.999.996.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.088.104.775,00 atau 67,25% merupakan pengadaan tanah untuk pembangunan IPA dan Reservoir dengan luas 15.000 m².

Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dianggarkan sebesar Rp345.796.684.604,00 dan realisasi sebesar Rp344.051.081.940,00 atau 99,50%. Belanja Modal Tanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang direalisasikan dengan sumber Dana Keistimewaan pada beberapa KPA berikut:

- KPPD Kota Yogyakarta menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp39.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp38.607.626.000,00 untuk pembelian tanah di Jalan Gedinding Rejowinangun sebanyak 5.755 m².
- KPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp210.259.550.804,00 dan realisasi sebesar Rp209.588.480.780,00 untuk pembebasan tanah JLS Segmen Planjan-Tepus, Segmen Parangtritis-Girijati, Segmen Tepus-Jerukwudel dan tanah oprit underpass bandara.
- KPA Dinas Perhubungan menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp90.241.563.800,00 dan realisasi sebesar Rp90.182.474.400,00 untuk pengadaan tanah parkir Eks Stiker.
- KPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp3.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.373.413.020,00 untuk areal parkir di Geopark Nglanggeran.
- KPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp2.695.570.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.299.087.740,00 untuk pembangunan kawasan wisata Lava Bantal

Belanja Modal Tanah pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp9.823.238.400,00 dan realisasi sebesar Rp8.668.789.163,00 atau 88,25%. Pengadaan tanah tersebut menggunakan sumber Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Dinas Kebudayaan (Induk) dengan anggaran sebesar Rp8.881.511.100,00 dan realisasi sebesar Rp7.908.068.360,00 untuk pembayaran lahan Situs Warungboto, Lahan dan Bangunan WBCB di Ketandan dan Proses Penilaian Lahan dan Bangunan Joglo Panembahan.
- KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo menganggarkan sebesar Rp941.727.300,00 dan realisasi sebesar Rp760.720.803,00 untuk pembelian tanah di sekitar Cagar Budaya Jembatan Duwet dan tanah di Kawasan Geoheritage Eks Tambang Mangan Kliripan.

Belanja Modal Tanah pada DPPKA dianggarkan sebesar Rp36.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.048.800,00 atau 29,94% merupakan Belanja Modal Sertifikasi Tanah atas nama Pemda DIY yang belum didukung dengan sertifikat.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp147.918.637.501,00 Rp142.207.808.761,60

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp160.368.965.698,00 dan realisasi sebesar Rp147.918.637.501,00 atau 92,24%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.710.828.739,40 atau 4,02% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2017 yaitu sebesar Rp142.207.808.761,60. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.051.500.000,00	3.951.251.000,00	97,53
2.	Pengadaan Alat-alat Bantu	3.187.456.088,00	2.972.144.352,00	93,25
3.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.049.762.750,00	3.953.458.000,00	97,62
4.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	130.240.000,00	129.320.000,00	99,29
5.	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor			
6.	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	710.250.648,00	615.728.492,00	86,69
7.	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.205.685.900,00	2.004.395.500,00	90,87
8.	Pengadaan Alat Ukur	174.866.000,00	159.604.000,00	91,27
9.	Pengadaan Alat Pengolahan	333.622.000,00	323.028.000,00	96,82
10.	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	18.850.000,00	15.911.500,00	84,41
11.	Pengadaan Alat Kantor	16.243.987.294,00	12.868.077.790,00	79,22
12.	Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.778.122.220,00	22.310.173.675,00	93,83
13.	Pengadaan Komputer	31.592.237.976,00	30.720.368.301,00	97,24
14.	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	381.143.000,00	365.161.000,00	95,81
15.	Pengadaan Alat Studio	5.918.856.295,00	5.073.513.646,00	85,72
16.	Pengadaan Alat Komunikasi	4.162.393.980,00	3.679.361.216,00	88,40
17.	Pengadaan Peralatan Pemancar			
18.	Pengadaan Alat Kedokteran	240.288.000,00	231.904.800,00	96,51
19.	Pengadaan Alat Kesehatan	42.757.000,00	34.272.000,00	80,16
20.	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	29.209.529.330,00	27.073.619.800,00	92,69
21.	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.936.206.960,00	7.561.596.880,00	95,28
22.	Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	20.800.000,00	20.400.000,00	98,08
	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	325.700.000,00	321.158.800,00	98,61
23.	Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	4.826.646.520,00	4.531.040.000,00	93,88
24.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	884.984.490,00	842.880.000,00	95,24



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
25.	Pengadaan Senjata Api			
26.	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	3.972.922.500,00	3.715.848.700,00	95,11
27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.970.156.747,00	14.444.420.049,00	90,45
	Jumlah	160.368.965.698,00	147.918.637.501,00	92,28

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	93.218.458.003,00	85.585.601.178,00	(7.632.856.825,00)	91,81
2	Dinas Kesehatan	1.351.026.750,00	1.320.281.360,00	(30.745.390,00)	97,72
3	RS Grhasia	1.427.969.100,00	1.305.341.660,00	(122.627.440,00)	91,41
4	RS. Respira	1.290.852.000,00	1.220.920.926,00	(69.931.074,00)	94,58
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	14.842.373.200,00	14.331.997.200,00	(510.376.000,00)	96,56
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.141.183.150,00	1.761.337.300,00	(1.379.845.850,00)	56,07
7	Satuan Polisi Pamong Praja	114.700.000,00	102.480.000,00	(12.220.000,00)	89,35
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.693.238.000,00	3.452.003.000,00	(241.235.000,00)	93,47
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	267.047.500,00	265.385.000,00	(1.662.500,00)	99,38
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	139.389.000,00	134.441.600,00	(4.947.400,00)	96,45
11	Badan Lingkungan Hidup	1.111.213.000,00	1.069.592.950,00	(41.620.050,00)	96,25
12	Dinas Perhubungan	2.979.194.000,00	2.974.546.100,00	(4.647.900,00)	94,53
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.914.448.900,00	3.664.328.960,00	(250.119.940,00)	93,61
14	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	629.214.500,00	376.182.000,00	(253.032.500,00)	59,79
15	Dinas Kebudayaan	16.373.224.500,00	15.618.949.796,00	(754.274.704,00)	95,39
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	496.579.700,00	478.163.300,00	(18.416.400,00)	96,29
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.991.000,00	96.604.100,00	(4.386.900,00)	95,66
18	Dinas Pertanian	1.072.412.500,00	897.273.000,00	(175.139.500,00)	83,67
19	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	119.467.000,00	112.655.000,00	(6.812.000,00)	94,30
20	Sekretariat Daerah	3.493.366.000,00	3.403.327.871,00	(90.038.129,00)	97,42
21	Kantor Perwakilan Daerah	552.468.750,00	525.893.000,00	(26.575.750,00)	95,19
22	Sekretariat DPRD	1.365.190.000,00	1.328.315.000,00	(36.875.000,00)	97,30
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	277.222.350,00	248.750.000,00	(28.472.350,00)	89,73
24	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	6.719.758.795,00	6.117.667.800,00	(602.090.995,00)	91,04
25	Badan Kepegawaian Daerah	518.623.000,00	505.563.000,00	(13.060.000,00)	97,48
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.159.355.000,00	1.021.036.400,00	(138.318.600,00)	88,07
	Jumlah	160.368.965.698,00	147.918.637.501,00	(12.450.328.197,00)	92,24

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Rp280.823.210.093,93 Rp307.820.582.766,80

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp299.268.905.129,00 dan realisasi sebesar Rp280.823.210.093,93 atau 93,84%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp26.997.372.672,87 atau 8,77% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp307.820.582.766,80. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.42
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	285.767.953.554,00	269.233.634.314,32	94,67
2.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.638.838.575,00	7.143.420.091,61	82,72
3.	Pengadaan Bangunan Bersejarah	2.695.030.000,00	2.485.186.350,00	92,21
4.	Pengadaan Tugu Peringatan	200.000.000,00	196.519.000,00	98,26
5.	Pengadaan Rambu-Rambu	1.967.083.000,00	1.764.450.338,00	89,70
	Jumlah	299.268.905.129,00	280.823.210.093,93	93,84

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	49.301.676.050,00	46.419.719.284,00	(2.881.956.766,00)	94,15
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	538.000.000,00	537.225.000,00	(775.000,00)	99,86
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	84.498.393.029,00	79.433.683.233,98	(5.064.709.795,02)	94,01
4	Satuan Polisi Pamong Praja	574.900.000,00	503.375.000,00	(71.525.000,00)	87,56
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	950.513.000,00	-	(950.513.000,00)	0,00
6	Badan Lingkungan Hidup	174.000.000,00	173.074.000,00	(926.000,00)	99,47
7	Dinas Perhubungan	1.779.613.000,00	1.577.244.738,00	(202.368.262,00)	88,63
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	430.540.000,00	415.487.000,00	(15.053.000,00)	96,50
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mene	7.053.559.000,00	7.051.603.000,00	(1.956.000,00)	99,97
10	Dinas Kebudayaan	49.178.162.300,00	48.986.695.500,00	(191.466.800,00)	99,61
11	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	37.012.000.000,00	36.029.710.802,81	(982.289.197,19)	97,35
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	731.289.000,00	718.326.500,00	(12.962.500,00)	98,23
13	Dinas Pariwisata	8.437.140.000,00	7.434.837.150,00	(1.002.302.850,00)	88,12
14	Dinas Pertanian	47.387.634.000,00	42.164.385.699,14	(5.223.248.300,86)	88,98
15	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	605.100.000,00	572.966.100,00	(32.133.900,00)	94,69
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	135.000.000,00	133.535.472,00	(1.464.528,00)	98,92
17	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	9.228.398.000,00	7.503.860.814,00	(1.724.537.186,00)	81,31
18	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.252.987.750,00	1.167.480.800,00	(85.506.950,00)	93,18
	Jumlah	299.268.905.129,00	280.823.210.093,93	(18.445.695.035,07)	93,84

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp309.525.083.527,81 dan Jaringan Rp324.810.707.765,20

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp395.885.889.463,00 dan realisasi sebesar Rp309.525.083.527,81 atau 78,19%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp15.285.624.237,39 atau 4,71% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp324.810.707.765,20. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.44
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan Jalan	261.776.509.395,25	208.812.439.014,77	79,77
2.	Pengadaan Jembatan	32.389.303.582,75	16.546.157.100,00	51,09
3.	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	24.278.095.750,00	14.143.236.611,00	58,26
4.	Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	6.791.473.000,00	5.576.832.500,00	82,12
5.	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.714.168.250,00	1.368.853.500,00	79,86
6.	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	40.648.211.750,00	36.850.915.121,00	90,66
7.	Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.979.820.000,00	3.924.943.592,02	98,62
8.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	64.000.000,00	63.978.125,00	99,97
9.	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	13.219.424.900,00	12.779.613.892,02	97,67
10.	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	139.032.625,00	138.407.500,00	99,55
	Pengadaan Instalasi Pengaman	118.300.000,00	114.821.500,00	97,06
11.	Pengadaan Jaringan Listrik	10.718.154.710,00	9.157.382.072,00	85,44
12.	Pengadaan Jaringan Telepon	49.395.500,00	47.503.000,00	96,17
	Jumlah	395.885.889.463,00	309.525.083.527,81	78,19

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.976.947.525,00	1.653.045.209,00	(323.902.316,00)	83,62
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	190.441.717.100,00	179.472.236.691,00	(10.969.480.409,00)	94,24
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	112.217.682.688,00	110.658.851.166,81	(1.558.831.521,19)	98,61
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.793.294.500,00	1.384.093.000,00	(63.409.201.500,00)	2,14
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.000.000,00	34.850.000,00	(150.000,00)	99,57
6	Badan Lingkungan Hidup	9.310.728.400,00	1.846.673.311,00	(7.464.055.089,00)	19,83
7	Dinas Perhubungan	7.747.152.500,00	6.200.188.800,00	(1.546.963.700,00)	80,03
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.000.000,00	1.153.000,00	(847.000,00)	57,65
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	192.000.000,00	190.674.000,00	(1.326.000,00)	99,31
	Dinas Pariwisata	8.609.795.000,00	7.529.322.350,00	(1.080.472.650,00)	87,45
	Dinas Pertanian	336.126.750,00	331.460.000,00	(4.666.750,00)	98,61
10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	41.300.000,00	41.300.000,00	-	100,00
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.500.000,00	5.400.000,00	(100.000,00)	98,18
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan	176.645.000,00	175.836.000,00		
	Jumlah	395.885.889.463,00	309.525.083.527,81	(86.359.996.935,19)	78,19

e. Belanja Modal Aset Tetap Rp29.185.301.667,00 Rp18.633.561.515,00 Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp31.209.708.754,00 dan realisasi sebesar Rp29.185.301.667,00 atau 93,51%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.551.740.152,00 atau 56,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 yaitu sebesar Rp18.633.561.515,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.46
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pengadaan Buku	1.233.586.807,00	1.129.744.460,00	(103.842.347,00)	91,58
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	7.769.900,00	7.744.900,00	(25.000,00)	99,68
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	9.427.790.130,00	8.998.642.780,00	(429.147.350,00)	95,45
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	34.313.400,00	32.913.400,00	(1.400.000,00)	95,92
5	Pengadaan Hewan	250.850.000,00	236.054.000,00	(14.796.000,00)	94,10
6	Pengadaan Tanaman	878.401.300,00	379.545.000,00	(498.856.300,00)	43,21
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.376.997.217,00	18.400.657.127,00	(976.340.090,00)	94,96
	Jumlah	31.209.708.754,00	29.185.301.667,00	(2.024.407.087,00)	93,51

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	27.051.385.747,00	25.741.261.182,00	(1.310.124.565,00)	95,16
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.999.007,00	1.822.735,00	(1.176.272,00)	60,78
3	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
4	Badan Lingkungan Hidup	698.401.300,00	203.545.000,00	(494.856.300,00)	29,14
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
6	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.200.000,00	186.800,00	(1.013.200,00)	15,57
7	Dinas Kebudayaan	2.366.050.700,00	2.245.996.500,00	(120.054.200,00)	94,93
8	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	558.055.500,00	485.861.400,00	(72.194.100,00)	87,06
9	Dinas Kelautan dan Perikanan			-	
10	Dinas Pertanian	383.900.000,00	365.104.000,00	(18.796.000,00)	95,10
11	Sekretariat Daerah	74.694.500,00	73.450.000,00	(1.244.500,00)	98,33
12	Sekretariat Paramparapraja	3.600.000,00	3.584.700,00	(15.300,00)	99,58
13	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	44.878.550,00	(121.450,00)	99,73
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.322.000,00	2.920.000,00	(3.402.000,00)	46,19
15	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.600.000,00	5.590.800,00	(9.200,00)	99,84
16	Badan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	8.600.000,00	(1.400.000,00)	86,00
	Jumlah	31.209.708.754,00	29.185.301.667,00	(2.024.407.087,00)	93,51

f. **Belanja Modal Aset Lainnya** **Rp2.556.468.860,00** **Rp6.205.025.000,00**

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp2.711.731.900,00 dan realisasi sebesar Rp2.556.468.860,00 atau 94,27%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.648.556.140,00 atau 58,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2017 yaitu sebesar Rp6.205.025.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2018 per OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.48
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.620.640.000,00	1.611.188.000,00	(9.452.000,00)	99,42
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	244.800.000,00	142.287.860,00	(102.512.140,00)	58,12
3	Badan Lingkungan Hidup	42.236.400,00	42.200.000,00	(36.400,00)	99,91
4	Sekretariat Daerah	138.200.000,00	137.700.000,00	(500.000,00)	99,64
5	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	651.620.000,00	609.645.000,00	(41.975.000,00)	93,56
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan	14.235.500,00	13.448.000,00	(787.500,00)	94,47
	Jumlah	2.711.731.900,00	2.556.468.860,00	(154.475.540,00)	94,27

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Rp0,00

Rp7.655.049.640,00

Anggaran Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp35.917.294.051,71 dan tidak ada realisasi penggunaan Belanja Tak Terduga selama Tahun 2018 karena tidak ada kondisi darurat yang harus dibiayai dari Pos Belanja Tak Terduga.

Dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.939.087.891.778,51 dan realisasi sebesar Rp4.524.021.293.356,79 tersebut, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Alokasi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 tersebut berasal dari Penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2018 sebesar Rp973.435.532.429,00 dan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2017 sebesar Rp26.564.467.571,00

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp962.772.688.443,00 atau 96,28% sesuai dengan Berita Acara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, terdapat koreksi Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.227.163.514,64 sehingga realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2018 menjadi sebesar Rp961.545.524.928,36 atau 96,15%. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2018

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A. Urusan Kelembagaan				
1	Biro Organisasi	3.438.098.000,00	3.041.896.499,00	88,48
2	Sekretariat Parampara Praja	1.460.293.000,00	1.345.348.650,00	92,13
3	Asisten Keistimewaan	3.626.368.000,00	3.534.234.910,00	97,46
4	Badan Diklat	3.970.241.000,00	3.273.665.493,00	82,46
5	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100.000.000,00	98.789.476,00	98,79
6	Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	200.000.000,00	193.287.900,00	96,64
7	Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo	200.000.000,00	195.040.741,00	97,52
8	Bagian Organisasi Setda Kab. Gunung Kidul	200.000.000,00	194.043.400,00	97,02
9	Bagian Organisasi Setda Kab. Sleman	200.000.000,00	194.953.902,00	97,48
10	Biro Hukum	450.000.000,00	445.925.564,00	99,09
	Jumlah Urusan Kelembagaan	13.845.000.000,00	12.517.186.535,00	90,41



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
B. Urusan Kebudayaan				
1	Dinas Kebudayaan	149.715.669.262,00	134.087.987.158,57	89,56
2	Museum Negeri Sonobudoyo	8.213.813.250,00	7.581.358.212,00	92,30
3	Taman Budaya Yogyakarta	9.523.246.400,00	9.329.293.016,00	97,96
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	17.427.239.100,00	16.864.020.055,00	96,77
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	11.857.681.400,00	10.907.036.275,00	91,98
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	13.366.391.850,00	12.255.099.198,00	91,69
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	13.781.619.350,00	13.394.822.760,00	97,19
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	10.617.498.850,00	9.285.296.050,00	87,45
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11.931.567.638,00	10.972.956.338,00	91,97
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.245.211.100,00	10.040.342.150,00	98,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.731.301.000,00	9.178.849.000,00	94,32
12	Kantor Perwakilan Daerah	1.442.000.000,00	1.391.544.000,00	96,50
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.139.207.500,00	1.138.007.250,00	99,89
14	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.101.095.100,00	2.056.894.718,00	97,90
15	Dinas Pariwisata	17.293.295.400,00	16.848.408.863,00	97,43
16	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	375.000.000,00	371.129.435,00	98,97
17	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	33.506.057.500,00	33.487.512.000,00	99,94
18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunung Kidul	13.065.105.300,00	12.999.100.500,00	99,49
19	PPKD (Hibah)	61.300.000.000,00	61.300.000.000,00	100,00
Jumlah		396.633.000.000,00	373.489.656.978,57	94,17
C. Urusan Pertanahan				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	13.645.397.650,00	11.910.887.375,00	87,29
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	411.421.000,00	359.400.900,00	87,36
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1.517.766.500,00	1.379.413.828,00	90,88
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	2.040.517.100,00	1.737.568.000,00	85,15
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	1.424.450.000,00	1.175.465.275,00	82,52
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	3.540.087.000,00	3.184.003.400,00	89,94
7	Biro Hukum	460.748.750,00	451.471.977,00	97,99
Jumlah Urusan Pertanahan		23.040.388.000,00	20.198.210.755,00	87,66
D. Urusan Tata Ruang				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	5.179.771.485,00	4.389.770.771,00	84,75
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	360.306.132.680,00	356.334.293.882,64	98,9
3	KPPD Kota Yogyakarta	39.100.000.000,00	38.607.626.000,00	98,74
4	Biro Administrasi Pembangunan	599.900.000,00	593.582.500,00	98,95
5	Biro Umum dan Protokol	17.148.096.500,00	16.403.763.077,08	95,66
6	Dinas Perhubungan	103.603.265.434,00	103.143.730.244,07	99,56
7	Badan Lingkungan Hidup	334.200.000,00	299.241.570,00	89,54
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	480.225.000,00	467.474.100,00	97,34
9	Dinas Pariwisata DIY	3.810.547.727,00	3.403.280.500,00	89,31
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	2.116.830.854,00	1.832.181.963,00	86,55
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	11.993.525.000,00	11.836.160.117,00	98,69
12	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	456.361.500,00	455.622.750,00	99,84
13	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	8.250.000.000,00	5.199.918.000,00	63,03
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	989.750.500,00	970.466.200,00	98,05



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	4.796.899.500,00	4.647.703.520,00	96,89
16	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	3.250.167.100,00	2.853.145.340,00	87,78
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	1.085.285.800,00	1.084.980.555,00	99,97
18	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	190.522.000,00	174.164.300,00	91,41
19	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	2.246.776.700,00	2.128.740.425,00	94,75
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	543.354.220,00	514.624.845,00	94,71
Jumlah Urusan Tata Ruang		566.481.612.000,00	555.340.470.659,79	98,03
Jumlah		1.000.000.000.000,00	961.545.524.928,36	96,15

5.1.3 Transfer **Rp772.382.237.357,38** **Rp725.577.512.054,70**

Transfer Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp776.522.637.357,38 dan realisasi sebesar Rp772.382.237.357,38 atau 99,47%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan **Rp692.463.991.157,38** **Rp647.149.357.812,70**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp692.463.991.157,38 dan realisasi 100%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp45.314.633.344,68 atau 7% dibandingkan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp647.149.357.812,70. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2018 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	126.437.432.637,38	126.437.432.637,38	100,00	118.950.538.649,44
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	155.587.029.264,22	155.587.029.264,22	100,00	145.068.714.991,48
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	84.339.593.814,49	84.339.593.814,49	100,00	79.733.816.868,53
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	95.691.354.387,93	95.691.354.387,93	100,00	89.029.917.919,39
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	230.408.581.053,36	230.408.581.053,36	100,00	214.366.369.383,86
Jumlah		692.463.991.157,38	692.463.991.157,38	100,00	647.149.357.812,70

Berkaitan dengan pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, pada Tahun 2018 Pemda DIY memiliki kekurangan pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebagai dampak adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 58/KEP/2019 tanggal 15 Februari 2019 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1.	Kota Yogyakarta	3.659.907.400,00
2.	Kabupaten Bantul	5.061.294.500,00
3.	Kabupaten Kulon Progo	3.266.577.700,00
4.	Kabupaten Gunungkidul	3.366.255.000,00
5.	Kabupaten Sleman	6.441.602.500,00
	Jumlah	21.795.637.100,00

Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut telah dicatat sebagai Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp21.795.637.100,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Rp79.918.246.200,00 Rp78.428.154.242,00

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp84.058.646.200,00 dan realisasi sebesar Rp79.918.246.200,00 atau 95,07%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.490.091.958,00 atau 1,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp78.428.154.242,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp75.991.545.000,00, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp1.530.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.396.701.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

**5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan Rp75.991.545.000,00 Rp74.634.180.000,00
ke Pemerintah Daerah
Lainnya**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp80.131.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp75.991.545.000,00 atau 94,83%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp1.357.365.000,00 atau 1,82% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp74.634.180.000,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	531.242.000,00	531.242.000,00	100,00	1.228.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	1.726.073.000,00	1.387.173.000,00	80,37	18.085.091.821,00
3	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	71.846.331.000,00	71.556.531.000,00	99,60	19.425.064.373,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul	5.121.952.000,00	1.729.852.000,00	33,77	18.240.217.899,00
5	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	906.347.000,00	786.747.000,00	86,80	17.655.805.907,00
	Jumlah	80.131.945.000,00	75.991.545.000,00	94,83	74.634.180.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.52
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	138.000.000	138.000.000	-	100,00
2	Pembangunan Jamban	200.000.000	200.000.000	-	100,00
3	Cor Block Jalan	193.242.000	193.242.000	-	
	Jumlah	531.242.000,00	531.242.000,00	-	100,00

Tabel 5.53
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	230.000.000	131.100.000	(98.900.000,00)	57,00
2	Pembangunan Jamban	240.000.000	-	(240.000.000,00)	-
3	Cor Block Jalan	1.256.073.000	1.256.073.000	-	100,00
	Jumlah	1.726.073.000,00	1.387.173.000,00	(338.900.000,00)	80,37

Tabel 5.54
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	460.000.000	170.200.000	(289.800.000,00)	37,00
2	Pembangunan Jamban	193.500.000	193.500.000	-	100,00
3	Pembangunan RSUD Wates	70.000.000.000	70.000.000.000	-	
4	Cor Block Jalan	1.062.831.000	1.062.831.000	-	100,00
5	Kerajinan Mozaik	130.000.000	130.000.000	-	100,00
	Jumlah	71.846.331.000,00	71.556.531.000,00	(289.800.000,00)	99,60

Tabel 5.55
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	460.000.000	167.900.000	(292.100.000,00)	36,50
2	Pembangunan Jamban	402.500.000	402.500.000	-	100,00
3	Cor Block Jalan	1.159.452.000	1.159.452.000	-	100,00
4	Pembangunan Embung Kedungpoh	3.100.000.000,00	0,00	(3.100.000.000,00)	-
	Jumlah	5.121.952.000,00	1.729.852.000,00	(3.392.100.000,00)	33,77

Tabel 5.56
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	230.000.000	110.400.000	(119.600.000,00)	48,00
2	Cor Block Jalan	676.347.000	676.347.000	-	100,00
	Jumlah	906.347.000,00	786.747.000,00	(119.600.000,00)	86,80



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp1.530.000.000,00 Rp2.433.846.311,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.530.000.000,00 dan realisasi sebesar 100%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp903.846.311,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.433.846.311,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.57
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa**

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo (Ped.Karanggayam) Piyungan Bantul	193.750.000	193.750.000	100,00
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa Bawuran Pleret Bantul	66.250.000	66.250.000	100,00
3	Fasum Huntap Desa Umbulharjo Cangkringan Sleman	570.000.000	570.000.000	100,00
4	Barak Pengungsian Desa Wonokerto Turi Sleman	700.000.000	700.000.000	100,00
	Jumlah	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	100,00

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp2.396.701.200,00 Rp1.360.127.931,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.396.701.200,00 dan realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.58
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	254.028.000,00	254.028.000,00	-	100,00
2	Partai Nasional Demokrat	138.234.000,00	138.234.000,00	-	100,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	208.258.800,00	208.258.800,00	-	100,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	614.018.400,00	614.018.400,00	-	100,00
5	Partai Golongan Karya	232.567.200,00	232.567.200,00	-	100,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	307.690.800,00	307.690.800,00	-	100,00
7	Partai Demokrat	164.251.200,00	164.251.200,00	-	100,00
8	Partai Amanat Nasional	338.648.400,00	338.648.400,00	-	100,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	139.004.400,00	139.004.400,00	-	100,00
	Jumlah	2.396.701.200,00	2.396.701.200,00	-	100,00

5.1.4. Surplus (Defisit) Rp146.775.613.798,76 Rp164.614.442.669,59

SurplusebesarRp146.775.613.798,76merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2018. Surplus Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp17.838.828.870,83 atau 10,84% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2017 yaitu sebesar Rp164.614.442.669,59. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.59
Surplus/Defisit**

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.393.544.092.997,71	5.443.179.144.512,93	100,92	5.085.241.219.288,27
2	Belanja dan Transfer	5.715.610.529.135,89	5.296.403.530.714,17	92,67	4.920.626.776.618,68
3	Surplus/Defisit	(322.066.436.138,18)	146.775.613.798,76	45,57	164.614.442.669,59

5.1.5 Pembiayaan Netto Rp325.018.633.070,18 Rp179.451.993.468,59

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp325.018.633.070,18 yang terdiri atas:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan Rp347.018.633.070,18 Rp194.371.993.468,59

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp347.018.633.070,18. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp152.646.639.601,59 atau 78,53% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp194.371.993.468,59. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp347.018.633.070,18 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.60
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	344.066.436.138,18	344.066.436.138,18	100,00	192.109.707.459,59
2	Pencairan Dana Cadangan			-	-
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya	-	2.952.196.932,00	-	2.262.286.009,00
	Jumlah	344.066.436.138,18	347.018.633.070,18	100,86	194.371.993.468,59

- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp344.066.436.138,18 merupakan SiLPA Tahun 2017 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2017.
- b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp2.952.196.932,00 terdiri dari penerimaan pembayaran dana bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp14.250.000,00, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp164.000.000,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.773.946.932,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.61
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah**

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Selisih Lebih (Kurang) Rp	%
1	Dinas Pertanian			14.250.000,00	
	DPM PHP Tahun Anggaran 2010	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	-
	DPM PHP Tahun Anggaran 2012	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan			-	-
	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima per Oktober 2011)	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	-
3	Dinas Perindagkop dan UKM			2.773.946.932,00	
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur 2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	0,00	3.263.000,00	3.263.000,00	-
	Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Ketahanan Pangan Tahun 2007	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013	0,00	59.349.400,00	59.349.400,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	0,00	1.148.842.232,00	1.148.842.232,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	0,00	1.029.196.700,00	1.029.196.700,00	-
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 Tahap II	0,00	508.395.600,00	508.395.600,00	-
	Jumlah	0,00	2.952.196.932,00	2.952.196.932,00	-

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp22.000.000.000,00 Rp14.920.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp22.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp7.080.000.000,00 atau 47,45% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp14.920.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp22.000.000.000,00 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) PemdaDIY dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan realisasi 100%diberikan kepada PT. Bank BPD DIY.
- b. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% melalui BUKP.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp471.794.246.868,94 Rp344.066.436.138,18

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp471.794.246.868,94, mengalami kenaikan sebesar Rp127.727.810.730,76 atau 37,12% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 yaitu sebesar Rp344.066.436.138,18. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2018, dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.62
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

No	Uraian	Tahun 2018			Tahun 2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jumlah Pendapatan	5.393.544.092.997,71	5.443.179.144.512,93	100,92	5.085.241.219.288,27
2	Jumlah Belanja dan Transfer	5.715.610.529.135,89	5.296.403.530.714,17	92,67	4.920.626.776.618,68
3	Surplus/Defisit	(322.066.436.138,18)	146.775.613.798,76	45,57	164.614.442.669,59
4	Pembiayaan Netto	322.066.436.138,18	325.018.633.070,18	100,92	179.451.993.468,59
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	471.794.246.868,94		344.066.436.138,18

SILPA sebesar Rp471.794.246.868,94 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	SILPA di Bendahara Umum Daerah (BUD)	434.745.158.077,68
2.	Pendapatan belum disetor di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2018	31.101.900,00
3.	Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2018	5.700.336.046,42
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (BOS) pada rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri	5.680.327.756,00
5.	SILPA di BLUD RS. Ghrasia	9.357.171.662,55
6.	SILPA di BLUD BLPT	2.486.604.962,00
7.	SILPA di BLUD Bapel Jamkesos	2.001.184.103,29
8.	SILPA di BLUD Balai Pelatihan Kesehatan	2.270.947.256,00
9.	SILPA di BLUD RS Paru Respira	8.101.676.897,00
10.	Balai Laboratorium Kesehatan	1.419.738.208,00
	Jumlah	471.794.246.868,94

Penjelasan:

1. SILPA di BUD sebesar Rp434.745.158.077,68 terdiri dari saldo kas pada Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 sebesar Rp162.625.255.299,39 dan deposito sebesar Rp270.000.000.000,00 serta Kas di Pihak Ketiga sebesar Rp2.119.902.778,29 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja dengan SP2D LS. Saldo Deposito sebesar Rp270.000.000.000,00 ditempatkan pada Bank BNI sebesar Rp50.000.000.000,00, Bank BTN sebesar Rp100.000.000.000,00, BRI sebesar Rp50.000.000.000,00, pada Bank BPD DIY sebesar Rp50.000.000.000,00, Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 dan pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,0.
2. Pendapatan belum disetor di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp31.101.900,00 meliputi Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.500.000,00, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (Balai PISAM) sebesar Rp896.400,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp28.230.500,00 dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp475.000,00.
3. Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran belum disetorkan ke Rekening Kasda sampai dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.700.336.046,42 meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul) sebesar Rp839.719.485,00 dan Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (Balai PSDA) sebesar Rp306.167.792,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp3.276.255.261,00, Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Protokol) sebesar Rp99.501.408,00 dan Dinas Perhubungan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

sebesar Rp1.178.692.100,42. Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja dengan sumber dana SP2D UP/GU/TU namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum dikembalikan ke rekening Kas Daerah.

4. Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (BOS) sebesar Rp5.680.327.756,00 merupakan sisa penggunaan Dana BOS yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan berada pada rekening sekolah 127 SMA/SMK/SLB Negeri.
5. Rincian SILPA masing-masing BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.63
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

No	Uraian	Jumlah
1.	RS Ghrasia	
	SILPA 31 Desember 2017	10.886.939.352,71
	Pendapatan BLUD Tahun 2018	19.890.307.466,84
	Belanja BLUD Tahun 2018	(21.420.075.157,00)
	SILPA 31 Desember 2018	9.357.171.662,55
2.	Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)	
	SILPA 31 Desember 2017	1.985.925.606,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2018	2.772.673.171,00
	Belanja BLUD Tahun 2018	(2.271.993.815,00)
	SILPA 31 Desember 2018	2.486.604.962,00
3.	Bapel Jamkessos	
	SILPA 31 Desember 2017	1.949.148.747,94
	Pendapatan BLUD Tahun 2018	106.583.855,35
	Belanja BLUD Tahun 2018	(54.548.500,00)
	SILPA 31 Desember 2018	2.001.184.103,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	
	SILPA 31 Desember 2017	2.284.876.521,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2018	4.835.492.103,00
	Belanja BLUD Tahun 2018	(4.849.421.368,00)
	SILPA 31 Desember 2018	2.270.947.256,00
5.	RS. Paru Respira	
	SILPA 31 Desember 2017	6.126.580.308,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2018	9.015.569.856,00
	Belanja BLUD Tahun 2018	(7.040.473.267,00)
	SILPA 31 Desember 2018	8.101.676.897,00
6.	Balai Laboratorium Kesehatan	
	SILPA 31 Desember 2017	0,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2018	5.369.251.348,00
	Belanja BLUD Tahun 2018	(3.949.513.140,00)
	SILPA 31 Desember 2018	1.419.738.208,00
	Total SILPA BLUD	25.637.323.088,84

5. 2. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Rp344.066.436.138,18 Rp192.109.707.459,59

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2018 sebesar Rp344.066.436.138,18 mengalami peningkatan sebesar Rp151.956.728.678,59 atau 79,10% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2017 yaitu sebesar Rp192.109.707.459,59. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2018.

5.2.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp471.794.246.868,94 Rp344.066.436.138,18

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp471.794.246.868,94 berasal dari:

Tabel 5.64
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018

1.	Pendapatan	5.443.179.144.512,93
2.	Belanja dan Transfer	(5.296.403.530.714,17)
	Surplus (Defisit)	146.775.613.798,76
3.	Penerimaan Pembiayaan	347.018.633.070,18
4.	Pengeluaran Pembiayaan	(22.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	325.018.633.070,18
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	471.794.246.868,94

5.2.3 Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp471.794.246.868,94 Rp344.066.436.138,18

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2018 sebesar Rp471.794.246.868,94 mengalami peningkatan sebesar Rp127.727.810.730,76 atau 37,12% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2017 yaitu sebesar Rp344.066.436.138,18. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2018 lebih dari target yang ditetapkan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.3.1	<u>Aset</u>	<u>Rp9.135.260.144.513,79</u>	<u>Rp7.757.033.390.130,23</u>
5.3.1.1.	<u>Aset Lancar</u>	<u>Rp660.001.855.845,06</u>	<u>Rp457.462.422.808,81</u>
5.3.1.1.1	<u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp 474.856.235.612,94</u>	<u>Rp346.433.140.959,52</u>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp474.856.235.612,94 merupakan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1	<u>Kas di Kas Daerah</u>	<u>Rp434.745.158.077,68</u>	<u>Rp313.315.495.722,53</u>
--------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp434.745.158.077,68 merupakan kas yang berada dalam penguasaan BUD terdiri dari saldo rekening giro di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp162.625.255.299,39 dan sertifikat deposito sebesar Rp270.000.000.000,00 serta Kas di Pihak Ketiga sebesar Rp2.119.902.778,29 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja dengan SP2D LS. Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2018 sebesar Rp432.625.255.299,39 mengalami peningkatan sebesar Rp119.309.759.576,86 atau 38,08% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp313.315.495.722,53. Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Rekening Giro

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	162.625.255.299,39	203.315.495.722,53
2	Deposito pada Bank BRI	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3	Deposito pada Bank BTN	100.000.000.000,00	40.000.000.000,00
4	Deposito pada Bank BNI	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5	Deposito pada Bank BPD DIY	50.000.000.000,00	0,00
6.	Deposito pada Bank Mandiri	10.000.000.000,00	0,00
7.	Deposito pada Bank Syariah Mandiri	10.000.000.000,00	0,00
8.	Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga	2.119.902.778,29	
	Jumlah	434.745.158.077,68	313.315.495.722,53

5.3.1.1.1.2	<u>Kas di Bendahara Penerimaan</u>	<u>Rp31.101.900,00</u>	<u>Rp369.973.815,00</u>
--------------------	---	-------------------------------	--------------------------------

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.101.900,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.101.900,00 mengalami penurunan sebesar Rp338.871.915,00 atau 91,59% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp369.973.815,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.500.000,00
- Dinas Perhubungan sebesar Rp28.230.500,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp475.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah diakui sebagai penerimaan pendapatan Tahun 2018.

**5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara
Pengeluaran**

Rp11.380.663.802,42

Rp7.178.141.559,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp11.380.663.802,42 merupakan Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang sampai pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp5.700.336.046,42 dan Sisa Dana BOS yang berada di rekening sekolah SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp5.680.327.756,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.826.215.033,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.202.522.243,42 atau 58,55%. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.66
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

No	Nama SKPD	2018	2017
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	6.520.047.241,00	6.699.479.770,00
	a. Setor Kas Daerah	839.719.485,00	33.910.615,00
	b. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri	5.680.327.756,00	6.665.569.155,00
2.	Dinas Perhubungan	1.178.692.100,42	388.679.457,00
3.	Dinas Kebudayaan	0,00	51.960.859,00
4.	Sekretariat Daerah	99.501.408,00	7.223.750,00
5.	Sekretariat Parampara Praja	0,00	152.229,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	306.167.792,00	0,00
7.	Sekretariat DPRD	3.276.255.261,00	0,00
	Jumlah	11.380.663.802,42	7.147.496.065,00

Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja dengan sumber dana SP2D UP/GU/TU namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum dikembalikan ke rekening Kas Daerah.

Rincian sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp5.680.327.756,00 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.67
Rincian Sisa Kas di Sekolah**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	SPJ	SISA KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.212.680.000,00	1.206.769.277,00	5.910.723,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.200.640.000,00	1.150.992.351,00	49.647.649,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	936.040.000,00	861.596.837,00	74.443.163,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.078.000.000,00	1.026.190.488,00	51.809.512,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.076.600.000,00	956.448.946,00	120.151.054,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.065.680.000,00	1.065.680.000,00	-
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.051.400.000,00	1.017.279.994,00	34.120.006,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.054.480.000,00	1.035.285.739,00	19.194.261,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	806.960.000,00	793.240.986,00	13.719.014,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	735.280.000,00	674.325.444,00	60.954.556,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.174.040.000,00	880.137.635,00	293.902.365,00
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	732.480.000,00	731.680.000,00	800.000,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	925.400.000,00	924.473.009,00	926.991,00
14	SMA Negeri 1 Bantul	1.290.800.000,00	1.290.800.000,00	-
15	SMA Negeri 1 Dlingo	514.360.000,00	514.360.000,00	-
16	SMA Negeri 1 Imogiri	790.720.000,00	790.720.000,00	-
17	SMA Negeri 1 Jetis	1.061.480.000,00	1.060.963.393,00	516.607,00
18	SMA Negeri 1 Kasihan	1.016.680.000,00	1.016.667.000,00	13.000,00
19	SMA Negeri 1 Kretek	488.600.000,00	488.600.000,00	-
20	SMA Negeri 1 Pajangan	655.760.000,00	655.760.000,00	-
21	SMA Negeri 1 Piyungan	657.440.000,00	657.440.000,00	-
22	SMA Negeri 1 Pleret	651.560.000,00	651.560.000,00	-
23	SMA Negeri 1 Pundong	834.960.000,00	834.960.000,00	-
24	SMA Negeri 1 Sanden	804.720.000,00	804.720.000,00	-
25	SMA Negeri 1 Sedayu	1.242.640.000,00	1.242.640.000,00	-
26	SMA Negeri 1 Sewon	1.288.000.000,00	1.287.899.591,00	100.409,00
27	SMA Negeri 1 Srandakan	448.840.000,00	448.838.350,00	1.650,00
28	SMA Negeri 2 Banguntapan	951.160.000,00	950.986.349,00	173.651,00
29	SMA Negeri 2 Bantul	1.060.920.000,00	1.060.919.920,00	80,00
30	SMA Negeri 3 Bantul	799.400.000,00	799.381.836,00	18.164,00
31	SMA Negeri 1 Galur	390.320.000,00	387.406.422,00	2.913.578,00
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	391.440.000,00	391.440.000,00	-
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	447.160.000,00	445.408.665,00	1.751.335,00
34	SMA Negeri 1 Kokap	282.520.000,00	276.909.582,00	5.610.418,00
35	SMA Negeri 1 Lendah	768.320.000,00	768.320.000,00	-
36	SMA Negeri 1 Pengasih	819.560.000,00	781.016.175,00	38.543.825,00
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	232.960.000,00	232.960.000,00	-
38	SMA Negeri 1 Sentolo	656.320.000,00	652.980.000,00	3.340.000,00
39	SMA Negeri 1 Temon	529.480.000,00	496.575.310,00	32.904.690,00
40	SMA Negeri 1 Wates	937.160.000,00	937.160.000,00	-
41	SMA Negeri 2 Wates	669.760.000,00	665.324.471,00	4.435.529,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

42	SMA Negeri 1 Karangmojo	796.040.000,00	774.907.734,00	21.132.266,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	509.320.000,00	509.320.000,00	-
44	SMA Negeri 1 Patuk	514.080.000,00	514.080.000,00	-
45	SMA Negeri 1 Playen	527.520.000,00	489.143.275,00	38.376.725,00
46	SMA Negeri 1 Rongkop	434.840.000,00	432.326.240,00	2.513.760,00
47	SMA Negeri 1 Semanu	435.400.000,00	435.400.000,00	-
48	SMA Negeri 1 Semin	807.520.000,00	788.380.600,00	19.139.400,00
49	SMA Negeri 1 Tanjungsari	596.120.000,00	596.120.000,00	-
50	SMA Negeri 1 Wonosari	915.600.000,00	915.600.000,00	-
51	SMA Negeri 2 Playen	786.800.000,00	786.800.000,00	-
52	SMA Negeri 2 Wonosari	800.240.000,00	800.240.000,00	-
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	495.040.000,00	494.880.878,00	159.122,00
54	SMA Negeri 1 Depok	808.920.000,00	801.351.580,00	7.568.420,00
55	SMA Negeri 1 Gamping	529.200.000,00	529.200.000,00	-
56	SMA Negeri 1 Godean	795.480.000,00	795.480.000,00	-
57	SMA Negeri 1 Kalasan	934.640.000,00	934.640.000,00	-
58	SMA Negeri 1 Minggir	524.160.000,00	522.280.000,00	1.880.000,00
59	SMA Negeri 1 Mlati	526.960.000,00	498.508.369,00	28.451.631,00
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	771.120.000,00	771.020.000,00	100.000,00
61	SMA Negeri 1 Ngemplak	519.960.000,00	519.960.000,00	-
62	SMA Negeri 1 Pakem	667.800.000,00	658.441.958,00	9.358.042,00
63	SMA Negeri 1 Prambanan	816.200.000,00	816.181.509,00	18.491,00
64	SMA Negeri 1 Seyegan	958.720.000,00	958.720.000,00	-
65	SMA Negeri 1 Sleman	813.960.000,00	813.960.000,00	-
66	SMA Negeri 1 Tempel	493.080.000,00	493.080.000,00	-
67	SMA Negeri 1 Turi	496.440.000,00	496.440.000,00	-
68	SMA Negeri 2 Ngaglik	940.800.000,00	940.400.000,00	400.000,00
69	SMA Negeri 2 Sleman	518.560.000,00	518.560.000,00	-
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	786.800.000,00	772.759.720,00	14.040.280,00
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	2.898.000.000,00	1.248.454.000,00	1.649.546.000,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.405.760.000,00	2.258.597.426,00	147.162.574,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.299.360.000,00	2.103.120.850,00	196.239.150,00
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	1.718.920.000,00	1.589.158.650,00	129.761.350,00
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	1.665.720.000,00	1.359.465.750,00	306.254.250,00
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.249.080.000,00	1.249.080.000,00	-
77	SMK Negeri 1 Bantul	2.134.160.000,00	2.113.770.490,00	20.389.510,00
78	SMK Negeri 1 Dlingo	579.880.000,00	578.469.000,00	1.411.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	827.400.000,00	827.400.000,00	-
80	SMK Negeri 1 Pajangan	628.600.000,00	596.277.900,00	32.322.100,00
81	SMK Negeri 1 Pandak	1.062.600.000,00	1.062.520.000,00	80.000,00
82	SMK Negeri 1 Pleret	1.055.600.000,00	1.055.600.000,00	-
83	SMK Negeri 1 Pundong	1.059.520.000,00	1.058.358.100,00	1.161.900,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

84	SMK Negeri 1 Sanden	723.240.000,00	509.180.062,00	214.059.938,00
85	SMK Negeri 1 Sedayu	1.611.120.000,00	1.493.390.688,00	117.729.312,00
86	SMK Negeri 1 Sewon	2.497.600.000,00	2.301.660.357,00	195.939.643,00
87	SMK Negeri 2 Kasihan	638.120.000,00	477.773.865,00	160.346.135,00
88	SMK Negeri 2 Sewon	914.480.000,00	860.094.800,00	54.385.200,00
89	SMK Negeri 3 Kasihan	1.192.800.000,00	1.125.750.274,00	67.049.726,00
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	282.520.000,00	282.520.000,00	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	349.440.000,00	349.436.000,00	4.000,00
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	1.064.000.000,00	1.037.442.357,00	26.557.643,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	927.080.000,00	925.768.854,00	1.311.146,00
94	SMK Negeri 1 Pengasih	1.333.360.000,00	1.315.313.950,00	18.046.050,00
95	SMK Negeri 1 Samigaluh	519.960.000,00	502.460.000,00	17.500.000,00
96	SMK Negeri 1 Temon	615.160.000,00	553.064.950,00	62.095.050,00
97	SMK Negeri 2 Pengasih	2.205.280.000,00	2.069.580.883,00	135.699.117,00
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	673.120.000,00	627.626.500,00	45.493.500,00
99	SMK Negeri 1 Girisubo	674.520.000,00	661.819.800,00	12.700.200,00
100	SMK Negeri 1 Ngawen	1.487.920.000,00	1.482.601.788,00	5.318.212,00
101	SMK Negeri 1 Nglipar	1.057.000.000,00	1.035.718.192,00	21.281.808,00
102	SMK Negeri 1 Ponjong	805.560.000,00	774.882.275,00	30.677.725,00
103	SMK Negeri 1 Purwosari	640.640.000,00	584.220.530,00	56.419.470,00
104	SMK Negeri 1 Saptosari	1.411.200.000,00	1.411.200.000,00	-
105	SMK Negeri 1 Tanjungsari	358.680.000,00	354.261.015,00	4.418.985,00
106	SMK Negeri 1 Tepus	560.000.000,00	544.095.242,00	15.904.758,00
107	SMK Negeri 1 Wonosari	1.709.960.000,00	1.709.960.000,00	-
108	SMK Negeri 2 Gedangsari	948.640.000,00	942.041.200,00	6.598.800,00
109	SMK Negeri 2 Wonosari	1.984.360.000,00	1.928.174.750,00	56.185.250,00
110	SMK Negeri 3 Wonosari	1.455.160.000,00	1.455.160.000,00	-
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	1.262.240.000,00	1.121.894.217,00	140.345.783,00
112	SMK Negeri 1 Depok	1.187.480.000,00	1.097.270.805,00	90.209.195,00
113	SMK Negeri 1 Godean	1.324.120.000,00	1.264.751.417,00	59.368.583,00
114	SMK Negeri 1 Kalasan	1.557.080.000,00	1.553.773.750,00	3.306.250,00
115	SMK Negeri 1 Seyegan	1.809.080.000,00	1.705.573.340,00	103.506.660,00
116	SMK Negeri 1 Tempel	1.214.640.000,00	1.192.627.884,00	22.012.116,00
117	SMK Negeri 2 Depok	3.132.360.000,00	2.802.280.870,00	330.079.130,00
118	SMK Negeri 2 Godean	951.160.000,00	926.722.450,00	24.437.550,00
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	186.400.000,00	186.400.000,00	-
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	196.800.000,00	194.349.055,00	2.450.945,00
121	SLB/C N Pembina	452.400.000,00	452.400.000,00	-
122	SLB N 1 Bantul	614.000.000,00	517.443.725,00	96.556.275,00
123	SLB N 2 Bantul	183.200.000,00	180.692.000,00	2.508.000,00
124	SLB N 1 Sleman	208.800.000,00	208.800.000,00	-
125	SLB N 1 Gunungkidul	281.200.000,00	244.742.600,00	36.457.400,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

126	SLB N 2 Gunungkidul	117.600.000,00	117.600.000,00	-
127	SLB N 1 Kulon Progo	379.200.000,00	379.200.000,00	-
		116.537.320.000	110.856.992.244	5.680.327.756,00

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Rp25.637.323.088,84

Rp23.233.470.535,65

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.637.323.088,84 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.637.323.088,84 mengalami peningkatan sebesar Rp2.403.852.553,19 atau 10,35% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp23.233.470.535,65. Peningkatan tersebut karena adanya unit kerja BLUD baru yaitu Balai Laboratorium Kesehatan. Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.68
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2018 (Rp)	2017(Rp)
1	RS Grhasia	9.357.171.662,55	10.886.939.352,71
2	RS Paru Respira	8.101.676.897,00	6.126.580.308,00
3	Balai Pelayanan Jamkessos	2.001.184.103,29	1.949.148.747,94
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	2.270.947.256,00	2.284.876.521,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan	1.419.738.208,00	0,00
6.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.486.604.962,00	1.985.925.606,00
	Jumlah	25.637.323.088,84	23.233.470.535,65

Penjelasan:

Saldo Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp9.357.171.662,55 terdiri dari saldo Rekening Giro BPD DIY No. 041.111.000043 sebesar Rp2.857.171.662,55 dan sertifikat Deposito sebesar Rp6.500.000.000,00.

Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp8.101.676.897,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427.

Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkessos sebesar Rp2.001.184.103,29 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055.

Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp2.270.947.256,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.000050.

Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp1.419.738.208,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 sebesar Rp1.419.730.919,00 dan nomor 060.111.000003 sebesar Rp7.289,00.

Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.486.604.962,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Rp3.061.988.744,00

Rp2.336.059.327,34

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.061.988.744,00 terdiri Kas di Rekening SMA/SMK yang berasal dari serah terima P3D sebesar Rp750.780.390,00, Beasiswa sebesar Rp2.256.200.215 dan pendapatan jasa bunga yang belum disetor ke rekening Kas Daerah sebesar Rp55.088.139,00. Rincian Kas Lainnya dari sisa P3D adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69
Rincian Kas Lainnya di SMA/SMK

NO	SEKOLAH	SALDO REK KORAN PER 31 DES 2018			
		Jumlah	P3D	BEASISWA DLL	BUNGA, JASA
1	SMA N 1 YK	235.001.232,00	26.288.369,00	202.980.000,00	5.732.863,00
2	SMA N 2 YK	4.396.222,00		4.396.222,00	
3	SMA N 3 YK	1.513.432,00	34,00		1.513.398,00
4	SMA N 4 YK	221.689.217,00		221.689.217,00	
5	SMA N 7 YK	220.865.813,00	223.649,00	220.642.164,00	
6	SMA N 8 YK	401.686,00			401.686,00
7	SMA N 9 YK	13.719.014,00		13.719.014,00	
8	SMA N 10 YK	102.736.769,00	17.592.037,00	85.144.732,00	
9	SMA N 1 DLINGO	769.409,00			769.409,00
10	SMA N 1 IMOGIRI	6.227.214,00	90.000,00	6.137.214,00	
11	SMA N 1 JETIS	682.760,00	13.337,00		669.423,00
12	SMA N 1 SEDAYU	40.256.614,00		40.256.614,00	
13	SMA N 1 SEWON	5.435.325,00	2.920.267,00		2.515.058,00
14	SMA N 1 SRANDAKAN	375.014,00			375.014,00
15	SMA N 2 BANTUL	124.632.866,00	49.357,00	124.583.509,00	
16	SMA N 1 GALUR	947.204,00	308.705,00		638.499,00
17	SMA N 1 GIRIMULYO	919.378,00			919.378,00
18	SMA N 1 KALIBAWANG	76.458,00			76.458,00
19	SMA N 1 PENGASIH	14.831.090,00	14.831.090,00		
20	SMA N 1 SAMIGALUH	9.277.895,00	9.277.895,00		
21	SMA N 1 SENTOLO	0,00			
22	SMA N 1 KARANGMOJO	175.250,00	146.157,00		29.093,00
23	SMA N 1 PATUK	2.918.894,00	1.260.123,00	1.658.771,00	
24	SMA N 1 SEMANU	-			
25	SMA N 1 SEMIN	2.143.365,00	700.000,00	1.443.365,00	
26	SMA N 2 PLAYEN	435.639,00			435.639,00
27	SMA N 1 CANGKRINGAN	109.763,00	96,00		109.667,00
28	SMA N 1 DEPOK	0,00			
29	SMA N 1 GODEAN	5.142.428,00	5.142.428,00		
30	SMA N 1 KALASAN	9.118.340,00	3.290.211,00	5.828.129,00	
31	SMA N 1 MINGGIR	1.878.505,00			1.878.505,00
32	SMA N 1 NGAGLIK	8.243.245,00	3.641.126,00	4.602.119,00	
33	SMA N 1 NGEMPLAK	1.908.358,00		1.908.358,00	
34	SMA N 1 PAKEM				
35	SMA N 1 PRAMBANAN	0,00			
36	SMA N 1 SEYEGAN	578.639.242,00		576.978.283,00	1.660.959,00
37	SMA N 1 TURI	-			



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SEKOLAH	SALDO REK KORAN PER 31 DES 2018			
		Jumlah	P3D	BEASISWA DLL	BUNGA, JASA
38	SMA N 2 NGAGLIK	0,00			
39	SMA N 2 SLEMAN	446.506,00			446.506,00
40	SMK N 1 YK	1.205.291,00			1.205.291,00
41	SMK N 2 YK	160.463.569,00	97.293.075,00	63.170.494,00	
42	SMK N 4 YK	727.271.872,00	245.035.954,00	482.235.918,00	
43	SMK N 6 YK	304.455.503,00	304.455.503,00		
44	SMK N 1 BANTUL	0,00			
45	SMK N 1 DLINGO	1.265.101,00			1.265.101,00
46	SMK N 1 PLERET	25.542.249,00	18.100.000,00		7.442.249,00
47	SMK N 1 SANDEN	606.162,00	110.000,00		496.162,00
48	SMK N 1 KOKAP	205.829,00			205.829,00
49	SMK N 1 NANGGULAN	6.933.437,00			6.933.437,00
50	SMK N 1 PANJATAN	0,00			0,00
51	SMK N 1 PENGASIH	737.615,00			737.615,00
52	SMK N 1 GIRISUBO	2.038.279,00			2.038.279,00
53	SMK N 1 TANJUNGSARI	746.053,00			746.053,00
54	SMK N 1 WONOSARI	1.195.821,00	9,00		1.195.812,00
55	SMK N 2 GEDANGSARI	-			
56	SMK N 1 CANGKRINGAN	32.167.457,00	10.968,00	32.157.489,00	
57	SMK N 1 KALASAN	0,00			
58	SMK N 2 DEPOK	177.244.779,00		166.668.603,00	10.576.176,00
59	SMK N 2 GODEAN	3.994.580,00			3.994.580,00
	TOTAL	3.061.988.744,00	750.780.390,00	2.256.200.215,00	55.008.139,00

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Rp9.660.448.641,76

Rp3.188.369.849,55

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.660.448.641,76 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Rp206.956.500,00

Rp195.471.700,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp206.956.500,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada DPPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp158.462.500,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp48.494.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	UPTD	Saldo Akhir 31-12-2017	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2018
1.	Piutang PKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	34.675.500,00	3.601.400,00	3.271.000,00	35.005.900,00
	KPPD di Kab. Bantul	36.874.700,00	12.810.000,00	1.403.000,00	48.281.700,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	7.508.100,00	3.486.500,00	5.181.600,00	5.813.000,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
	KPPD di Kab. Sleman	61.350.400,00	2.583.000,00	130.500,00	63.802.900,00
	Jumlah	145.967.700,00	22.480.900,00	9.986.100,00	158.462.500,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	UPTD	Saldo Akhir 31-12-2017	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2018
2.	Piutang BBNKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	9.795.000,00	0,00	200.000,00	9.595.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	2.300.000,00	1.490.000,00	2.300.000,00	1.490.000,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	0,00	0,00	0,00	0,00
	KPPD di Kab. Sleman	35.354.000,00	0,00	0,00	35.354.000,00
	Jumlah	49.504.000,00	1.490.000,00	2.500.000,00	48.494.000,00
	Jumlah Total	195.471.700,00	23.970.900,00	12.486.100,00	206.956.500,00

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.71
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	(BBNKB)	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	22.480.900,00	1.490.000,00	23.970.900,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	33.923.200,00	7.706.000,00	41.629.200,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	70.291.400,00	38.571.000,00	108.862.400,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	31.767.000,00	727.000,00	32.494.000,00
	Jumlah	158.462.500,00	48.494.000,00	206.956.500,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Rp322.737.873,21

Rp5.250.600,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp322.737.873,21 merupakan:

- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Balai PISAM) sebesar Rp317.487.873,21 dengan kondisi lancar.

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil

Rp800.000.000,00

Rp0,00

Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp800.000.000,00 merupakan deviden PT. Taru Martani Tahun 2017 yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q DPPKA pada Tahun 2018 akan tetapi baru disetorkan pada tanggal 15 Januari 2019 sehingga posisi per 31 Desember 2018 merupakan Piutang kepada PT. Taru Martani.

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-lain PAD
Yang Sah

Rp8.330.754.268,55

Rp2.979.686.849,55

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.330.754.268,55 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp235.568.281,55, Piutang Denda Pajak sebesar Rp64.383.150,00, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00, Piutang BLUD sebesar Rp6.798.552.501,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah-Lainnya sebesar Rp1.230.200.336,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.72
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	SKPD	Saldo Awal 31-12-2017	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2018
1.	PPKD				
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	246.578.281,55	0,00	11.010.000,00	235.568.281,55
	Jumlah	246.578.281,55			235.568.281,55
2.	DPPKA				
	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	56.181.450,00	9.584.700,00	1.383.000,00	64.383.150,00
	Jumlah	58.231.450,00			66.433.150,00
3.	RS Ghrasia				
	Piutang BLUD	2.221.853.514,00	16.470.986.984,00	15.177.349.307,00	3.524.788.191,00
	Jumlah	2.221.853.514,00			3.524.788.191,00
4.	BLPT				
	Piutang BLUD	136.915.479,00	0,00	18.000.000,00	118.915.479,00
	Jumlah	136.915.479,00			118.915.479,00
5.	Balai PISAM				
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	316.108.125,00	1.230.200.336,00	316.108.125,00	1.230.200.336,00
	Jumlah	316.108.125,00			1.230.200.336,00
6.	RESPIRA				
	Piutang BLUD	0,00	3.154.848.831,00	0,00	3.154.848.831,00
	Jumlah	0,00			3.154.848.831,00
	Jumlah Total	2.979.686.849,55			8.330.754.268,55

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp235.568.281,55

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp235.568.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2018 dengan kondisi macet.

b. Piutang Denda Pajak sebesar Rp64.383.150,00

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp64.383.150,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada DPPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

c. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00.

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada DPPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

d. Piutang BLUD sebesar Rp6.798.552.501,00

Piutang BLUD sebesar Rp6.798.552.501,00 terdiri dari Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp118.915.479,00, Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp3.524.788.191,00, dan Piutang BLUD RS Respira sebesar Rp3.154.848.831,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp3.524.788.191,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp600.241.807,00, Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp2.845.337.384,00 dan Piutang Diklat sebesar Rp79.209.000,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31-12-2017	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2018
Piutang Pasien Umum	600.241.807,00	0,00	0,00	600.241.807,00
Piutang Diklat	64.216.000,00	79.209.000,00	64.216.000,00	79.209.000,00
Piutang Jamkes	1.551.699.707,00	16.470.986.984,00	15.177.349.307,00	2.845.337.384,00
Piutang Lainnya	5.696.000,00	0,00	5.696.000,00	0,00
Jumlah	2.221.853.514,00	16.550.195.984,00	15.247.261.307,00	3.524.788.191,00

Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	1.453.839.734,00
Kurang Lancar	1.424.353.676,00
Diragukan	11.934.000,00
Macet	634.660.781,00
Jumlah	3.524.788.191,00

e. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp1.230.200.336,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp1.230.200.336,00 merupakan Kekurangan Pembayaran Air Curah Pemakaian bulan September 2018 dan piutang tagihan penjualan air curah bulan Desember 2018 pada Balai PISAM kepada PDAM Bantul dan PDAM Sleman. Piutang Penjualan Air Curah tersebut jatuh tempo pembayarannya adalah bulan Januari dan Februari 2019.

5.3.1.1.2.5 Piutang Pendapatan Lainnya

Rp0,00

Rp7.960.700,00

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Piutang Lain-Lain

Rp1.139.289.165,00

Rp892.538.707,50

Saldo Piutang Lainnya Pemda DIY per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.139.289.165,00 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2018, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan bekerja sama dengan PUSKUD dan BULOG dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada PUSKUD dan BULOG sampai dengan 31 Desember 2018 masing-masing sebanyak 160.746,70 kg dan 31.875 kg. Tanggal 31 Desember 2018 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.73
Rincian Perhitungan Piutang Lainnya

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras	Total Opname Persediaan	Selisih Kurang
1.	PUSKUD	160.746,70 kg	40.187 kg	120.559,70
2.	BULOG	31.875 kg	31.875 kg	0
	Jumlah	192.621,70 kg	72.062 kg	120.559,70

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2018, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2018 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan.

Nilai Piutang Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.139.289.165,00 (120.559,70 kg x Rp9.450,00).

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang **Rp(1.307.253.089,82)** **Rp(1.029.252.385,12)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp(1.307.253.089,82) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(91.207.974,50), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(5.250.000,00), Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(4.000.000,00) dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(1.206.795.115,32) dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah **Rp(91.207.974,50)** **Rp(49.725.695,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(91.207.974,50) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(70.417.425,00) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(20.790.550,00) pada DPPKA.

Tabel 5.74
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang	
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)
0 – 1 Tahun	Lancar	112.405,00	7.450,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	3.392.320,00	770.600,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	35.145.700,00	19.285.500,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	31.767.000,00	727.000,00
	Jumlah	70.417.425,00	20.790.550,00

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi **Rp(5.250.000,00)** **Rp(5.250.000,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp(5.250.000,00) merupakan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp(4.000.000,00)** **Rp(0,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp(4.000.000,00) merupakan penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berupa deviden tahun 2017 PT. Taru Martani yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q DPPKA pada tahun 2018.

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah **Rp(1.206.795.115,32)** **Rp(974.276.689,62)**

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar Rp(1.206.795.115,32) terdiri dari:

Tabel 5.75
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
a.	PPKD	235.568.281,55	Macet	235.568.281,55
b.	RS Ghrasia	1.453.839.734,00	Lancar	7.269.198,67
		1.424.353.676,00	Kurang Lancar	142.435.367,60
		11.934.000,00	Diragukan	5.967.000,00
		634.660.781,00	Macet	634.660.781,00
	Jumlah	3.524.788.191,00		790.332.347,27
c.	BLPT	118.915.479,00	Macet	118.915.479,00
	Jumlah	118.915.479,00		118.915.479,00
d.	RESPIRA	3.154.848.831,00	Lancar	15.774.244,00
	Jumlah	3.154.848.831,00		15.774.244,00
e.	DPPKA			
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	9.584.700,00	Lancar	47.925,50
		2.693.900,00	Kurang Lancar	269.390,00
		16.534.200,00	Diragukan	8.267.100,00
		35.570.350,00	Macet	35.570.350,00
		64.383.150,00		44.154.763,50
	Jumlah	66.433.150,00		46.204.763,50
	Total	7.100.553.932,55		1.206.795.115,32



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka **Rp680.034.072,69** **Rp515.620.196,48**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp680.034.072,69 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp588.664.437,99 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp91.369.634,70 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka **Rp588.664.437,99** **Rp509.454.889,83**

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp588.664.437,99 merupakan saldo awal Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp509.454.889,83 ditambah dengan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2018 sebesar Rp1.271.375.857,19 dikurangi dengan Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp682.711.419,20.

Premi Asuransi Tahun 2018 sebesar Rp1.271.375.857,19 merupakan:

1. Premi Asuransi Kebakaran dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp339.990.113,59 dengan masa pertanggung jawaban mulai 18 Juni 2018 sampai dengan 18 Juni 2019
2. Premi Asuransi Gempa Bumi dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp290.074.128,60 dengan masa pertanggung jawaban 18 Juni 2018 – 18 Juni 2019.
3. Premi Asuransi Kendaraan Dinas dibayarkan kepada PT. Asuransi Bintang Yogyakarta sebesar Rp641.311.615,00 dengan masa pertanggung jawaban 18 Juni 2018 – 18 Juni 2019.

Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp588.664.437,99 adalah sebagai berikut:

1. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kebakaran kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp157.420.079,99 dengan masa masa manfaat mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 18 Juni 2019.
2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Gempa Bumi kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia sebesar Rp134.308.295,16 dengan masa manfaat 1 Januari 2019 sampai dengan 18 Juni 2019.
3. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan Dinas kepada PT. Asuransi Bintang Yogyakarta sebesar Rp296.936.062,84 dengan masa manfaat 1 Januari 2019 sampai dengan 18 Juni 2019.

5.3.1.1.5.1 Beban Sewa Dibayar Dimuka **Rp91.369.634,70** **Rp6.165.306,65**

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp91.369.634,70 merupakan Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan RS Ghriadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kecamatan Temon Kulon Progo yang belum dimanfaatkan sampai dengan 31 Desember 2018. Nilai sewa ruangan kantor milik Pemdes Palihan Kecamatan Temon Kulon Progo tersebut sebesar Rp4.000.000,00 dengan periode sewa 1 April 2018 – 31 Maret 2019. Sewa periode 1 April 2018 – 31 Desember 2018 telah diakui sebagai Beban Sewa sebesar Rp3.013.698,63 sedangkan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

nilai sewa periode 1 Januari – 31 Maret 2019 merupakan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp986.301,37.

2. RS Ghrasia

Beban Sewa Dibayar Dimuka merupakan pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 28 Agustus 2018 - 28 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp90.383.333,33.

5.3.1.1.6 Persediaan

Rp174.973.101.442,49

Rp107.462.005.480,88

Saldo Persediaan sebesar Rp174.973.101.442,49 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 35 OPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Rincian Persediaan per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	28.530.299.158,14	15.466.871.992,88
2	Dinas Kesehatan	7.096.872.651,00	4.403.896.331,00
3	RS Ghrasia	1.704.547.569,50	1.209.759.538,00
4	RS Paru Respira	4.109.971.934,00	3.730.636.563,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	78.867.848.984,00	34.048.247.318,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	7.663.550,00	2.087.325.500,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.674.175,00	10.478.600,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.928.625,00	29.166.900,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.155.000,00	159.935.500,00
10	Dinas Sosial	256.216.480,00	194.767.825,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	346.119.710,00	232.198.600,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	21.432.300,00	16.881.110,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	694.169.700,00	727.781.675,00
14	Badan Lingkungan Hidup	122.340.500,00	139.851.800,00
15	Dinas Perhubungan	338.676.600,00	564.019.930,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.304.280,00	93.000.950,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	54.270.600,00	78.060.100,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	5.588.200,00	21.243.475,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	17.349.300,00	1.317.420,00
20	Dinas Kebudayaan	42.099.509.213,85	30.799.408.486,00
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	155.314.785,00	290.081.765,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	710.813.369,00	1.162.920.905,00
23	Dinas Pariwisata	67.188.000,00	2.210.050.000,00
24	Dinas Pertanian	4.226.472.491,00	4.376.093.358,00
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	239.465.330,00	147.196.200,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	836.629.248,00	737.627.875,00
27	Sekretariat Daerah	301.039.030,00	345.145.750,00
28	Sekretariat Paramparapraja	-	86.000,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	257.917.246,00	262.239.167,00
30	Sekretariat DPRD	294.843.522,00	279.935.773,00
31	Inspektorat	151.712.992,00	214.497.575,00
32	Badan Perencanaan Daerah	536.947.475,00	533.748.825,00
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.579.501.974,00	2.791.288.274,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	72.197.450,00	76.707.250,00
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	18.120.000,00	19.537.150,00
	Jumlah	174.973.101.442,49	107.462.005.480,88

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Tabel 5.77
Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1.	Barang Konsumsi	21.009.608.307,14	13.252.239.241,01
2.	Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	21.978.069.297,00	13.908.973.615,72
3.	Amunisi	0,00	0,00
4.	Bahan Untuk Pemeliharaan	2.364.301.944,50	1.730.067.971,61
5.	Suku Cadang	289.791.128,00	325.187.487,00
6.	Pita Cukai dan Leges	31.835.000,00	59.005.500,00
7.	Bahan Baku	5.135.785.804,00	5.536.671.179,62
8.	Barang Dalam Proses/Setengah Jadi	611.008.020,00	521.676.000,00
9.	Tanah/Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.546.333.527,85	66.851.861.155,92
10.	Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.310.274.014,00	4.563.762.705,00
11.	Persediaan Untuk Strategis	696.094.400,00	709.560.625,00
	Jumlah	174.973.101.442,49	107.462.005.480,88

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp174.973.101.442,49 termasuk Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan persediaan beras yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 72.062 kg dengan rincian dititipkan pada Gudang Puskud Mataram sebanyak 40.187 kg dan Gudang Bulog Yogyakarta sebanyak 31.875 kg dengan nilai sebesar Rp680.985.900,00. Pada saat dilakukan opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Persediaan Cadangan Pangan

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras	Total Opname Persediaan	Selisih Kurang
1.	PUSKUD	160.746,70 kg	40.187 kg	120.559,70
2.	BULOG	31.875 kg	31.875 kg	0,00
	Jumlah	192.621,70 kg	72.062 kg	120.559,70

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala BKPP dengan Puskud Mataram, atas penitipan cadangan beras pada Gudang Puskud Mataram, PUSKUD mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan,

sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Dengan demikian nilai persediaan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

cadangan beras per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp680.985.900,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	PUSKUD	40.187 kg	9.450,00	379.767.150,00
2.	BULOG	31.875 kg	9.450,00	301.218.750,00
	Jumlah	72.062 kg		680.985.900,00

Selain itu saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp174.973.101.442,49 termasuk Persediaan Obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp116.273.870,00 dan Persediaan Bahan Pakai Habis Medis sebesar Rp88.956.056,00.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang Rp1.009.591.307.747,22 Rp956.276.708.789,64

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.009.591.307.747,22 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Rp10.694.117.580,00 Rp11.655.647.912,00
Non Permanen – Dana
Bergulir

Investasi Non Permanen sebesar Rp10.694.117.580,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2018. Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.694.117.580,00 berasal dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.655.647.912,00 ditambah dengan Dana Bergulir Tahun 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan koreksi sebesar Rp400,00 serta dikurangi dengan pelunasan dan koreksi sebesar Rp2.961.530.732,00. Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80
Mutasi Dana Bergulir

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 31-12-2018 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
1	Dinas Pertanian							
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	0,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00		0,00	290.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	252.500.000,00		7.500.000,00	245.000.000,00	
	Jumlah		8.420.000.000,00	549.250.000,00		14.250.000,00	535.000.000,00	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 31-12-2018 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan							
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	150.000.000,00		0,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	DPM LUEP	2011	3.589.417.900,00	1.747.996.750,00		164.000.000,00	1.583.996.750,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Jumlah		14.459.417.900,00	1.897.996.750,00		164.000.000,00	1.733.996.750,00	
3	Dinas Koperasi dan UKM							
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	97.822.098,00		2.400.000,00	95.422.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	638.693.242,00		7.500.000,00	631.193.242,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	113.000.000,00		6.500.000,00	106.500.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	55.000.000,00		0,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00		0,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00		0,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00		0,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	172.734.227,00		3.400.000,00	169.334.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun
	Prospek Mandiri Campus Entrepreneur	2009	200.000.000,00	58.615.598,00		3.000.000,00	55.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00		0,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	172.320.582,00		3.263.000,00	169.057.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	243.812.400,00		3.100.000,00	240.712.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	402.736.502,00		0,00	402.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.908.900,00	400,00	0,00	184.909.300,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 31-12-2018 (Rp)	Keterangan
					Penambahan	Pengurangan		
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	177.392.978,00		63.516.500,00	113.876.478,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	2.029.155.635,00		1.153.008.932,00	876.146.703,00	
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	2.897.909.000,00		1.029.196.700,00	1.868.712.300,00	
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00		508.395.600,00	1.016.604.400,00	
	Jumlah		31.732.100.000,00	9.074.901.162,00	400,00	2.783.280.732,00	6.291.620.830,00	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Fasilitasi Dana Bergulir	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00			133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun
	Jumlah		2.915.000.000,00	133.500.000,00			133.500.000,00	
6	BUKP	2018	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL		59.526.517.900,00	11.655.647.912,00	2.000.000.400,00	2.961.530.732,00	10.694.117.580,00	

Mutasi tambah sebesar Rp2.000.000.400,00 merupakan penambahan Dana Bergulir melalui BUKP sebesar Rp2.000.000.000,00 dan koreksi Dana Bergulir Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2012 pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp400,00. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan pelunasan dana bergulir periode sebelumnya.

Mutasi kurang sebesar Rp2.961.530.732,00 berasal dari pelunasan pokok dana bergulir sebesar Rp2.952.196.932,00 dan koreksi sebesar Rp9.333.800,00. Pelunasan pokok dana bergulir sebesar Rp2.952.196.932,00 terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp14.250.000,00, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pangan sebesar Rp164.000.000,00 dan Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.773.946.932,00. Koreksi sebesar Rp9.333.800,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan pelunasan pokok dana bergulir periode sebelumnya meliputi Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) Tahun 2008 sebesar Rp1.000.000,00, Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2013 sebesar Rp4.167.100,00 dan Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi Tahun 2016 sebesar Rp4.166.700,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.694.117.580,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya dikelompokkan menjadi:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.81
Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	5.761.463.403,00
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	745.069.720,00
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	828.358.202,00
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.359.226.255,00
	Jumlah	10.694.117.580,00

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp**3.876.719.645,02** sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp6.817.397.935,00 (Rp10.694.117.580,00 – Rp**3.876.719.645,02**).

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir antara lain diatur sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- b. SKPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- c. Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- d. Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- e. Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala SKPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- f. Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
- g. Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- h. Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- i. Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**5.3.1.2.2 Dana Bergulir
Diragukan Tertagih**

Rp(3.876.719.645,02)

Rp(3.417.883.366,2)

Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.876.719.645,02 dikelompokkan berdasarkan umurnya dan ditentukan prosentasenya sebagai berikut :

**Tabel 5.82
Klasifikasi Kualitas Dana Bergulir dan Diragukan Tertagih**

No	Kelompok	Nilai Perolehan (Rp)	% Penyisihan	Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	5.761.463.403,00	0,5%	28.807.317,02
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	745.069.720,00	10%	74.506.972,00
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	828.358.202,00	50%	414.179.101,00
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.359.226.255,00	100%	3.359.226.255,00
	Jumlah	10.694.117.580,00		3.876.719.645,02

Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan mendasarkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.83
Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih**

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
1	Dinas Pertanian								
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	0,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2010	8 tahun 11 hari	100%	0,00
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	290.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2011	7 tahun 11 hari	100%	290.000.000,00
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	245.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2012	6 tahun 11 hari	100%	245.000.000,00
	Jumlah			535.000.000,00					535.000.000,00
2	BKPP								
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20- Dec-13	5Tahun 11 hari	100%	150.000.000,00
	DPM LUEP	2011	3.589.417.900,00	1.583.996.750,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2008 dan 20 Des 2009	9-10 tahun	100%	1.583.996.750,00
	Jumlah		14.459.417.900,00	1.733.996.750,00					1.733.996.750,00
3	Dinas Perindagkop dan UKM								



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	95.422.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun		>9 Tahun	100%	95.422.098,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	631.193.242,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun	2016	2	10%	63.119.324,20
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	106.500.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	8 Tahun	100%	106.500.000,00
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	8 Tahun	100%	55.000.000,00
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	8 Tahun	100%	50.800.000,00
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	7 Tahun	100%	80.000.000,00
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	7 Tahun	100%	25.000.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	169.334.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	7 Tahun	100%	169.334.227,00
	Prospek Mandiri Campus Entrepreneur	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2012	6 tahun	100%	55.615.598,00
	Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	5 Tahun	100%	150.000.000,00
	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	169.057.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	5 Tahun	100%	169.057.582,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	240.712.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2014	4 Tahun	50%	120.356.200,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	402.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2014	4 Tahun	50%	201.368.251,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2015	< 4 Tahun	50%	92.454.650,00
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	113.876.478,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2016	2	10	11.387.647,80
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	876.146.703,00		2019	< 1 Tahun	0,5	4.380.733,52
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	1.868.712.300,00		2020	< 1 Tahun	0,5	9.343.561,50
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	1.016.604.400,00		2020	< 1 Tahun	0,5	5.083.022,00
	Jumlah			6.291.620.830,00					1.464.222.895,02



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	SKPD Teknis>Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal Pengguliran (Rp)	Saldo 31-12-2017 (Rp)	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih	
								%	Rp.
4	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Fasilitasi Dana Bergulir	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Des 2013	5 Tahun	100%	133.500.000,00
	Jumlah			133.500.000,00					
5.	BUKP	2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			< 1 Tahun	0,5	10.000.000,00
	JUMLAH TOTAL			10.694.117.580,00					3.876.719.645,02

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp1.002.773.909.812,24 Rp948.038.944.243,84

Penyertaan Modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.002.773.909.812,24 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2017 sebesar Rp948.038.944.243,84 dikurangi penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2017 sebesar Rp10.000.636.578,39 sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2017 Bagian Pemda DIY menjadi Rp938.038.307.665,45, ditambah penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp20.000.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2017 yang disetor ke BUD Tahun 2018 sebesar Rp85.097.737.606,37 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2018 Bagian Pemda DIY sebesar Rp129.618.474.613,16 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.84
Perhitungan Penyertaan Modal**

No	Perusahaan Daerah	Perhitungan Penyertaan Modal 2017			Mutasi Tahun Anggaran 2018					Penyertaan Modal 2018 (Unaudited)
		% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2017 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD Bagian Pemda DIY	Tambahan Modal Disetor Tahun 2018	Deviden Tahun 2017 yang Disetor ke BUD Tahun 2018	Laba/Rugi BUMD Tahun 2018 (LK BUMD Unaudited)	Laba/Rugi BUMD Tahun 2018 Bagian Pemda DIY	% Saham Pemda	
1	2	3	4 = 2 x 3	6	8	9	10 = 7 x 9		11 = 1+5+6-8+10	
	METODE EKUITAS									
1	PT. Bank BPD DIY	51,00	1.646.921.866.992,00	839.930.152.165,92	20.000.000.000,00	79.201.315.077,80	223.102.300.139,00	113.782.173.070,89	51,00	894.511.010.159,01
2	PT. Anindya Mitra Internasional	99,951	39.265.223.260,15	39.245.983.300,75	-	1.089.717.200,00	6.823.241.286,83	6.819.897.898,60	99,951	44.976.163.999,35
3	PT. Tarumartani	99,996	18.874.909.196,00	18.874.154.199,63	-	0,00	312.707.883,00	312.695.374,68	99,996	19.186.849.574,32
4	BUKP	83,131	47.308.486.604,45	39.328.017.999,15	-	4.591.840.188,57	10.469.870.769,01	8.703.708.268,99	83,131	43.439.886.079,57
	METODE HARGA PEROLEHAN									
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	0,130		660.000.000,00	-	214.865.140,00				660.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA			938.038.307.665,45	20.000.000.000,00	85.097.737.606,37	240.708.120.077,84	129.618.474.613,16		1.002.773.909.812,24



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2018 sebesar Rp894.511.010.159,01. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2018 Audited		Rp 848.656.533.244,52
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2017 Audited		Rp (8.726.381.078,60)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2017		<u>Rp 839.930.152.165,92</u>
Tambahan Modal		Rp 20.000.000.000,00
Deviden Tahun 2017 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2018		Rp (79.201.315.077,80)
Laba Tahun 2018	Rp223.102.300.139,00	
Laba Tahun 2018 Bagian Pemda DIY	51,00%	Rp 113.782.173.070,89
Penyertaan Modal Pemda DIY per		<u>Rp 894.511.010.159,01</u>

31 Desember 2018

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. "ANINDYA" MITRA INTERNASIONAL" Yogyakarta per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.976.163.999,35. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2017 Audited		Rp 39.416.198.528,56
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2017 Audited		Rp (170.215.227,81)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2017		<u>Rp 39.245.983.300,75</u>
Tambahan Modal		Rp -
Deviden Tahun 2017 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2018		Rp (1.089.717.200,00)
Laba Tahun 2018	Rp6.823.241.286,83	
Laba Tahun 2018 Bagian Pemda DIY	99,951%	Rp 6.819.897.898,60
Penyertaan Modal Pemda DIY per		<u>Rp 44.976.163.999,35</u>

31 Desember 2018

- c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah "TARU MARTANI" Yogyakarta sebesar Rp19.186.849.574,32. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2017 Audited		Rp 19.274.167.327,44
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2017 Audited		Rp (400.013.127,81)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2017	99,996%	<u>Rp 18.874.154.199,63</u>
Tambahan Modal		Rp 00,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Deviden Tahun 2017 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2018		Rp	(0,00)
Laba Tahun 2018	Rp312.707.883,00		
Laba Tahun 2018 Bagian Pemda DIY	99,996%	Rp	312.695.374,68
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2018		Rp	19.186.849.574,32

Bagian Laba milik Pemda Tahun 2018 baru disetorkan ke rekening Kas Daerah pada tanggal 29 Januari 2019.

- d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp43.439.886.079,57. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2017 Audited		Rp	40.032.045.143,32
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2017 Audited		Rp	(704.027.144,17)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2017	83,131%	Rp	39.328.017.999,15
Tambahan Modal		Rp	00,00
Deviden Tahun 2017 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2018		Rp	(4.591.840.188,57)
Laba Tahun 2018	Rp10.469.870.769,01		
Laba Tahun 2018 Bagian Pemda DIY	83,131%	Rp	8.703.708.268,99
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2018		Rp	43.439.886.079,57

- e. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2018 sebesar Rp660.000.000,00. Selama Tahun 2018 tidak ada penambahan penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut merupakan 0,13% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilainya relatif kecil.

5.3.1.3. **Aset Tetap** **Rp6.926.255.169.643,37** **Rp5.841.395.688.975,67**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.940.582.829.221,68 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp9.849.475.868.658,65 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp2.923.220.699.015,28 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.3.1. **Tanah** **Rp3.088.902.649.956,00** **Rp2.520.611.213.664,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.088.902.649.956,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2017	2.520.611.213.664,00
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2018	362.819.024.678,00
Reklas dari jaringan di SMKN 1 KOKAP	6.800.000,00
Blockgrant SMA N 1 Banguntapan	56.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pelimpahan dari Dikpora Induk	2.517.612.828,00
Reklas dari blj appraisal tanah	1.337.655.000,00
Hibah dr Kementerian PUPR-Pemkab GK	245.602.864.000,00
Reklas dari Aset Tetap Renovasi (Sertifikasi)	28.920.840,00
Pengurangan:	
Pelimpahan ke Baldik GK	2.499.362.828,00
Penghapusan	38.411.325.505,00
Reklas ke ATR	10.840.340,00
Penyesuaian Tanah PBD – Sensus Barang	3.149.112.381,00
Reklas ke JIJ-Instalasi Listrik	6.800.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2018	3.088.902.649.956,00

Aset tetap Tanah diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.85
Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Perkampungan	101.964.960.502,00
2.	Tanah Pertanian	47.637.590.000,00
3.	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00
4.	Kolam Ikan	5.298.402.000,00
5.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.193.298.411.079,00
6.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.737.380.986.375,00
	Jumlah	3.088.902.649.956,00

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.86
Rincian Tanah per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	350.259.113.140,00	350.164.077.220,00
2	Dinas Kesehatan	9.755.699.262,00	9.755.699.262,00
3	RS Grhasia	150.000,00	150.000,00
4	RS Paru Respira	192.400.000,00	192.400.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	1.382.431.512.371,00	1.129.891.047.406,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	348.491.112.360,00	444.286.565.205,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.285.000.000,00	3.285.000.000,00
8	Dinas Sosial	18.369.094.406,00	18.367.393.566,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	923.281.000,00	923.281.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	254.810.000,00	254.810.000,00
11	Badan Lingkungan Hidup	1.392.000.000,00	1.392.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	54.200.577.226,00	55.427.682.226,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	84.735.000,00	84.735.000,00
15	Dinas Kebudayaan	201.572.329.118,00	192.900.808.955,00
16	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.096.500.000,00	2.096.500.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.892.166.000,00	13.891.866.000,00
18	Dinas Pariwisata	3.434.065.500,00	3.458.590.500,00
19	Dinas Pertanian	103.962.567.899,00	103.962.567.899,00
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	33.733.333.080,00	33.716.575.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.939.772.000,00	5.352.563.000,00
22	Sekretariat Daerah	163.420.196.590,00	744.400.000,00
23	Kantor Perwakilan Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
24	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
25	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	364.191.535.004,00	122.441.801.425,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
	Jumlah	3.088.902.649.956,00	2.520.611.213.664,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp1.080.602.847.912,43

Rp915.669.540.069,30

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.080.602.847.912,43 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Rp
1.	Alat-alat Besar Darat	32.588.421.456,49
2.	Alat-alat Besar Apung	2.365.273,43
3.	Alat-alat Bantu	44.981.753.096,99
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	143.380.016.847,04
5.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.450.763.380,70
6.	Alat Angkut Apung Bermotor	546.875.000,00
7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	271.001.666,00
8.	Alat Angkut Bermotor Udara	148.400.000,00
9.	Alat Bengkel Bermesin	52.941.231.172,92
10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	7.480.612.407,04
11.	Alat Ukur	9.120.684.160,92
12.	Alat Pengolahan	9.487.847.479,23
13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.957.277.530,00
14.	Alat Kantor	62.279.988.890,43
15.	Alat Rumah Tangga	207.402.624.785,63
16.	Komputer	206.471.126.743,86
17.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.349.166.093,42
18.	Alat Studio	60.829.626.787,94



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Rp
19.	Alat Komunikasi	31.526.074.985,29
20.	Peralatan Pemancar	3.386.176.403,00
21.	Alat Kedokteran	40.984.449.350,67
22.	Alat Kesehatan	2.617.638.663,33
23.	Unit-Unit Laboratorium	93.718.644.090,36
24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	17.230.657.038,43
25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	7.797.226.463,85
26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.877.634.698,29
27.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	521.011.600,00
28.	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	5.597.907.170,25
29.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.440.450.676,87
30.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.216.781.654,05
31.	Senjata Api	5.353.336.000,00
32.	Persenjataan Non Senjata Api	2.626.876.346,00
33.	Senjata Sinar	5.000.000,00
34.	Alat Keamanan dan Perlindungan	13.200.000,00
	Jumlah	1.080.602.847.912,43

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.88
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	313.079.505.214,20	205.279.936.981,41
2	Dinas Kesehatan	40.498.570.560,00	41.429.118.096,00
3	RS Grhasia	26.439.913.564,00	25.863.966.819,00
4	RS Paru Respira	38.751.079.632,80	39.038.638.162,80
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	73.015.968.022,00	57.715.383.702,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	12.826.187.386,00	12.799.825.116,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.570.417.635,98	2.990.380.333,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.566.724.388,00	7.951.544.388,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.357.189.633,00	24.581.120.793,00
10	Dinas Sosial	25.275.343.200,30	25.657.470.083,28
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.727.209.240,99	21.644.002.254,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	6.163.748.600,00	5.861.689.450,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	5.076.346.290,99	4.974.805.741,00
14	Badan Lingkungan Hidup	7.454.891.500,00	6.651.165.850,00
15	Dinas Perhubungan	30.464.632.607,00	30.791.123.269,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	34.655.863.111,75	27.485.515.831,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.931.298.500,00	1.759.878.500,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.035.414.365,00	1.875.436.330,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.518.214.950,00	2.129.356.607,00
20	Dinas Kebudayaan	66.066.925.474,78	53.343.232.385,00
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	48.266.097.548,90	33.914.624.274,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.664.865.185,18	14.378.424.950,20
23	Dinas Pariwisata	3.523.311.192,00	3.764.561.732,00
24	Dinas Pertanian	27.543.536.718,00	26.174.843.318,00
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	20.540.134.025,98	20.596.574.272,98
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.081.832.372,00	14.753.255.108,00
27	Sekretariat Daerah	51.484.749.759,00	47.236.128.875,00
28	Sekretariat Paramparapraja	2.035.109.982,99	2.088.651.958,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	6.194.598.507,00	5.694.555.507,00
30	Sekretariat DPRD	22.695.120.483,59	27.200.671.783,60
31	Inspektorat	3.611.760.933,00	3.780.346.793,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.892.147.923,00	12.221.904.548,00
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	81.560.339.323,00	82.926.114.472,03
34	Badan Kepegawaian Daerah	13.407.085.337,00	13.052.795.701,00
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.626.714.745,00	8.062.496.085,00
	Jumlah	1.080.602.847.912,43	915.669.540.069,30

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp2.720.687.348.965,05

Rp2.201.763.532.001,90

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar sebesar Rp2.720.687.348.965,05 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Rp
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.553.664.217.164,02
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	61.607.586.984,99
3.	Bangunan Menara	690.928.000,00
4.	Bangunan Bersejarah	7.192.634.599,98
5.	Tugu Peringatan	2.652.145.301,00
6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	3.183.494.808,00
7.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.362.947.694,84
8.	Rambu-Rambu	83.342.075.212,22
9.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	2.991.319.200,00
	Jumlah	2.720.687.348.965,05



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	838.221.263.127,44	639.475.019.876,26
2	Dinas Kesehatan	19.704.143.763,00	19.430.571.763,00
3	RS Grhasia	48.839.773.975,00	48.268.539.338,00
4	RS Paru Respira	25.399.451.085,00	25.399.451.085,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	71.285.337.737,00	47.387.427.045,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	82.008.245.211,98	44.382.194.457,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	279.052.000,00	279.052.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.844.741.658,00	3.482.819.158,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.339.974.350,00	9.339.974.350,00
10	Dinas Sosial	92.582.670.163,67	92.264.925.681,27
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.824.370.968,00	17.847.609.390,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	20.769.094.720,00	20.769.094.720,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	7.422.851.033,00	7.422.851.033,00
14	Badan Lingkungan Hidup	2.900.567.824,00	2.727.493.824,00
15	Dinas Perhubungan	114.953.244.278,22	102.329.399.345,30
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.438.460.536,00	3.885.874.536,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11.482.617.100,00	4.554.687.100,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1.994.553.000,00	1.994.553.000,00
19	Dinas Kebudayaan	157.803.944.738,00	86.737.043.763,00
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	129.146.434.850,81	69.566.220.231,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	67.188.238.449,98	32.893.176.082,00
22	Dinas Pariwisata	24.188.811.330,00	11.161.814.500,00
23	Dinas Pertanian	93.613.974.250,14	52.431.178.976,00
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	35.415.035.321,00	31.132.463.963,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.149.036.175,00	20.075.191.703,00
26	Sekretariat Daerah	30.016.324.987,00	24.505.442.126,00
27	Kantor Perwakilan Daerah	6.174.052.262,00	6.174.052.262,07
28	Sekretariat DPRD	573.710.284.502,00	573.710.284.502,00
29	Inspektorat	929.006.440,00	3.567.630.210,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.956.145.200,00	4.956.145.200,00
31	Aset	167.599.233.808,81	159.508.195.462,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	12.078.976.299,00	11.843.198.299,00
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	23.427.437.821,00	22.259.957.021,00
	Jumlah	2.720.687.348.965,05	2.201.763.532.001,90

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp2.750.548.696.456,89

Rp2.410.091.147.311,65

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.750.548.696.456,89 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Rp
1.	Jalan	1.756.304.353.096,59
2.	Jembatan	320.271.139.246,00
3.	Bangunan Air Irigasi	270.463.286.641,56
4.	Bangunan Air Pasang Surut	340.584.800,00
5.	Bangunan Air Rawa	608.482.460,00
6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.442.534.956,00
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	27.735.497.900,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Rp
8.	Bangunan Air Bersih/Baku	17.099.822.445,52
9.	Bangunan Air Kotor	17.882.196.273,00
10.	Bangunan Air	83.633.537.027,00
11.	Instalasi Air Minum Bersih	7.324.615.726,54
12.	Instalasi Air Kotor	21.444.958.982,00
	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	86.355.000,00
13.	Instalasi Pembangkit Listrik	4.935.452.299,68
14.	Instalasi Gardu Listrik	1.591.220.306,52
15.	Instalasi Pertahanan	129.868.333,34
16.	Instalasi Gas	82.236.666,67
17.	Instalasi Pengaman	8.806.813.293,00
18.	Jaringan Air Minum	109.057.236.467,57
19.	Jaringan Listrik	67.394.343.881,34
20.	Jaringan Telepon	19.868.221.954,56
21.	Jaringan Gas	45.938.700,00
	Jumlah	2.750.548.696.456,89

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.92
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.523.800.101,94	4.016.314.068,51
2	Dinas Kesehatan	1.824.944.910,00	1.616.291.410,00
3	RS Grhasia	2.279.458.941,00	2.251.059.941,00
4	RS Paru Respira	116.411.300,00	116.411.300,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.443.892.517.744,00	2.198.287.435.493,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	70.899.530.334,28	115.503.953.097,47
7	Satuan Polisi Pamong Praja	218.887.000,00	218.887.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.321.020.800,00	668.905.800,00
9	Dinas Sosial	1.215.956.007,67	1.136.866.184,67
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	975.882.400,00	941.032.400,00
11	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	-
12	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	93.803.654,00	93.803.654,00
13	Badan Lingkungan Hidup	9.496.877.311,00	7.709.246.000,00
14	Dinas Perhubungan	9.965.556.986,00	7.413.367.106,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.176.245.032,00	19.176.245.032,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	70.235.000,00	70.235.000,00
17	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	168.068.000,00	168.068.000,00
18	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	26.589.900,00	26.589.900,00
19	Dinas Kebudayaan	254.351.600,00	254.351.600,00
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.169.140.027,00	72.729.500,00
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	112.463.894.248,00	17.064.533.035,00
22	Dinas Pariwisata	8.493.889.350,00	83.989.000,00
23	Dinas Pertanian	6.609.155.660,00	7.074.533.520,00
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12.809.724.548,00	12.086.185.768,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.452.968.800,00
26	Sekretariat Daerah	9.202.411.100,00	153.180.000,00
27	Kantor Perwakilan Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
28	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	522.131.759,00
29	Inspektorat	38.702.500,00	38.702.500,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
31	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.130.407.850,00	4.912.832.850,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	690.370.114,00	690.370.114,00
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.328.595.979,00	1.152.759.979,00
	Jumlah	2.750.548.696.456,89	2.410.091.147.311,65

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp189.999.027.197,88

Rp181.065.042.944,12

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp189.999.027.197,88 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Rp
1.	Buku	89.260.305.597,18
2.	Terbitan	144.138.529,94
3.	Barang-Barang Perpustakaan	711.661.614,59
4.	Barang Bercorak Kebudayaan	27.720.702.761,75
5.	Alat Olah Raga Lainnya	590.468.233,41
6.	Hewan	2.095.884.175,00
7.	Tanaman	1.680.150.951,00
8.	Aset Tetap Renovasi	67.795.715.335,00
	Jumlah	189.999.027.197,88



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	89.361.756.269,87	65.614.231.276,72
2	Dinas Kesehatan	192.879.304,00	192.879.304,00
3	RS Grhasia	318.056.370,00	316.997.560,00
4	RS Paru Respira	62.771.600,00	62.771.600,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	39.284.017.550,00	23.379.500.340,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	18.751.949.230,00	40.886.574.060,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	245.340.880,00	245.340.880,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	16.059.900,00	15.059.900,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.528.000,00	27.128.000,00
10	Dinas Sosial	573.519.287,00	592.602.769,40
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	41.418.900,00	41.418.900,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	20.525.980,00	20.525.980,00
14	Badan Lingkungan Hidup	981.457.536,00	969.020.536,00
15	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.835.001,00	49.260.001,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.700.000,00	4.200.000,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	5.224.900,00	5.224.900,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7.982.800,00	7.796.000,00
20	Dinas Kebudayaan	8.122.707.216,00	15.214.691.231,00
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	9.721.081.256,00	9.391.882.256,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	225.486.000,00	4.164.843.500,00
23	Dinas Pariwisata	1.240.906.711,00	1.240.906.711,00
24	Dinas Pertanian	2.197.339.975,00	2.273.010.075,00
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	116.441.651,00	116.441.651,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.217.246.870,00	32.301.870,00
27	Sekretariat Daerah	10.910.693.568,00	10.761.750.168,00
28	Sekretariat Parampara Praja	7.365.700,00	3.781.000,00
29	Kantor Perwakilan Daerah	3.161.440.650,00	3.161.440.650,00
30	Sekretariat DPRD	801.630.302,01	756.751.752,00
31	Inspektorat	37.427.461,00	48.448.763,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.199.040,00	282.568.140,00
33	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	258.537.190,00	265.761.070,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	719.309.750,00	747.741.750,00
	Jumlah	189.999.027.197,88	181.065.042.944,12

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp189.999.027.197,88 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp67.795.715.335,00. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp67.795.715.335,00 terdiri dari aset tetap yang digunakan SKPD tetapi milik SKPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp19.974.463.500,00 dan aset tetap yang digunakan oleh SKPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp74.131.598.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Data Aset Tetap Renovasi

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	5.782.504.600,00	Jembatan milik kabupaten sebesar Rp5.699.173.300,00 dan Bangunan gedung milik Kementerian PU sebesar Rp83.331.300,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	45.664.383.055,00	Jalan milik kabupaten sebesar Rp23.826.572.850,00, Jalan milik DPU DIY sebesar Rp19.346.750.500,00, Gedung milik Biro Umum sebesar Rp167.738.000,00, dan Bangunan Toilet Titik Nol sebesar Rp152.279.000,00,
4.	Dinas Kebudayaan	2.382.585.000,00	Bangunan Gedung milik Pemkab. Kulon Progo
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	188.294.000,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo
6.	Dinas Pariwisata	1.206.132.711,00	Bangunan Gedung milik Kementerian PU.
7.	Sekretariat Daerah		
	• Biro Umum dan Protokol	10.380.487.069,00	Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta
8.	Kantor Perwakilan Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik SETNEG
10.	Dinas Komunikasi dan Informasi	48.075.000,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum
	Jumlah	67.795.715.335,00	

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp18.735.298.170,40

Rp328.726.327.899,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.735.298.170,40 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2017	328.726.327.899,40
Penambahan:	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018	125.281.291.134,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018	888.387.500,00
Pengurangan:	
Reklas ke Gedung Bangunan	404.920.244.162,00
Reklas ke JIJ	15.754.931.021,00
Reklas ke Peralatan Mesin	13.926.103.904,00
Reklas ke aset Tetap Lainnya	952.854.687,00
Koreksi pencatatan	606.574.589,00
Saldo akhir per 31 Desember 2018	18.735.298.170,40

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam beberapa SKPD berikut ini:

**Tabel 5.96
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.705.664.170,40	141.178.499.894,40
2	Dinas Kebudayaan	12.999.100.500,00	51.347.058.000,00
3	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	14.833.500,00	-
4	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	40.965.932.100,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	95.234.837.905,00
6	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	-
	Jumlah	18.735.298.170,40	328.726.327.899,40



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.705.664.170,40 terdiri dari Pembangunan Talud Bumi Perkemahan Babarsari sebesar Rp1.820.147.337,00, Pembangunan Gedung Akademi Komunitas A sebesar Rp2.231.290.315,00, Pembangunan Gedung Akademi Komunitas B sebesar Rp48.009.500,00, Pembangunan Gedung SLB Pembina sebesar Rp98.075.000,00, serta Pembangunan Gedung di SMA dan SMK sebesar Rp1.508.142.018,40.

b. Dinas Kebudayaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp12.999.100.500,00 terdiri dari pembangunan Taman Budaya oleh Dinas Pekerjaan Umum perumahan dan Kawasan pemukiman Kabupaten Gunung Kidul selaku KPA Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan sebesar Rp12.999.100.500,00.

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp14.833.500,00 merupakan DED pembangunan KPPD Gunung Kidul.

d. Dinas Pariwisata

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.700.000,00 berupa DED pembangunan Lanskap Gedung.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **Rp(2.923.220.699.015,28)** **Rp(2.716.531.114.914,69)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(2.923.220.699.015,28) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Jumlah
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(625.978.512.747,57)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(759.510.605.833,93)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.533.710.504.796,25)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.021.075.637,53)
	Jumlah	(2.923.220.699.015,28)

5.3.1.4. Dana Cadangan **Rp0,00** **Rp0,00**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.3.1.5. Aset Lainnya **Rp539.411.811.278,14** **Rp501.898.569.556,11**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp539.411.811.278,14 meliputi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **Rp233.825.570.058,91** **Rp231.184.287.701,77**

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp233.825.570.058,91 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp263.179.125.915,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(29.353.555.857,02) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

No	Nama SKPD	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	BGS	Pinjam Pakai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	565.819.308,00	608.885.649,00			(355.978.331,19)	818.726.625,81
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00				(600.769.926,24)	1.647.713.825,76
3	Dinas Perhubungan	39.065.214.545,00				(41.507.420,00)	39.023.707.125,00
	Dinas Sosial	2.950.084,00				-	2.950.084,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.645.744.209,00				(1.946.478.078,88)	6.699.266.130,12
5	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan	120.869.854.232,00		3.518.000.000,00	84.676.599.599,00	(25.476.156.631,82)	183.588.297.199,26
6	Kantor Perwakilan Daerah	2.911.574.537,93				(866.665.468,97)	2.044.909.068,96
	Jumlah	174.309.640.667,93	608.885.649,00	3.518.000.000,00	84.676.599.599,00	(29.287.555.857,10)	233.825.570.058,91

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:

a. Sewa sebesar Rp174.309.640.667,93

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2018 sebesar Rp174.309.640.667,93 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa SKPD berikut:

Tabel 5.99
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	565.819.308,00	Hotel Edotel	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	Bangunan Mess Kaliurang Gedung Wisma Kaliurang	Masyarakat umum
3.	Dinas Perhubungan	39.065.214.545,00	Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto	PT. Angkasa Pura
4.	Dinas Sosial	2.950.084,00	Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta	BUKP Gondokusuman
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.645.744.209,00	Bangunan Rusunawa Ledok Code	Masyarakat umum



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
			Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP)	Pegawai dan masyarakat umum
			Rumah Dinas Randubelang	
6.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	118,946,461,132.00	Tanah dan bangunan eks pabrik sabut di Pengasih Kulon Progo	PT. Formula Land
			Tanah dan Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan, Jl. Malioboro 14 Yogyakarta	PT. Bank BPD DIY
			Tanah, Dlaban, Sentolo, Kulonprogo	PT. Amarta Karya
			Tanah dan bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun
			Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji 45 Yk	Yayasan Wira Husada Stikes
			Tanah dan bangunan Eks Gudang pangan, Jl. Abubakar Ali No 2 Yogyakarta	Sunarti
			Tanah dan bangunan, Bekas OG No 16, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemerintah Desa Sumbermulyo
			Tanah, Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Perguruan Dana Pala Sleman
			Tanah, Srimulya, Piyungan, Bantul	Pemkab. Bantul
			Tanah dan bangunan, D.I. Panjaitan No. 66, Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	dr. Soedarman
			Tanah dan bangunan, Jl. Perwakilan Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki Kulon Progo
			Tanah dan bangunan, Jl.Keldongkiron A.41, Dongkelan, Gedongkiwo, Mantrijeron, YK.	Sri Andayani
			Tanah, JEC	PT. Buanaland Agung
			Tanah dan bangunan, Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera
			Tanah dan bangunan, Jalan Kenari Yogyakarta.	Talenta Body Repair
			Tanah, Patehan Tengah No 25 Kraton, YK	Tien Setiantoro, dkk.
			Tanah dan bangunan, Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi Sri Wahyu
			Tanah dan bangunan, Mrican Baru,Caturtunggal, Depok, Yogyakarta	Ir. Bambang Priambodo
			Tanah dan bangunan, Komplek Colombo Nomor 56 Yogyakarta	Aswin Kumala Darma Saputra
			Tanah, Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo
			Tanah dan bangunan, Jalan D.I. Panjaitan No. 70, Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta.	Early Childhood Care andDevelopment Resource Center(ECCD-RC)
			Eks Tanah Kas Desa Wates, (71 Bidang Tanah)	Pemkab. Kulon Progo



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
			Tanah dan bangunan, Jalan Sriti Nomor 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman.	Lembaga Konsumen Yogyakarta
			Tanah dan bangunan, Glugo, Panggunharjo, Sewon	BADKO TKA TPA
			Tanah, Eks SD Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	Yayasan Amal Insan Mulia
			Tanah dan bangunan, Jl. Kusumanegara Nomor 168E, Yk.	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku).
			Rumah Dinas, Jl. Kusuma Negara 168 H	Sugiyanta. SIP
			Rumah Dinas, Jl. Sriti No 20 C Demangan	Bambang Hermanto
			Rumah Dinas, Jl. DI Panjaitan No 74 MantriJeron	Ny. Muchosin/ Ny Jaenab
			Rumah Dinas, Jl. Gedongan Baru A2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni
			Rumah Dinas, Jl. Gedongan Baru B4 Pelemwulung	Hasan Khoiri Amd
			Sebagian bangunan, KPPD Kulon Progo	
7.	Kantor Perwakilan Daerah	2.911.574.537,93	GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta	Masyarakat umum
			Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum
	Jumlah			

b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp608.885.649,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp608.885.649,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY.

d. Pinjam Pakai sebesar Rp84.742.599.599,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai sebesar Rp84.742.599.599,00 merupakan aset milik Pemda DIY yang dipinjam oleh pihak lain dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.100
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Pinjam Pakai**

No	Uraian	Luas	Alamat	Penggunaan	Nilai Aset
1	Tanah	40.790	Dipan, Wates, Kulon Progo	Ruko, Masjid Agung, Gedung PDHI, PDAM, Pertanian, Pasar Ikan, Burung, Perindag	32.713.580.000,00
2	Tanah	1.512	Kasongan, Bangunjiwo, Bantul	Eks UPT Gerabah	264.600.000,00
3	Tanah	10.040	Kalitirto, berbah, sleman	kantor BPP	502.000.000,00
4	Tanah	2.510	pandowoharjo , sleman	kantor BPP	125.500.000,00
5	Tanah	5.705	pendowoharjo, sleman	kantor BPP	285.250.000,00
6	Tanah	9.510	sumberagung , mayudan, sleman	kantor BPP	475.500.000,00
7	Tanah	6.770	margodadi , sayegan, sleman	kantor BPP	338.500.000,00
8	Tanah	641	Jl Khudori 49, Dipan, Wates, Kulon Progo	Pinjam pakai Kantor Dishub KP	336.525.000,00
9	Tanah	2.885	Jl. Pakuwon beran kidul, tridadi sleman	Komplek Perkantoran DTK	288.500.000,00
10	Tanah	558	Jl. Veteran, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul	Kantor BKD Kab Gunung Kidul	511.178.000,00
11	Tanah	9.910	bimomartani ngemplak ,sleman	kantor BBI	495.500.000,00
12	Tanah	104	gunungketur, Yogyakarta	kantor KUA Kec. pakualaman	83.200.000,00
13	Tanah	2.250	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Kanwil BPN Prov. DIY	1.800.000.000,00
14	Tanah	1.000	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Badan Pusat Statistik Kota Yk.	800.000.000,00
15	Tanah	1.380	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	BNN DIY	1.104.000.000,00
16	Tanah	10.001	sumberrejo semin, Gunung Kidul	kantor BPP/BP2APH	200.020.000,00
17	Tanah	2.145	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	-	1.716.000.000,00
18	Tanah	749	Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Kantor BPBD Kota Yogyakarta	1.761.698.000,00
19	Tanah	2.590	Karangsewu galur kulon Progo	Kantor BPP	103.600.000,00
20	Tanah	10.317	semanu, semanu , Gunung Kidul	kantor BPP	206.340.000,00
21	Tanah	1.720	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	473.000.000,00
22	Tanah	5.520	Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Sawah BPP	276.000.000,00
23	Tanah	2.755	Argorejo, Sedayu, Bantul	untuk kantor kecamatan sedayu	68.755.000,00
24	Tanah	1.425	Margosari, Pengasih, KP	Kantor bawaskab KP	213.750.000,00
25	Tanah	1.225	Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Kantor Bapedalda KP	1.102.500.000,00
26	Tanah	770	Jl. Veteran Yogyakarta	Puskesmas Umbulharjo	539.000.000,00
27	Tanah	9.935	kulwaru, kulwaru, Wates, kulon Progo	kantor BPP	1.490.250.000,00
28	Tanah	1.555	Karangsewu Galur kulon progo Dusun XII	Kantor BPP	62.200.000,00
29	Tanah	10.219	putat, putat gunung kidul	kantor BPP(Sumber agung) putat	204.380.000,00
30	Tanah	19.562	bandung, playen gunung kidul	kantor BIPP	586.860.000,00
31	Tanah	4.824	Murtigading, Sanden, Bantul	Puskesmas senden I bantul	964.800.000,00
32	Tanah	4.204	Murtigading, Sanden, Bantul	Kantor kecamatan sanden	1.261.200.000,00
33	Tanah	4.433	Jl. Parangtritis Timbulharjo sewon bantul	Kantor BPP	327.738.200,00
34	Tanah	517	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	257.675.000,00
35	Tanah	517	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	142.175.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Luas	Alamat	Penggunaan	Nilai Aset
36	Tanah	264	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Detazemen Zeni Bangunan 2/IV Yk	38.188.235,00
37	Tanah	429	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemerintah Kabupaten Sleman	62.055.882,00
38	Tanah	1.298	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemerintah Desa Bokoharjo	187.758.824,00
39	Tanah	253	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	-	36.597.059,00
40	Tanah	2.142	Jl Faridan M Noto No 11 Kotabaru, Yogyakarta	Dipinjamakai Museum Sandi	583.000.000,00
41	Tanah	9.685	Harjobinangun, Pakem, Sleman	Balai Penyuluhan Pertanian	1.239.680.000,00
42	Tanah	8.049	Suryodiningratan, MJ Yogyakarta	Digunakan ISI	2.012.250.000,00
43	Tanah	278	Semin, Gunungkidul	Tanah pemda DIY	69.500.000,00
44	Tanah	2.159	Murtigading, Sanden, bantul	SD Negeri Sanden 1 bantul	431.000.000,00
45	Tanah	2.542	Wiyoro Baturetno, Batul Jl. Wonosari KM. 6	untuk bangunan diklat BTKL	2.591.800.000,00
46	Tanah	1.510	Punukan, Wates, Kulon Progo	SD N Punukan (Pinjam Pakai)	123.820.000,00
47	Tanah	1.524	Punukan, Wates, Kulon Progo	SD Terbah Sari (Pinjam Pakai)	124.968.000,00
48	Tanah	1.352	Mutihah, Wates, Kulon Progo	SD Beji (Pinjam Pakai)	532.688.000,00
49	Tanah	1.550	Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	SD Kedungdowo (Sewa)	1.777.850.000,00
50	Tanah	1.397	Durungan, Wates, Kulon Progo	SD Inpres Gadingan (Pinjam Pakai)	339.471.000,00
51	Tanah	1.178	Durungan, Wates, Kulon Progo	TK ABA Gadingan, PAUD dan TPA	286.254.000,00
52	Tanah	2.794	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	SMK Maarif 2 Wates (Pinjam Pakai/Sewa)	2.240.788.000,00
53	Tanah	3.765	Dipan, Wates, Kulon Progo	GOR, KPT (Pinjam Pakai)	3.885.480.000,00
54	Tanah	1.663	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	58.205.000,00
55	Tanah	593	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	20.755.000,00
56	Tanah	102	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	3.570.000,00
57	Tanah	65	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	2.275.000,00
58	Tanah	637	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	15.925.000,00
59	Tanah	146	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	3.650.000,00
60	Tanah	468	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Kepariwisataaan	11.700.000,00
61	Tanah	22.502	Pantai Krakal, Sidorejo, Tepus, Gunung Kidul	Bangunan Fasilitas Umum	675.060.000,00
62	Tanah	21.151	Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul	Bangunan Fasilitas Umum	1.057.550.000,00
63	Tanah	9.696	Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul	Bangunan Fasilitas Umum	480.810.000,00
64	Tanah	46.200	Rt.06/ Rw02, Pengasih, Kulon Progo	Tanaman Rumput Rks penggemukan sapi	1.386.000.000,00
65	Tanah	62.663	Punukan, Wates, Wates, Kulon Progo	SMP 1 WATES, SD	5.138.366.000,00
66	Bangunan	123	Jl. Malioboro, Kepatihan, Yogyakarta	Kartamantul	103.904.250,00
67	Bangunan	120	jl. Retnodumilah no 23 c, Pilahan Kotagede Yogyakarta	Rumah Negara Gol I	46.550.000,00
68	Bangunan	2.542	Wiyoro, Baturetno, bantul	Bangunan Gedung kantor BTKL	3.141.057.200,00
69	Bangunan	58	Wijirejo, Pandak, Bantul	BBI Gesikan	78.702.000,00
70	Bangunan	58	Wijirejo, Pandak, Bantul	BBI Gesikan	78.702.000,00
71	Bangunan	278	Semin, Semin, Gunung Kidul	Gedung Kantor UPT TK, SD Semin	240.303.000,00
72	Bangunan	270	Jl. Brigjen Katamso, Belakang Kanwil BPN Yogyakarta	Gedung Belakang Diklat PMI Brigjend Katamso	375.084.000,00
73	Bangunan	845	Jl M Faridan M Noto 21 Kotabaru Yogyakarta	museum sandi	1.658.571.049,00
74	Kendaraan	AB 82	Toyota Kijang 7K	Dipinjam KPU	145.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Luas	Alamat	Penggunaan	Nilai Aset
75	Kendaraan	AB 1358 UA	Toyota Kijang 7K	SEKRETARIAT KPU	145.000.000,00
76	Kendaraan	AB 1987 UA	Toyota/ Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,00
77	Kendaraan	AB 1988 UA	Toyota/Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,00
78	Kendaraan	AB 1363 UH	Toyota Rush 1,5 G	kpu	211.035.400,00
79	Kendaraan	AB 1364 UH	Toyota Avanza 1.3 E	KPU	155.035.400,00
80	Kendaraan	AB-1726-YX	INNOVA 2.0 GM/T LUXURY	BPN	276.073.000,00
81	Kendaraan	AB 2627 UA	Honda NF 125 TR	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,00
82	Kendaraan	AB 2621 UA	Honda	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,00
83	Kendaraan	AB 2625 UA	Honda NF125	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,00
84	Kendaraan	AB 2620 UA	Honda NF125	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,00
85	Kendaraan	AB 2360 UB	Honda ND125	SEKRETARIAT KPU	8.400.000,00
86	Kendaraan	AB 2357 UB	Honda ND 125	SEKRETARIAT KPU	8.400.000,00
87	Kendaraan	AB 1660 UA	Suzuki APV	BNN	66.000.000,00
				TOTAL	84.742.599.599,00

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Rp118.286.569.921,00

Rp105.230.374.076,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan DED.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp118.286.569.921,00 merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.101
Rincian Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Software	27.926.971.246,00
2.	Kajian	35.679.116.740,00
3.	DED	47.176.823.085,00
4.	Website	581.175.000,00
5.	Aset Tidak Berwujud Lainnya.	6.922.483.850,00
	Jumlah	118.286.569.921,00

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud:

Saldo awal per 31 Desember 2017	105.230.374.076,00
Penambahan:	
Belanja Modal 2018	2.267.533.000,00
Kapitalisasi dari beban pemeliharaan	47.960.000,00
Reklas dari Beban Jasa	11.595.159.790,00
Reklas dari Gedung	161.843.000,00
Reklas dari AT lainnya	333.410.400,00
Reklas dari JIJ	57.442.000,00
Penyesuaian belanja software	42.200.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Mutasi dari SKPD lain	3.489.940.500,00
Reklas dari Peralatan mesin	232.781.960,00
Reklas dari Persediaan	35.354.550,00
Reklas dari honor tim pengadaan	1.050.000,00
Penyesuaian ATB	353.760.000,00
Reklas dari ALL	355.794.000,00
Reklas belanja modal SMKN 1 SAMIGALUH	12.000.000,00
Pembelian Software di Induk	76.305.000,00
Hibah	59.870.000,00
Koreksi kurang catat pada BPAD	5.300.000,00
Pengurangan:	
Penghapusan	195.159.055,00
Reklas ke Bangunan Gedung	556.022.500,00
Koreksi lebih catat pada Dinas Perhubungan	885.874.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2018	118.286.569.921,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.102
Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD**

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	DED (Rp)	Website (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.851.650.950,00	3.969.014.850,00	882.636.100,00	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	245.585.000,00	148.085.000,00	-	-	-	97.500.000,00
3	RS Grhasia	947.444.670,00	685.580.620,00	214.694.050,00	38.170.000,00	9.000.000,00	-
4	RS Paru Respira	231.302.940,00	231.302.940,00	-	-	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	34.533.381.360,00	189.837.660,00	10.862.852.875,00	22.640.896.325,00	-	839.794.500,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.964.048.900,00	162.090.000,00	-	17.801.958.900,00	-	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.794.642.925,00	3.020.550.725,00	5.577.615.700,00	146.756.500,00	49.720.000,00	-
8	Dinas Perhubungan	2.220.958.258,00	567.129.808,00	771.333.500,00	67.515.950,00	-	814.979.000,00
9	Badan Lingkungan Hidup	5.026.507.100,00	644.208.000,00	2.328.676.000,00	1.981.623.100,00	23.000.000,00	49.000.000,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	662.762.750,00	91.219.000,00	463.043.750,00	-	108.500.000,00	-
11	Dinas Sosial	54.495.000,00	7.988.000,00	-	46.507.000,00	-	-
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	280.244.600,00	150.230.000,00	-	130.014.600,00	-	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	568.167.000,00	444.494.000,00	-	-	-	123.673.000,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.062.728.540,00	308.549.540,00	1.754.179.000,00	-	-	-
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	147.075.000,00	147.075.000,00	-	-	-	-
16	Dinas Kebudayaan	13.741.210.135,00	3.467.367.375,00	6.504.863.200,00	2.624.716.210,00	47.200.000,00	1.097.063.350,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	254.504.500,00	3.760.000,00	-	153.367.000,00	-	97.377.500,00
18	Sekretariat Daerah	2.050.841.750,00	1.112.484.750,00	917.757.000,00	-	-	20.600.000,00
19	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	571.533.600,00	548.899.645,00	-	-	-
20	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.952.349.816,00	5.175.419.816,00	381.105.000,00	186.775.000,00	-	209.050.000,00
21	Badan Pendidikan dan Pelatihan	591.303.300,00	357.610.500,00	-	233.692.800,00	-	-
22	Inspektorat	808.851.200,00	361.921.200,00	-	446.930.000,00	-	-
23	Badan Kepegawaian Daerah	1.204.613.200,00	675.354.500,00	-	500.008.700,00	29.250.000,00	-
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.850.000,00	34.975.000,00	-	-	29.875.000,00	-
25	Kantor Perwakilan Daerah	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00
26	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1.038.553.780,00	39.765.000,00	918.788.780,00	-	40.900.000,00	39.100.000,00
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.640.210.000,00	3.575.231.500,00	-	-	-	2.064.978.500,00
28	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.369.374.462,00	964.200.022,00	117.239.440,00	-	-	1.287.935.000,00
29	Dinas Pertanian	98.000.000,00	-	-	-	98.000.000,00	-
30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.739.626.650,00	7.000.000,00	1.541.437.650,00	177.891.000,00	13.298.000,00	-
31	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	204.605.000,00	1.812.696.050,00	-	-	-
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	471.686.500,00	179.422.500,00	81.299.000,00	-	132.432.000,00	78.533.000,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	486.865.340,00	428.965.340,00	-	-	-	57.900.000,00
	Jumlah	118.286.569.921,00	27.926.971.246,00	35.679.116.740,00	47.176.823.085,00	581.175.000,00	6.922.483.850,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Rp176.854.108.228,29

Rp158.412.944.814,40

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp176.854.108.228,29 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp188.723.302.047,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp(11.869.193.818,75) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.103
Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per SKPD**

No	Nama SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.713.758.224,02	(51.100.000,00)	3.662.658.224,02
2	Dinas Kesehatan	2.154.062.921,00	(2.154.062.921,00)	-
3	RS Grhasia	764.563.272,00	(210.329.600,00)	554.233.672,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	159.966.059.479,00	(1.246.703.769,73)	158.719.355.709,27
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	83.283.278,00	(83.283.278,00)	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	283.773.647,00	(283.315.201,00)	458.446,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	362.850.210,00	(213.398.133,00)	149.452.077,00
8	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	24.510.000,00	(24.510.000,00)	-
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-
10	Dinas Perhubungan	2.357.974.650,00	(1.311.566.060,00)	1.046.408.590,00
11	Dinas Sosial	346.500.000,00		346.500.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.405.986.074,00	(1.405.986.074,00)	0
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.240.000,00	(65.240.000,00)	0
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	200.169.000,00	(77.062.000,00)	123.107.000,00
15	Dinas Kebudayaan	4.355.027.495,00	(284.706.323,14)	4.070.321.171,86
16	Sekretariat Daerah	227.292.375,00	(52.292.375,00)	175.000.000,00
17	Sekretariat DPRD	70.970.000,00	(70.970.000,00)	-
18	Inspektorat	2.643.132.770,00	(1.207.736.571,89)	1.435.396.198,11
19	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.533.926.464,00	(2.402.509.900,64)	1.131.416.563,36
20	Kantor Perwakilan Daerah	3.750.000,00	(3.750.000,00)	-
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.500.000,00	(51.500.000,00)	-
22	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.529.928.603,00	-	3.529.928.603,00
23	Dinas Pertanian	1.758.230.485,00	(656.208.381,35)	1.102.022.103,65
24	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	563.717.750,00	(268.259)	563.449.491,00
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	161.000.350,02	83.400.029,00	244.400.379,02
	Jumlah	188.627.207.047,04	(11.773.098.818,75)	176.854.108.228,29

5.3.1.4.5 Aset Non Lancar Lainnya

Rp10.445.563.070,00

Rp7.070.962.963,94

Saldo Aset Non Lancar Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.445.563.070,00 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan. Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Uang Jaminan sebesar Rp10.445.563.070,00 meliputi Jaminan Kesungguhan sebesar Rp725.992.602,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp5.913.274.757,00 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp3.806.295.711,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.104
Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2018

BPD Cabang Wates

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Deposito	No. Rekening	Tabungan
1	001311005801	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	3.500.000	001221031745	483.155
2	001311005840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HARGO WILLIS IND	2.850.000	001221031792	349.581
3	001311005856	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ ANANG TRI HARDIYANTO	500.000		
4	001311005880	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	3.132.000	001221031849	390.277
5	001311005890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	500.000		
6	001311005891	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	750.000	001221031861	42.458
7	001311005915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	500.000		
8	001311005917	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	700.000	001221031885	360.738
9	001311005918	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	500.000		
10	001311005919	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	2.550.000	001221031889	293.280
11	001311005920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	500.000	001221031890	345.527
12	001311005926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000		
13	001311005927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000		
14	001311005934	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S	500.000		
15	001311005943	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL	500.000		
16	001311005949	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO	500.000		
17	001311005952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI	550.000		
18	001311005953	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT	500.000		
19	001311005956	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D	500.000		
20	001311005957	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA	500.000		
21	001311005960	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIARTO	500.000		
22	001311005961	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA	594.300		
23	001311005962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P	630.000		
24	001311005965	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H	550.000		
25	001311005975	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P	500.000		
26	001311005985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	500.000		
27	001311005986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH	500.000		
28	001311005988	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I	500.000		
29	001311005997	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TINUS BUDIMAN	500.000		
30	001311005998	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000		
31	001311005999	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000		
32	001311006000	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAM N	500.000		
33	001311006001	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M	500.000		
34	001311006002	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUGIH ALAM N	500.000		
35	001311006003	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	500.000		
36	001311006007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE	500.000		
37	001311006009	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000		
38	001311006010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000		
39	001311006012	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I	500.000		
40	001311006139	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	3.500.000	001221032191	417.060
41	001311006205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	3.675.000	001221032357	446.610
42	001311006206	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	2.250.000	001221032358	222.165
43	001311006213	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	500.000		
44	001311006264	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	500.000		



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

45	001311006265	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000		
46	001311006292	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	600.000		
47	001311006358	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PASIR ALAM S	500.000	001221031906	67.434
48	001311006406	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	650.000		
49	001311006408	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO	500.000		
50	001311006428	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	500.000		
51	001311006440	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	1.600.000	001221032669	111.267
52	001311006517	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	3.200.000	001221032788	316.122
53	001311006520	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CITRA MATARAM K	500.000	001221032792	19.449
54	001311006553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSENO	2.400.000	001221032823	213.030
55	001311006566	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	3.500.000	001221032837	571.075
56	001311006593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000		
57	001311006594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000		
58	001311006632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	1.000.000	001221032877	26.670
59	001311006642	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	1.400.000	001221032886	400.124
60	001311006680	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	1.750.000	001221032926	480.280
61	001311006688	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEMESTA I A R	3.150.000	001221032932	288.728
62	001311006700	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C	500.000		
63	001311006709	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	650.000	001221033010	121.574
64	001311006710	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	700.000		
65	001311006713	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	650.000	001221033020	140.062
66	001311006714	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO ARTO WIGUNO	850.000		
67	001311006827	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	500.000	001221033179	73.622
68	001311006854	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JUMARI	500.000	001221033236	21.528
69	001311006858	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	700.000	001221033239	44.405
70	001311006859	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	500.000		
71	001311006862	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO	500.000	001221033242	21.525
72	001311006863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI	500.000	001221033243	21.525
73	001311006899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO	500.000	001221033271	19.189
74	001311006904	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	500.000	001221033274	486.151
75	001311006915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	500.000	001221033280	24.246
76	001311006940	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	500.000	001221033303	79.176
77	001311006942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	500.000		
78	001311006963	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHYONO	650.000	001221033323	37.679
79	001311006964	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	500.000	001221033324	339.836
80	001311006969	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000	001221033328	116.817
81	001311006970	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KOPERASI PETRUK	700.000	001221033329	42.916
82	001311006971	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. KALIGENDOL P	500.000	001221033330	67.470
83	001311006985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.250.000	001221033342	680.216
84	001311006986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.500.000		
85	001311006994	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	1.500.000	001221033345	500.965
86	001311006995	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	3.500.000		
87	001311007006	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	500.000	001221033350	26.948
88	001311007007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000		
89	001311007010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	700.000	001221033354	47.944
90	001311007011	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SENO WATU AJI	2.650.000	001221033355	253.410
91	001311007014	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	2.500.000	001221033357	237.611
92	001311007029	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	500.000	001221033371	58.641
93	001311007046	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	500.000	001221033383	24.825
94	001311007047	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	1.750.000	001221033384	151.291



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

95	001311007056	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN	650.000	001221033400	39.945
96	001311007070	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ MIFTAH FARID	500.000	001221033414	24.594
97	001311007071	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	500.000	001221033415	24.594
98	001311007072	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	500.000	001221033416	24.594
99	001311007073	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	500.000	001221033417	24.594
100	001311007094	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	500.000	001221033500	29.664
101	001311007097	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BAROKAH SUMBER R	500.000	001221033536	29.662
102	001311007098	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI OPAK S	500.000	001221033537	29.662
103	001311007104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	2.930.000	001221033559	274.300
104	001311007114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	500.000	001221033574	29.648
105	001311007126	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	2.100.000	001221033590	190.702
106	001311007131	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	650.000		
107	001311007149	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA	600.000	001221033590	37.146
108	001311007156	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	3.350.000		
109	001311007210	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000	001221033694	103.270
110	001311007211	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000		
111	001311007229	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	500.000	001221033804	35.047
112	001311007234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	500.000	001221033812	264.775
113	001311007235	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARANA JAYA M	500.000	001221033813	422.427
114	001311007236	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	500.000	001221033814	359.375
115	001311007240	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	500.000	001221033835	35.037
116	001311007241	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	500.000	001221033836	35.037
117	001311007244	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	500.000	001221033839	35.035
118	001311007245	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	500.000	001221033840	376.172
119	001311007246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. KALIGENDOL P	500.000		
120	001311007262	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	2.600.000	001221033857	216.035
121	001311007337	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	2.350.000	001221033947	283.522
122	001311007364	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	924.000	001221033971	367.113
123	001311007366	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TEMON SARANA P	500.000	001221033974	404.815
124	001311007372	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000	001221033982	404.813
125	001311007379	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	500.000	001221033987	368.252
126	001311007397	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	500.000		
127	001311007405	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	4.500.000		
128	001311007412	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	4.500.000		
129	001311007417	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TEMON SARANA P	4.500.000		
130	001311007454	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	5.000.000	001221034091	386.775
131	001311007456	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	5.000.000	001221034092	386.775
132	001311007457	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRI AGUS ANTORO	5.000.000	001221034104	386.767
133	001311007461	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	5.000.000	001221034140	386.759
134	001311007463	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	5.000.000	001221034141	386.759
135	001311007464	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ICHSAN HADI YULIATNO	5.000.000	001221034142	386.759
136	001311007475	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	5.000.000	001221034205	519.485
137	001311007479	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARANA JAYA M	5.000.000		
138	001311007481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	5.000.000	001221034212	391.739
139	001311007484	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	5.000.000		
140	001311007521	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	5.000.000		
141	001311007522	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000	001221034259	586.537
142	001311007523	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000	001221034260	381.096
143	001311007524	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000	001221034261	586.576
144	001311007525	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000		



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

145	001311007526	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LESTARI KARYA	5.000.000	001221034262	368.650
146	001311007539	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	5.000.000	001221034282	368.623
147	001311007540	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	5.000.000	001221034284	368.623
148	001311007544	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	5.000.000	001221034288	368.611
149	001311007553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000		
150	001311007564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	4.500.000		
151	001311007571	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	4.076.000		
152	001311007581	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	5.000.000	001221034339	352.669
153	001311007606	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	5.000.000	001221034359	350.531
154	001311007609	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	5.000.000		
155	001311007613	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	5.000.000	001221034365	350.514
156	001311007630	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	5.000.000	001221034380	355.497
157	001311007647	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000	001221034392	467.858
158	001311007661	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	5.000.000	001221034400	355.412
159	001311007671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SUPROBO	5.000.000	001221034448	334.538
160	001311007678	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AMERTA GIRI L	5.000.000	001221034469	334.528
161	001311007719	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	5.000.000		
162	001311007743	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	5.000.000		
163	001311007748	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	5.000.000	001221034625	316.452
164	001311007756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU MULYO BERJA	5.000.000	001221034633	316.440
165	001311007757	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	5.000.000	001221034632	316.440
166	001311007772	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	5.000.000	001221034640	316.423
167	001311007799	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONNY ARDANA	5.000.000	001221034677	495.727
168	001311007800	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONNY ARDANA	5.000.000		
169	001311007830	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	5.000.000		
170	001311007833	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000	001221034740	323.272
171	001311007841	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	5.000.000	001221034751	296.172
172	001311007842	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ROSLAN	5.000.000	001221034753	296.172
173	001311007844	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	5.000.000	001221034758	296.159
174	001311007845	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	5.000.000	001221034759	296.159
175	001311007863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	5.000.000	001221034789	301.179
176	001311007875	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000	001221034804	413.578
177	001311007876	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SYACHIRUL AFIF	5.000.000	001221034807	301.131
178	001311007896	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA	5.000.000	001221034838	280.187
179	001311007901	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRI ASIH DESTARI	5.000.000	001221034847	280.181
180	001311007902	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DAVID OKTA NUGRAHA	5.000.000	001221034848	280.181
181	001311007952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	5.000.000	001221034927	285.113
182	001311007982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITO YUNANTO	5.000.000	001221034940	264.250
183	001311008020	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDI PATOTORI A	5.000.000	001221035072	401.779
184	001311008021	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDI PATOTORI A	5.000.000		
185	001311008076	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	5.000.000		
186	001311008077	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000	001221035237	314.895
187	001311008078	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	5.000.000	001221035238	269.146
188	001311008080	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	5.000.000	001221035251	269.144
189	001311008082	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TRIYANDI MULKAN	5.000.000	001221035256	269.144
190	001311008084	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	5.000.000	001221035261	269.141
191	001311008103	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	5.000.000	001221035304	248.252
192	001311008112	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	5.000.000	001221035313	248.243
193	001311008113	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	5.000.000	001221035314	248.243
194	001311008114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000	001221035316	373.293



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

195	001311008115	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000		
196	001311008125	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	5.000.000	001221035340	248.203
197	001311008155	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	5.000.000	001221035392	253.176
198	001311008191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	5.000.000	001221035438	232.218
199	001311008199	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	5.000.000	001221035443	232.200
200	001311008208	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	5.000.000	001221035448	237.223
201	001311008218	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000	001221035451	349.749
202	001311008219	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000		
203	001311008227	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	5.000.000	001221035480	237.189
204	001311008228	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	5.000.000	001221035481	237.189
205	001311008233	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000		
206	001311008234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000		
207	001311008236	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUJANMO	5.000.000	001221035486	349.715
208	001311008237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUJANMO	5.000.000		
209	001311008239	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ MUJIYONO	5.000.000	001221035498	237.180
210	001311008246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000	001221035514	216.327
211	001311008247	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	5.000.000	001221035515	216.327
212	001311008254	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	5.000.000	001221035533	216.314
213	001311008312	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	5.000.000	001221035604	221.246
214	001311008355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	5.000.000	001221035673	200.310
215	001311008357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARDIANTO KARYA M	5.000.000	001221035679	226.144
216	001311008363	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	5.000.000	001221035685	205.329
217	001311008379	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000	001221035740	292.765
218	001311008380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000		
219	001311008381	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	5.000.000	001221035742	205.286
220	001311008392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	5.000.000	001221035755	184.436
221	001311008402	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERU ISWADI	5.000.000	001221035768	184.418
222	001311008404	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PRAMUDYA AFGANI	5.000.000	001221035770	184.418
223	001311008423	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MALEKO	5.000.000	001221035792	189.384
224	001311008436	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	5.000.000	001221035816	168.526
225	001311008439	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	5.000.000	001221035819	168.519
226	001311008492	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000	001221035877	235.930
227	001311008493	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000		
228	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	5.000.000	001221035888	173.435
229	001311008501	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	5.000.000		
230	001311008520	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000		
231	001311008597	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000	001221036069	180.621
232	001311008598	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000		
233	001311008627	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARDIANTO KARYA M	5.000.000		
234	001311008667	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	5.000.000	001221036135	128.742
235	001311008671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000		
236	001311008715	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	5.000.000	001221036248	107.882
237	001311008726	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000		
239	001311008727	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	5.000.000	001221036260	114.374
240		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	5.000.000	001221036444	93.518
		Jumlah	687.561.300		38.431.302



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.105
Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2018**

BPD Cabang Wates

No.	No. Rekening	Nama Rekening	Tabungan	No. Rekening	Deposito
1	003.211.013076	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan	7.113.479,00	003.311.001635	40.100.000,00
		Jumlah	7.113.479,00		40.100.000,00

Bank Pasar Kulon Progo

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tabungan	No. Rekening	Deposito
1	650601029861	DINAS PUP dan ESDM DIY JAMREK QQ PT Mineral Daya Gemilang	9.161.827,00		
2	650601030367	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT Dewata Bumi Nusantara	20.041.069,00	4822/X/D/12/00	44.670.000,00
3	650601030579	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ CV Cipta Jaya Sakti	19.101.543,00	4900/XI/D/12/00	43.700.000,00
4	650601030602	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ PT Harmak Indonesia	21.554.502,00	4912/XII/D/12/00	50.040.000,00
5	650601031380	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ CV Bedjo Oetomo	8.247.846,00	5227/V/D/13/118	18.690.000,00
6	650601032864	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ CV Handika Karya	55.389.967,00	5754/III/D/14/29	150.700.000,00
7	650601033172	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ PT Surya Watu Kencana	22.828.072,00	5854/V/D/14/29	70.000.000,00
8	650601035097	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ CV Laju Jaya Sakti	16.087.044,00	6195/VIII/D/14/133	51.200.000,00
9	650601035425	DINAS PUP-ESDM DIY JAMREK QQ CV Ellyta Karya Pratama	15.668.045,00	6375/X/D/14/29	51.500.000,00
10		DINAS PUP DAN ESDM DIY JAMREK QQ PT Mineral Daya Gemilang		9832/VII/D/17/135	92.000.000,00
		Jumlah	188.079.915,00		572.500.000,00

Bank BRI Cabang Cik Ditiro

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Tabungan	Deposito
1	2901014219403	Dinas PUP ESDM qq Anang Tri Hardiyanto Jaminan Reklamasi	14 -03-2016		17.709.582,00
2	2901014222406	Dinas PUP ESDM qq PT Gunung Sejahtera Temon Jaminan Reklamasi	14 -03-2016		39.646.943,00
3	2901014232401	Dinas PUP ESDM qq PT Pasir Alam Sejahtera Jaminan Reklamasi	21-03-2016		38.391.487,00
4	2901014234403	Dinas PUP ESDM qq PT Hargo Willis Indonesia Jaminan Reklamasi	22-03-2016		114.086.607,00
5	2901014242406	Dinas PUP ESDM qq PT Jogja Parahita Utama Jaminan Reklamasi	23-03-2016		133.512.626,00
6	2901014357405	Dinas PUP ESDM qq CV Cahaya Jaminan Reklamasi	30-05-2016		10.816.140,00
7	2901014411403	Dinas PUP ESDM qq CV Trikarya Jaminan Reklamasi	30-06-2016		195.926.760,00
8	2901014607402	Dinas PUP ESDM qq Giarto Jaminan Reklamasi	06-08-2016		22.292.926,00
9	2901014649404	Dinas PUP ESDM qq PT Agung Bara Jaminan Reklamasi	21-09-2016		278.540.740,00
10	2901014824402	Dinas PUP ESDM qq PT Bumi Kallimasada Jaminan Reklamasi	16-11-2016		137.837.220,00
11	2901014944406	Dinas PUP ESDM qq CV Bedjoe Oetomo Jaminan Reklamasi	20-12-2016		72.645.840,00
12	2901014949406	Dinas PUP ESDM qq Sumaryanta Jaminan Reklamasi	22-12-2016		31.058.300,00
13	2901014958405	Dinas PUP ESDM qq Suwandi Jaminan Reklamasi	28-12-2016		26.547.834,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

14	2901014982404	Dinas PUP ESDM qq PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Reklamasi	10-01-2017		153.426.027,00
15	2901015043407	Dinas PUP ESDM qq Nurdiyanto Jaminan Reklamasi	07-02-2017		49.191.867,00
16	2901015202409	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin	13-03-2017		32.083.993,00
17	2901015047401	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko	13-03-2017		36.815.907,00
18	2901015305401	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno	04-04-2017		23.816.007,00
19	2901015333404	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo	13-04-2017		52.936.113,00
20	2901015445405	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Anindya Mitra	30-05-2017		58.344.020,00
21	2901015443403	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno	30-05-2017		59.331.980,00
22	2901015537406	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Kali Gendol Perkasa	14-07-2017		47.012.867,00
23	2901015556400	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Harmak Indonesia	24-07-2017		263.422.967,00
24	2901015617400	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Maju Manunggal Abadi	10-08-2017		118.436.261,00
25	2901015635408	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Batu Prima Mandiri	16-08-2017		219.690.808,00
26	2901015653406	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	21-08-2017		20.921.892,00
27	2901015708405	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto	04-09-2017		49.504.133,00
28	2901015720407	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto	07-09-2017		79.040.013,00
29	2901015742409	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Selo Mandiri Sejahtera	19-09-2017		43.315.860,00
30	2901015747409	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Dewata Bumi Nusantara	25-09-2017		114.839.900,00
31	2901015757404	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Muncul Karya	02-10-2017		57.904.124,76
32	2901015774406	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk	06-10-2017		151.849.767,00
33	2901015792404	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan	12-10-2017		56.992.047,00
34	2901015802403	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumanto	17-10-2017		41.027.967,00
35	2901015805401	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Tirta Mulya Sarana	20-10-2017		87.464.133,00
36	2901015813404	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Sahabat Sejahtera Group	25-10-2017		103.636.093,00
37	2901015815406	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Sari Mulia	25-10-2017		111.238.060,00
38	2901015816402	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Sarana Jaya Makmur	25-10-2017		107.636.513,00
39	2901015833404	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Sari Bhumi Khatulistiwa	08-11-2017		160.775.860,00
40	2901015837408	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Widya Segara Karya	10-11-2017		145.377.033,00
41	2901015843409	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Caldomill Indonesia	15-11-2017		78.780.087,00
42	2901015861407	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Central Stone Perkasa	29-11-2017		118.494.074,00
43	2901015926401	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram	10-01-2018		75.500.000,00
44	2901015928403	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa	11-01-2018		79.400.000,00
45	2901015956406	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ngadimin	19-01-2018		63.178.095,00
46	2901015977402	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya	07-02-2018		105.520.119,00
47	2901015990400	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri	08-02-2018		36.638.895,00
48	2901015993408	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukamto	08-02-2018		33.207.511,00
49	2901016036403	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi	20-02-2018		79.746.497,00
50	2901016130401	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono	04-04-2018		42.915.702,00
		Jumlah			4.278.426.198,00

BNI

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Tabungan	Deposito
1	710409108	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DESTI PUJILESTARI	09/05/18		80.244.602,00
2	711289528	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BANGUN ADHI PRASODJO	15/05/18		38.417.103,00
3	717680389	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ GHOZIN ASRORI	08/06/18		39.100.000,00
4	720074133	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN	03/07/18		75.500.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5	723918871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA	19/07/18		41.723.968,00
6	725673406	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	27/07/18		85.376.785,00
7	733051871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO	10/08/18		53.235.790,00
8	739192045	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA	30/08/18		70.188.252,00
9	751120551	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA	21/09/18		41.469.991,00
10	757512882	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYA DARMA	10/10/18		120.904.201,00
11	765207450	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	01/11/18		58.349.477,00
12	768376572	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA	08/11/18		13.941.128,00
13	775963061	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA	28/11/18		69.103.868,00
14	779126960	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	10/12/18		39.500.000,00
		Jumlah			827.055.165,00
		Total Jaminan Reklamasi			6.346.380.432,00

Tabel 5.106
Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2018

BRI Cabang Cik Di Tiro

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Penempatan
1	2901014220404	Dinas PUP ESDM qq Anang Tri Hardiyanto Pasca Tambang	14/03/2016	62.545.287,00
2	2901014221400	Dinas PUP ESDM qq PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang	14/03/2016	57.823.439,00
3	2901014243402	Dinas PUP ESDM qq PT Jogja Parahita Utama Pasca Tambang	23/03/2016	18.946.366,00
4	2901014393401	Dinas PUP ESDM qq CV Cahaya Pasca Tambang	30/05/2016	5.407.927,00
5	2901014413405	Dinas PUP ESDM qq CV Trikarya Pasca Tambang	30/06/2016	12.978.174,00
6	2901014443400	Dinas PUP ESDM qq PT Hargo Willis Indonesia Pasca Tambang	20/06/2016	39.294.680,00
7	2901014471403	Dinas PUP ESDM qq PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang	28/07/2016	8.431.266,00
8	2901014608408	Dinas PUP ESDM qq Giarto Jaminan Pasca Tambang	06/08/2016	103.405.967,00
9	2901014650405	Dinas PUP ESDM qq PT Agung Bara Pasca Tambang	21/09/2016	24.075.070,00
10	2901014823406	Dinas PUP ESDM qq PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang	16/11/2016	6.597.860,00
11	2901014945402	Dinas PUP ESDM qq CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang	20/12/2016	71.315.100,00
12	2901014950407	Dinas PUP ESDM qq Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang	22/12/2016	49.591.400,00
13	2901014959401	Dinas PUP ESDM qq Suwandi Jaminan Pasca Tambang	28/12/2016	24.947.233,00
14	2901014981408	Dinas PUP ESDM qq PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Pasca Tambang	10/01/2017	7.701.087,00
15	2901015044403	Dinas PUP ESDM qq Nurdiyanto Jaminan Pasca Tambang	07/02/2017	53.767.947,00
16	2901015201403	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Umar Syamsudin	13/03/2017	90.999.913,00
17	2901015046405	Dinas PUP ESDM Jampas qq Dedek Handoko	13/03/2017	65.831.933,00
18	2901015306407	Dinas PUP ESDM Jampas qq Heri Suwarno	04/04/2017	137.234.960,00
19	2901015332408	Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo	13/04/2017	35.151.960,00
20	2901015444409	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Anindya Mitra Internasional	30/05/2017	7.799.886,00
21	2901015442407	Dinas PUP ESDM Jampas qq Parno	30/05/2017	4.836.006,00
22	2901015536400	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Kali Gendol Perkasa	14/07/2017	95.443.887,00
23	2901015557406	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Harmak Indonesia	24/07/2017	103.535.456,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

24	2901015600403	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Pasir Alam Sejahtera	24/08/2017	24.400.937,00
25	2901015618406	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Maju Manunggal Abadi	10/08/2017	107.384.793,00
26	2901015636404	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Batu Prima Mandiri	16/08/2017	19.721.791,00
27	2901015654402	Dinas PUP ESDM Jampas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	21/08/2017	21.756.659,00
28	2901015705407	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Trikarya	31/08/2017	37.437.153,00
29	2901015707409	Dinas PUP ESDM Jampas qq Aris Yulianto	04/09/2017	42.327.900,00
30	2901015721403	Dinas PUP ESDM Jampas qq Purwanto	07/09/2017	40.768.040,00
31	2901015741403	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Selo Mandiri Sejahtera	19/09/2017	37.543.940,00
32	2901015748405	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Dewata Bumi Nusantara	25/09/2017	78.000.007,00
33	2901015758400	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya	02/10/2017	14.060.631,18
34	2901015775402	Dinas PUP ESDM Jampas qq Koperasi Petruk	06/10/2017	135.719.987,00
35	2901015793400	Dinas PUP ESDM Jampas qq Muhammad Affan	12/10/2017	20.643.947,00
36	2901015801407	Dinas PUP ESDM Jampas qq Sumanto	17/10/2017	57.314.307,00
37	2901015804405	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Tirta Mulya Sarana	20/10/2017	46.799.887,00
38	2901015812408	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Sahabat Sejahtera Group	25/10/2017	66.404.127,00
39	2901015814400	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Sari Mulia	25/10/2017	68.899.900,00
40	2901015817408	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Sarana Jaya Makmur	25/10/2017	67.652.013,00
41	2901015832408	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Sari Bhumi Khatulistiwa	08/11/2017	12.505.927,00
42	2901015838404	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya	10/11/2017	6.499.953,00
43	2901015844405	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Caldomill Indonesia	15/11/2017	6.532.120,00
44	2901015862403	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Central Stone Perkasa	29/11/2017	9.879.893,00
45	2901015930400	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram	10/01/2018	40.250.000,00
46	2901015929409	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa	11/01/2018	41.210.000,00
47	2901015966401	Dinas PUP ESDM Jampas qq Ngadimin	19/01/2018	46.700.000,00
48	2901015976406	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya	07/02/2018	196.991.001,00
49	2901015991406	Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri	08/02/2018	45.078.535,00
50	2901015992402	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukamto	08/02/2018	39.620.579,00
51	2901016035407	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi	20/02/2018	49.576.239,00
52	2901016129400	Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono	04/04/2018	45.746.350,00
		Jumlah		2.515.089.420,00

Bank Pasar Kulon Progo

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Penempatan
1	9834/VII/D/17/135	DINAS PUP DAN ESDM DIY Jampascatambang QQ PT Mineral Daya Gemilang	11/07/2017	7.326.000,00
2	11543/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY Jaminan Pascatambang QQ CV Bedjoe Oetomo	22/10/2018	66.850.000,00
3	11544/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY Jaminan Pascatambang QQ CV HANDIKA KARYA	22/10/2018	358.929.675,00
		Jumlah		433.105.675,00

BNI

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tanggal Buka Rekening	Penempatan
1	710408820	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DESTI PUJILESTARI	09/05/18	82.752.246,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2	711295270	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BANGUN ADHI PRASODJO	15/05/18	59.882.534,00
3	717678733	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ GHOZIN ASRORI	08/06/18	52.800.000,00
4	720073468	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN	03/07/18	67.500.000,00
5	723921135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA	19/07/18	50.149.977,00
6	725640437	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	27/07/18	41.114.859,00
7	733073827	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO	10/08/18	52.932.163,00
8	739194814	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA	30/08/18	31.526.518,00
9	751122219	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA	21/09/18	49.844.707,00
10	757513943	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYA DARMA	10/10/18	69.315.156,00
11	765208307	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	01/11/18	33.198.840,00
12	768378955	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA	08/11/18	56.617.030,00
13	775963538	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA	28/11/18	56.466.586,00
14	779127294	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	10/12/18	154.000.000,00
		Jumlah		858.100.616,00

5.3.2 Kewajiban **Rp39.281.990.195,66** **Rp25.309.823.444,39**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2018 sebesar Rp39.281.990.195,66 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp39.281.990.195,66** **Rp25.309.823.444,39**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp39.281.990.195,66 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp10.445.563.069,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.346.132.759,72, Utang Belanja sebesar Rp2.694.657.266,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp21.795.637.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Rp10.445.563.069,94** **Rp7.101.608.457,94**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.445.563.069,94 merupakan Utang Jaminan sebesar Rp10.445.563.069,94 terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp725.992.602,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp6.346.380.432,00 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp3.373.190.036,00.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.108
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka DPPKA**

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai
1.	Tanah dan bangunan	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta	01/09/2018 s/d 31/08/2019	70.400.000,00	1-1-2019 s/d 31-8-2019	46.869.041,10
2.	Tanah dan bangunan	BPD DIY	01/07/2017 30/06/2018	120.500.000,00	1-1-2019 s/d 30-06-2022	421.254.794,52
			01/07/2018 30/06/2019	120.500.000,00		
			01/07/2019 30/06/2020	120.500.000,00		
			01/07/2020 30/06/2021	120.500.000,00		
			01/07/2021 30/06/2022	120.500.000,00		
3.	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2018 s/d 31/03/2020	203.200.000,00	1-1-2019 s/d 31-03-2020	151.704.109,59
4.	Tanah dan bangunan	Yayasan Wira Husada STIKES	17/09/2018 s/d 16/09/2019	223.000.000,00	1-1-2019 s/d 16-9-2019	158.238.356,16
5.	Tanah dan bangunan	Sdr. Sunarti	06/01/2018 s/d 05/01/2019	15.000.000,00	1-1-2019 s/d 5-1-2019	205.479,45
6.	Tanah dan bangunan	Pemdes Sumbermulyo	01/07/2018 s/d 31/06/2019	1.300.000,00	1-1-2018s/d 31-6-2019	322.328,77
7	Tanah dan bangunan	BUKP Gondokusuman	01/09/2018 s/d 31/08/2019	17.325.000,00	1-1-2019 s/d 31-8-2019	11.534.178,08
8	Tanah	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman	20/11/2017 s/d 19/11/2021	14.000.000,00	1-1-2019 s/d 19-11-2021	10.097.260,27
9	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2018 s/d 27/03/2019	14.000.000,00	1-1-2019 s/d 27-3-2019	3.298.630,14
10	Tanah dan bangunan	dr. Soedarman Jalan Janti 01/03 Gedongkuning, Banguntapan, Bantul	03/09/2018 s/d 02/09/2019	175.000.000,00	1-1-2019 s/d 2-9-2019	117.465.753,42
11	Tanah dan bangunan	Drs. Djuwardi KPRI Sumber Rejeki, KP	21/02/2018 s/d 20/02/2019	5.500.000,00	1-1-2019 s/d 20-2-2019	768.493,15
12	Tanah dan bangunan	Sri Andayani	01/06/2018 s/d 31/05/2019	12.900.000,00	1-1-2019 s/d 31-5-2019	5.336.712,33
13	Tanah	Tirto Manunggal	01/08/2018 s/d 31/07/2019	1.650.000,00	1-1-2019 s/d 31-7-2019	958.356,16
14	Tanah	PT. BUANALAND AGUNG	01/05/2018 s/d 30/04/2019	3.230.000.000,00	1-1-2019 s/d 30-4-2019	1.061.917.808,22
15	Tanah dan bangunan	PT. YIS (PT. Yogya Indah Sejahtera)	01/10/2018 30/09/2019	1.475.300.000,00	1-1-2019 s/d 30-9-2019	1.103.443.561,64
16	Tanah dan bangunan	Talenta Body Repair	25/03/2018 s/d 24/03/2020	50.000.000,00	1-1-2019 s/d 24-3-2019	36.369.863,01
17	Tanah	Tien Setiantoro	01/09/2018 s/d 31/08/2020	28.000.000,00	1-1-2019 s/d 31-8-2020	17.145.205,48



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai
		Aris Purnomo	01/09/2016 s/d 31/08/2019	3.641.000,00	1-1-2019 s/d 31-8-2019	808.002,74
		Sumartiningsih	01/09/2016 s/d 31/08/2021	12.210.200,00	1-1-2018 s/d 31-9-2021	6.509.876,49
		Roos Ani	01/09/2016 s/d 31/08/2021	9.157.650,00	1-1-2019 s/d 31-8-2021	4.882.407,37
		Suka Astuti	01/09/2016 s/d 31/08/2021	3.310.000,00	1-1-2019 s/d 31-8-2021	734.547,95
18	Sebagian Tanah dan Bangunan	Sarjuri	01/09/2018 s/d 31/08/2019	5.500.000,00	1-1-2019 s/d 31-08-2019	3.661.643,84
19	Tanah	YB Pratomo	01/02/2017 s/d 31/01/2022	109.891.800,00	1-1-2019 s/d 31-1-2022	67.801.735,23
20	Tanah dan bangunan	Aswin Kumala Darma Saputra	01/08/2017 s/d 31/07/2019	30.250.000,00	1-1-2019 s/d 31-7-2019	8.784.931,51
21	Tanah	Muhyudi Prabowo	01/01/2018 s/d 31/12/2020	3.150.000,00	1-1-2019 s/d 31-12-2020	2.100.000,00
22	Tanah dan Bangunan	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	01/04/2016 s/d 31/03/2021	72.500.000,00	1-1-2019 s/d 31-3-2021	32.575.342,47
23	Tanah	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	01/07/2018 s/d 30/06/2019	130.630.000,00	1-1-2019 s/d 30-6-2018	64.778.164,38
24	Tanah dan Bangunan	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2018 s/d 31/05/2021	10.600.000,00	1-1-2019 s/d 31-5-2021	8.528.401,83
25	Tanah dan Bangunan	BADKO TKA TPA	10/03/2018 s/d 09/03/2020	12.000.000,00	1-1-2019 s/d 9-3-2020	6.287.397,26
26	Tanah	Yayasan Amal Insan Mulia	20/04/2017 s/d 19/04/2019	14.000.000,00	1-1-2019 s/d 19-4-2019	2.090.410,96
27	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2Desaku)	01/02/2017 s/d 31/01/2019	15.000.000,00	1-1-2019 s/d 31-1-2019	636.986,30
28	Tanah	PT. Dyofa Putra Perdana	01/11/2018 s/d 31/10/2019	115.700.000,00	1-1-2019 s/d 31-10-2019	96.363.835,62
		Jumlah				3.453.473.615,45
	Bangunan KPPD Kulon Progo	PT. Bank BRI Cabang Wates	01/08/2018 s/d 31/07/2019	3.000.000,00	01/01/2019 s/d 31/07/2019	1.742.465,75
		PT. BNI Cabang UGM	01/08/2018 s/d 31/07/2021	9.000.000,00	01/01/2019 s/d 31/07/2021	7.742.465,75
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2018 s/d 31/07/2019	4.380.000,00	01/01/2019 s/d 31/07/2019	2.544.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai
		CV. Pandean Baru Motor	01/08/2018 - 31/07/2019	4.000.000,00	01/01/2019 s/d 31/07/2019	2.323.287,67
		Koperasi Binangun Sejati	01/08/2018 - 31/07/2019	15.498.000,00	01/01/2019 s/d 31/07/2019	9.001.578,08
		Painem (Kantin)	01/08/2018 - 31/07/2019	3.180.000,00	01/01/2019 s/d 31/07/2019	1.847.013,70
		PT. Bank BPD DIY (Sewa Kantor Kas)	01/01/2017 - 31/12/20121	53.750.000,00	01/01/2019 s/d 31/12/2019	32.250.000,00
		PT. Bank BPD DIY (ATM)	01/01/2017 - 31/12/20121	15.000.000,00	01/01/2019 s/d 31/12/2019	9.000.000,00
		Jumlah				66.450.810,95
		Jumlah Gabungan				3.519.924.426,40

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp9.208,333,33 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat namun sampai dengan per 31 Desember 2018 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:

Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
01-06-2017 s.d. 31-05-2020	19.500.000,00	01-01-2019 s.d. 31-05-2020	9.208,333,33

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Rp2.694.657.266,00

Rp1.848.787.496,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.694.657.266,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2018 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp35.920.929,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.658.736.337,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.109
Rincian Utang Belanja per SKPD

No	Nama SKPD	Nilai Per 31-12-2018 (Rp)	Nilai Per 31-12-2017 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	826.270.421,00	95.453.308,00
2	Dinas Kesehatan	90.518.227,00	115.213.453,00
3	RS Grhasia	58.363.888,00	133.429.172,00
4	RS Paru Respira	37.560.303,00	35.748.547,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	441.465.449,00	256.305.938,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.142.017,00	8.574.058,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.223.772,00	28.755.002,00
8	Dinas Perhubungan	31.628.231,00	38.851.986,00
9	Badan Lingkungan Hidup	-	-
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	16.163.425,00	12.769.729,00
11	Dinas Sosial	75.643.612,00	76.185.998,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.755.023,00	53.001.791,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7.000.055,00	9.105.734,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.163.015,00	3.351.187,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	10.843.200,00	19.029.838,00
16	Dinas Kebudayaan	109.538.618,00	78.907.254,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.252.669,00	7.221.548,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	8.793.965,00	3.503.252,00
19	Sekretariat Daerah	139.495.272,00	125.901.009,00
20	Sekretariat DPRD	49.014.923,00	49.629.894,00
21	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	226.271.284,00	202.497.617,00
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	45.603.307,00	41.593.292,00
23	Inspektorat	16.752.628,00	14.003.174,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	39.083.407,00	31.987.623,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.079.724,00	41.800.683,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	22.913.220,00	18.694.157,00
27	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	18.692.342,00	14.197.849,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.067.964,00	31.784.072,00
29	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	96.792.324,00	87.470.758,00
30	Dinas Pertanian	65.973.737,00	113.410.079,00
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	63.330.263,00	24.314.154,00
32	Dinas Pariwisata	9.547.350,00	13.182.344,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan	48.713.631,00	44.730.998,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	18.181.998,00
	Jumlah	2.694.657.266,00	1.848.787.496,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek

Rp21.795.637.100,00

Rp12.345.740.193,82

Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.795.637.100,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp21.795.637.100,00 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 58/KEP/2019 tanggal 15 Februari 2019. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.4. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

2018

2017

5.4.1 Pendapatan-LO **Rp5.773.546.712.951,83** **Rp5.948.742.734.314,85**

Pendapatan LO Tahun 2018 sebesar sebesar Rp5.773.546.712.951,83 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO **Rp2.079.778.676.273,03** **Rp1.906.715.609.784,08**

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018 sebesar Rp2.079.778.676.273,03 meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO **Rp1.717.303.203.238,00** **Rp1.583.831.012.183,00**

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp1.717.303.203.238,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	750.884.609.915,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	498.263.761.600,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	265.535.612.694,00
4.	Pajak Air Permukaan - LO	513.531.844,00
5.	Pajak Rokok - LO	202.105.687.185,00
	Jumlah	1.717.303.203.238,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO **Rp29.476.826.230,80** **Rp28.861.540.331,17**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp29.476.826.230,80 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	4.803.433.939,37
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	8.617.800.000,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	11.413.239.799,51
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	91.406.421,92
7.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	708.205.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	31.580.000,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	235.730.500,00
10.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	3.190.662.570,00
11.	Retribusi Izin Trayek - LO	62.964.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
12.	Retribusi Izin Perikanan - LO	600.000,00
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	321.204.000,00
	Jumlah	29.476.826.230,80

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan –LO Rp130.633.339.753,16 Rp130.738.677.869,07

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp130.633.339.753,16 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp130.418.474.613,16 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen dan yang diterima secara kas sebesar Rp214.865.140,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	1.112.695.374,68
2.	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	113.782.173.070,89
3.	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	6.819.897.898,60
4.	PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)	214.865.140,00
5.	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	8.703.708.268,99
	Jumlah	130.633.339.753,16

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2018 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp312.707.883,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp312.695.374,68 (99,996% X Rp312.707.883,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp312.695.374,68.

PT. Taru Martani membagikan deviden Tahun 2017 sebesar Rp800.000.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q DPPKA.

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2018 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp223.102.300.139,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp113.782.173.070,89 ($51\% \times \text{Rp}223.102.300.139,00$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp113.782.173.070,89.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2018 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp6.823.241.286,83 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp6.819.897.898,60 ($99,951\% \times \text{Rp}6.823.241.286,83$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp6.819.897.898,60.

4. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp660.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,13%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2017, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp214.865.140,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2016.

5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 83,131%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2018 BUKP mencatat laba sebesar Rp10.469.870.769,01 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,131% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp8.703.708.268,99 ($83,131\% \times \text{Rp}10.469.870.769,01$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp8.703.708.268,99.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah **Rp202.365.307.051,07** **Rp163.284.379.400,84** **Yang Sah -LO**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp202.365.307.051,07 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.959.302.600,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	528.007.447,00
3.	Penerimaan Jasa Giro - LO	12.974.277.154,00
4.	Pendapatan Bunga - LO	31.006.085.967,84
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	15.260.000,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	438.595.654,47
7.	Pendapatan Denda Pajak - LO	62.125.243.760,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi - LO	29.172.830,00
9.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	71.190.000,00
11.	Pendapatan dari Pengembalian - LO	1.062.611.141,00
12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO	690.575.000,00
	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	1.278.730.827,00
13.	Pendapatan BLUD - LO	48.737.391.805,86
14.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	41.448.862.863,90
	Jumlah	202.365.307.051,07

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO **Rp3.328.765.875.282,00** **Rp3.218.790.547.392,00**

Pendapatan Transfer - LO Tahun 2018 sebesar Rp3.328.765.875.282,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO. Rincian Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO **Rp2.317.436.811.403,00** **Rp2.379.856.461.840,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2018 sebesar Rp2.317.436.811.403,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO, Dana Alokasi Umum-LO dan Dana Alokasi Khusus - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	93.097.809.176,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	44.756.323,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.314.262.108.053,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	910.032.137.851,00
	Jumlah	2.317.436.811.403,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Rp1.010.685.532.429,00 Rp838.270.746.752,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2018 sebesar Rp1.010.685.532.429,00 meliputi:

- a. Dana Keistimewaan - LO sebesar Rp973.435.532.429,00
- b. Dana Penyesuaian - LO sebesar Rp37.250.000.000,00 berupa Dana Insentif Daerah

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Rp643.531.450,00 Rp663.338.800,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp643.531.450,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 5/PERJ/GUB/IV/2015 atau 16.1/PK/Bt/2015 atau 17.1/PK.KDH/A/2015 atau 39/Perj.YK/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Bantuan Keuangan terdiri dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp69.065.410,00, Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp82.128.660,00 dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp492.338.080,00.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Rp365.002.161.396,80 Rp823.236.577.138,77

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2018 sebesar sebesar Rp365.002.161.396,80 terdiri dari Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp365.002.161.396,80 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp0,00
Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp365.002.161.396,80 terdiri Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp65.128.307.000,00 dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp299.873.854.396,80

Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO sebesar Rp65.128.307.000,00 merupakan penerimaan hibah Rupiah Murni.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri LO sebesar Rp299.873.854.396,80 terdiri dari:

Tabel 5.115
Rincian Pendapatan Hibah-LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah dari Dealer Otomotif	4.816.853.000,00
2	Hibah dari Main Dealer	28.800.000,00
3	Hibah dari PT. Jasa Raharja	3.708.000.000,00
4	Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30.908.521.305,00
5	Hibah Barang pada Dinas Kesehatan	479.564.800,00
6	Hibah Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	420.097.840,00
7	Hibah Barang pada Dinas Sosial	107.031.306,00
8	Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.956.783.889,00
9	Hibah Barang pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	107.356.499,80
10	Hibah Barang pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	12.676.343,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

11	Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan	260.400.000,00
12	Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	3.474.413.744,00
13	Hibah Barang pada Dinas Pertanian	752.721.000,00
14	Hibah Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan	114.445.100
15	Hibah Barang pada DPPKA	250.719.299.570,00
16	Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	6.890.000
	Jumlah	299.873.854.396,80

5.4.2. **Beban** **Rp4.457.407.063.165,48** **Rp4.143.998.795.106,62**

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.457.407.063.165,48 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2018, terdiri dari dari Beban Operasi dan Beban Transfer sebesardengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1. **Beban Operasi** **Rp3.675.142.198.835,92** **Rp3.411.616.452.374,10**

Realisasi Beban OperasiPemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.675.142.198.835,92 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1 **Beban Pegawai** **Rp1.510.521.124.541,00** **Rp1.425.905.799.183,00**

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2018 sebesar Rp1.510.521.124.541,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp1.510.521.124.541,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.116
Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	787.813.885.116,00	819.074.663.301,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	439.799.043.321,00	388.304.173.581,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.665.000.000,00	9.678.728.750,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	43.650.000.000,00	40.174.399.758,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	973.167.286,00	930.546.483,00
Uang Lembur	449.375.000,00	1.141.515.500,00
Beban Honorarium PNS	67.566.248.808,00	43.234.349.786,00
Beban Honorarium Non PNS	141.045.085.964,00	110.871.088.625,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	8.045.000,00
Beban Pegawai BLUD	14.654.471.296,00	12.079.361.099,00
Beban Pegawai BOS	1.904.847.750,00	408.927.300,00
Jumlah	1.510.521.124.541,00	1.425.905.799.183,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.510.521.124.541,00 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Beban Pegawai per SKPD

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	800.788.689.995,00	795.476.169.650,00
2	Dinas Kesehatan	19.832.793.787,00	19.957.846.772,00
3	RS Ghrasia	25.493.425.209,00	25.157.020.863,00
4	RS Paru Respira	11.680.904.551,00	11.032.275.149,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	42.757.739.255,00	40.068.347.192,00
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	11.465.538.902,00	8.360.739.725,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.769.443.010,00	9.940.340.279,00
8	Dinas Perhubungan	11.404.723.344,00	11.846.368.105,00
9	Badan Lingkungan Hidup	5.560.269.122,00	5.079.948.972,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	5.587.584.468,00	5.787.303.106,00
11	Dinas Sosial	23.132.500.126,00	23.937.769.576,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.962.720.290,00	18.898.529.390,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.952.769.231,00	4.214.598.446,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.203.719.725,00	2.799.373.552,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.437.693.021,00	1.348.617.821,00
16	Dinas Kebudayaan	24.488.917.415,00	19.345.590.279,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.725.200.959,00	4.811.978.039,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	11.710.223.321,00	10.818.555.223,00
19	DPRD	35.622.840.762,00	26.406.022.097,00
20	Gubernur dan Wakil Gubernur	3.053.114.726,00	2.681.403.984,00
21	Sekretariat Daerah	35.566.206.861,00	34.323.945.753,00
22	Sekretariat DPRD	7.431.591.604,00	6.981.858.675,00
23	DPPKA	91.547.264.775,00	84.324.276.930,00
24	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5.575.563.116,00	6.244.957.111,00
25	Inspektorat	10.890.284.256,00	8.383.954.012,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	186.503.293.328,00	131.834.833.187,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.329.854.582,00	6.836.585.346,00
28	Kantor Perwakilan Daerah	2.457.919.388,00	1.996.897.122,00
29	Sekretariat Paramparapraja	793.173.774,00	856.091.039,00
30	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	4.830.045.206,00	5.758.098.152,00
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.967.838.042,00	5.313.562.432,00
32	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.525.767.721,00	8.226.727.518,00
33	Dinas Pertanian	22.837.514.563,00	24.314.471.573,00
34	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	25.323.935.319,00	26.679.392.160,00
35	Dinas Pariwisata	4.703.813.195,00	4.605.618.939,00
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.440.082.456,00	11.045.826.788,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.166.165.136,00	10.209.904.226,00
	Jumlah	1.510.521.124.541,00	1.425.905.799.183,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp1.194.114.585.863,61

Rp1.139.284.778.917,35

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.194.114.585.863,61 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2018 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa .

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	170.955.551.493,48	151.914.208.055,69
2	Beban Persediaan Bahan/Material	103.439.497.186,00	100.930.621.392,35
3	Beban Jasa Kantor	295.857.769.926,21	245.395.595.678,80
4	Beban Premi Asuransi	1.870.496.359,34	1.207.098.128,97
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.854.970.127,00	10.996.152.208,38
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	32.738.714.434,92	30.791.546.047,21
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir	13.908.117.069,32	16.378.131.805,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	9.956.242.200,00	8.624.728.17,00
9	Beban Sewa Alat Berat	716.283.000,00	418.581.900,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.667.642.372,00	29.664.958.773,00
11	Beban Makanan dan Minuman	92.905.029.640,72	85.316.224.433,00
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	1.380.364.000,00	1.961.213.650,00
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	5.127.847.259,00	3.484.340.100,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.340.839.110,00	3.252.277.596,90
15	Beban Perjalanan Dinas	93.302.649.306,00	98.766.316.817,00
16	Beban Pemeliharaan	83.905.624.021,62	72.928.133.953,04
17	Beban Jasa Konsultansi	47.983.089.465,00	43.856.354.906,00
18	Beban Persediaan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.373.254.280,00	33.997.959.715,00
19	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	40.647.419.900,00	39.290.222.330,00
20	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.979.840.562,00	5.470.380.031,00
21	Beban Honorarium Non Pegawai	14.100.000,00	710.997.451,00
22	Honorarium PNS	126.294.489.151,00	125.298.021.000,00
23	Honorarium Non PNS	0,00	4.731.699.775,00
24	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.894.755.000,00	23.899.015.000,00
	Jumlah	1.194.114.585.863,61	1.139.284.778.917,34



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.163.059.209.556,41 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	293.483.031.695,87	260.743.311.891,04
2	Dinas Kesehatan	65.778.663.245,50	76.748.566.189,80
3	RS Ghrasia	10.828.680.756,82	9.905.874.945,00
4	RS Paru Respira	10.476.565.755,00	7.922.894.628,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	118.538.325.172,00	108.083.891.999,86
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	30.139.532.163,00	21.458.582.566,53
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.374.053.241,00	10.488.052.804,00
8	Dinas Perhubungan	112.010.313.900,58	87.545.115.872,00
9	Badan Lingkungan Hidup	10.031.317.285,00	10.312.066.454,00
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	6.711.395.317,00	6.398.390.814,00
11	Dinas Sosial	25.202.435.340,00	30.294.928.509,65
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.995.027.985,00	20.355.354.552,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.501.781.443,00	5.987.647.156,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	2.641.259.055,00	4.176.673.100,00
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.673.675.409,00	2.182.439.365,00
16	Dinas Kebudayaan	205.796.966.563,72	193.700.453.637,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.982.295.868,00	3.578.850.567,00
18	Kantor Satpol PP	4.468.376.266,00	4.976.730.775,00
19	Sekretariat Daerah	42.074.022.005,00	44.883.101.057,00
20	Sekretariat DPRD	57.896.689.706,00	58.315.437.211,00
21	DPPKA	25.648.409.379,47	22.038.819.292,97
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.266.249.687,00	11.593.309.938,00
23	Inspektorat	3.234.078.200,00	3.669.161.994,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	11.435.025.662,00	11.704.694.192,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.054.176.305,40	11.121.363.753,00
26	Kantor Perwakilan Daerah	2.441.053.088,00	2.689.870.133,00
27	Sekretariat Paramparapraja	223.371.017,00	254.004.569,00
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2.442.503.159,00	6.285.671.126,50
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.937.974.980,25	10.489.878.723,00
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	16.003.149.545,00	14.619.264.587,00
31	Dinas Pertanian	11.038.055.841,00	13.700.000.423,00
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	10.132.727.845,00	9.756.128.434,00
33	Dinas Pariwisata	17.899.552.915,00	19.227.096.911,00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.808.318.301,00	19.446.171.279,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.945.531.766,00	14.630.979.468,00
	Jumlah	1.194.114.585.863,61	1.139.284.778.917,35

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Rp0,00

Rp0,00

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.4.2.1.4 Beban Subsidi Rp0,00 Rp0,00

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah Rp587.035.545.684,00 Rp574.360.049.000,00

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp587.035.545.684,00 merupakan Beban Hibah berupa uang di PPKD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Beban Hibah

No	Uraian	Realisasi
		Rp
a.	Hibah Urusan Pendidikan	511.445.545.684,00
b.	Hibah Urusan Kesehatan	920.000.000,00
d.	Hibah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	110.000.000,00
e.	Hibah Urusan Sosial	75.000.000,00
f.	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.545.000.000,00
g.	Hibah Urusan Pangan	80.000.000,00
h.	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	1.500.000.000,00
i.	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	4.060.000.000,00
j.	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	6.000.000.000,00
k.	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	-
l.	Hibah Urusan Keistimewaan	61.300.000.000,00
	Jumlah	587.035.545.684,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial Rp450.000.000,00 Rp1.091.000.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk program pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin sebanyak 15 penerima.

5.4.2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp382.271.554.370,79 Rp262.197.581.069,97

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp382.271.554.370,79 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp382.271.554.370,79 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	169.514.978.611,88	121.986.187.345,65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	103.798.510.528,50	64.006.611.092,32
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	106.710.375.920,06	73.032.450.841,86
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.448.628.940,09	1.309.819.930,14
Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	799.060.370,26	1.547.534.022,86
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	314.977.837,14
Jumlah	382.271.554.370,79	262.197.581.069,97



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp382.333.282.723,74 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	135.053.907.482,52	58.374.176.279,93
2	Dinas Kesehatan	5.662.944.828,28	4.546.281.585,44
3	RS Ghrasia	3.381.279.503,72	7.240.085.612,42
4	RS Paru Respira	6.708.724.158,04	6.348.226.764,62
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	84.735.534.501,35	76.701.988.560,53
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15.052.407.828,21	8.048.738.274,64
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	899.603.473,88	1.373.552.408,10
8	Dinas Perhubungan	15.021.840.746,97	14.650.000.495,44
9	Badan Lingkungan Hidup	1.170.723.224,51	880.276.373,03
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.087.339.305,48	643.961.889,40
11	Dinas Sosial	4.013.813.925,09	4.615.101.197,08
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.915.210.539,56	3.435.672.785,75
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	574.162.058,33	308.658.317,00
14	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	231.922.445,56	187.058.651,70
15	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	305.507.212,85	183.400.622,50
16	Dinas Kebudayaan	11.639.971.533,58	8.677.122.712,46
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400.947.369,33	355.718.919,38
18	Satuan Polisi Pamong Praja	510.063.011,02	761.554.876,02
19	Sekretariat Daerah	10.135.891.545,00	5.251.326.390,49
20	Sekretariat DPRD	10.183.776.977,07	10.055.776.712,85
21	DPPKA	16.880.356.394,80	16.932.266.382,04
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.493.516.088,31	1.618.049.192,81
23	Inspektorat	321.317.495,92	368.653.472,61
24	Badan Kepegawaian Daerah	1.813.077.257,61	1.562.397.493,02
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.130.819.211,64	3.067.096.811,32
26	Kantor Perwakilan Daerah	502.887.118,45	553.783.867,79
27	Sekretariat Paramparapraja	297.501.745,19	302.635.008,57
28	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	573.265.759,78	735.443.573,53
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.200.371.740,56	5.230.028.188,64
30	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.929.544.153,25	6.937.442.858,05
31	Dinas Pertanian	5.279.684.394,73	3.757.012.759,95
32	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.753.109.743,40	3.000.974.778,44
33	Dinas Pariwisata	1.107.018.538,76	472.228.056,78
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.115.077.567,30	2.955.013.017,38
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.188.435.490,74	2.065.876.180,26
	Jumlah	382.271.554.370,79	262.197.581.069,97

5.4.2.1.8 **Beban Penyisihan Piutang**

Rp290.161.713,70

Rp629.939.543,08

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp290.161.713,70 terdiri dari dari Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp41.482.279,00, Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp4.000.000,00, Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp244.679.434,70.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp41.482.279,00 pada DPPKA
2. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp4.000.000,00 pada DPPKA
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp244.679.434,70, pada:
 - a. RS. Ghrasia sebesar Rp181.986.145,20
 - b. RESPIRA sebesar Rp 15.774.244,00
 - c. DPPKA sebesar Rp10.268.101,50
 - d. DIKPORA sebesar Rp36.650.944,00

5.4.2.1.9 Beban Lain-lain Rp459.226.662,82 Rp8.147.304.660,70

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp459.226.662,82 terdiri dari Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp458.836.278,82 dan Beban Lain-lain sebesar Rp390.384,00

5.4.2.2 Beban Transfer Rp782.264.864.329,56 Rp732.382.342.732,52

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp782.264.864.329,56 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	702.346.618.129,56	653.954.188.490,52
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	75.991.545.000,00	74.634.180.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.530.000.000,00	2.433.846.311,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.396.701.200,00	1.360.127.931,00
	Jumlah	782.264.864.329,56	732.382.342.732,52

5.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO Rp1.316.139.649.786,35 Rp1.804.743.939.208,23

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp1.316.139.649.786,35 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp5.773.546.712.951,83 dikurangi dengan Beban sebesar Rp4.457.407.063.165,48.

5.4.4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional -LO Rp5.038.690.450,50 Rp3.466.128.608,14

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp5.038.690.450,50 merupakan Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp6.882.263.096,50 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp1.843.572.646,00. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus penjualan aset non lancar sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari kerugian penjualan aset non lancar-LO.

Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp6.882.263.096,50 merupakan Surplus Non Operasional-LO yang berasal dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan sebesar Rp6.748.262.364,00
2. Penjualan alat tepat guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp875.000,00
3. Kenaikan nilai persediaan cadangan beras dari penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga pembelian terakhir pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp133.125.732,50

Defisit Non Operasional sebesar Rp1.843.572.646,00 berasal dari kerugian:

1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp145.674.600,00
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.697.898.046,00

5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa -LO Rp1.321.178.340.236,85 Rp1.808.210.067.816,37

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO sebesar Rp1.321.178.340.236,85 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.316.139.649.786,35 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO sebesar Rp5.038.690.450,50.

5.4.5.1. Pos Luar Biasa Rp0,00 Rp0,00

Pos Luar Biasa berasal dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2018 tidak ada transaksi dari Pos Luar Biasa.

5.4.6. Surplus/Defisit - LO Rp1.321.178.340.236,85 Rp1.808.210.067.816,37

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp1. merupakan selisih antara seluruh Pendapatan -LO baik Operasional dan Non Operasional sebesar Rp5.780.428.976.048,33 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp4.459.250.635.811,48.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Ekuitas Awal **Rp7.731.723.566.685,84 Rp6.037.884.958.749,13**

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2018 sebesar Rp7.731.723.566.685,84 mengalami kenaikan sebesar Rp1.693.838.607.936,71 atau 28,05% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2017 yaitu sebesar Rp6.037.884.958.749,13. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp7.731.723.566.685,84 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.284.653.941.608,65
2	Dinas Kesehatan	50.620.080.097,83
3	RS Ghrasia	66.601.307.977,70
4	RS Paru Respira	54.945.663.759,91
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2.143.577.129.470,32
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	659.944.303.027,51
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.758.579.701,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja	5.343.364.218,55
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.411.769.809,65
10	Dinas Sosial	99.733.150.796,39
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.585.538.866,38
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	24.422.136.554,65
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	10.373.344.720,60
14	Badan Lingkungan Hidup	20.382.271.586,32
15	Dinas Perhubungan	160.547.559.216,04
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.531.604.156,37
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.453.064.127,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.472.418.761,30
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.098.000.383,25
20	Dinas Kebudayaan	407.295.822.810,26
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	131.645.254.756,81
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	159.951.119.394,07
23	Dinas Pariwisata	20.987.616.962,25
24	Dinas Pertanian	175.049.836.861,04
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	71.766.906.871,88
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.075.278.346,76
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	0,00
28	Sekretariat Daerah	45.936.322.607,33
29	Sekretariat Paramparapraja	1.502.930.408,10



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Ekuitas Awal
30	Kantor Perwakilan Daerah	25.603.201.357,64
31	DPRD	0,00
32	Sekretariat DPRD	158.968.631.239,64
33	Inspektorat	5.264.509.282,57
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.156.115.205,98
35	DPPKA	497.922.121.407,03
36	PPKD	1.257.687.155.084,35
37	Badan Kepegawaian Daerah	14.495.692.285,55
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.959.822.964,85
	Jumlah	7.731.723.566.685,84

5.5.2 Surplus/Defisit

Rp1.321.178.340.236,85 **Rp1.808.210.067.816,37**

Surplus/Defisit LO Tahun 2018 sebesar Rp1.321.178.340.236,85 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.125
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan-LO	Beban	Surplus (Defisit) LO
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.761.166.216,67	1.229.362.670.501,39	(1.224.601.504.284,72)
2	Dinas Kesehatan	10.311.327.306,35	91.274.401.860,78	(80.963.074.554,43)
3	RS Grhasia	23.415.095.657,84	39.885.371.614,74	(16.470.275.956,90)
4	RS. Respira	12.170.418.687,00	28.881.968.708,04	(16.711.550.021,04)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	10.525.632.336,37	246.031.598.928,35	(235.505.966.591,98)
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	56.657.478.893,21	(56.657.478.893,21)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	10.108.444.196,33	(10.108.444.196,33)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	16.688.662.598,02	(16.688.662.598,02)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	21.514.850.099,04	(21.514.850.099,04)
10	Dinas Sosial	672.000.000,00	52.348.749.391,09	(51.676.749.391,09)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.705.873.000,00	36.872.958.814,56	(35.167.085.814,56)
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-	13.386.319.090,48	(13.386.319.090,48)
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	133.125.732,50	7.845.814.124,78	(7.712.688.392,28)
14	Badan Lingkungan Hidup	44.185.000,00	16.762.309.631,51	(16.718.124.631,51)
15	Dinas Perhubungan	21.184.988.742,52	138.436.877.991,55	(117.251.889.249,03)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.300.000,00	24.106.184.762,81	(24.102.884.762,81)
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.750.000,00	11.028.712.732,33	(11.022.962.732,33)
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	-	5.076.901.225,56	(5.076.901.225,56)
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	384.820.000,00	4.416.875.642,85	(4.032.055.642,85)
20	Dinas Kebudayaan	484.730.500,00	241.925.855.512,30	(241.441.125.012,30)
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	401.113.900,00	32.458.461.419,25	(32.057.347.519,25)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.473.284.875,00	44.363.478.324,00	(42.890.193.449,00)
23	Dinas Pariwisata	96.262.055,00	23.710.384.648,76	(23.614.122.593,76)
24	Dinas Pertanian	768.891.424,00	40.853.152.844,73	(40.084.261.420,73)
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	10.254.711.878,00	38.209.772.907,40	(27.955.061.029,40)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111.770.496,00	20.445.806.992,74	(20.334.036.496,74)
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	3.053.114.726,00	(3.053.114.726,00)
28	Sekretariat Daerah	316.700.000,00	87.776.120.411,00	(87.459.420.411,00)
29	Sekretariat Paramparapraja	-	1.314.046.536,19	(1.314.046.536,19)
30	Kantor Perwakilan Daerah	527.605.000,00	5.401.859.594,45	(4.874.254.594,45)
31	DPRD	-	35.622.840.762,00	(35.622.840.762,00)
32	Sekretariat DPRD	-	75.512.058.287,07	(75.512.058.287,07)
33	Inspektorat	-	14.445.679.951,92	(14.445.679.951,92)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	21.043.099.724,88	(21.043.099.724,88)
35	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.977.558.836.562,28	134.131.780.929,77	1.843.427.055.632,51
36	PPKD	3.693.768.036.678,80	1.370.209.246.292,38	2.323.558.790.386,42
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.367.050.000,00	199.751.396.247,61	(198.384.346.247,61)
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	7.982.300.000,00	18.335.328.891,31	(10.353.028.891,31)
	Jumlah	5.780.428.976.048,33	4.459.250.635.811,18	1.321.178.340.237,15



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar **Rp43.076.247.395,44** **Rp(114.371.459.879,66)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2018 sebesar Rp43.076.247.395,44) merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penyerahan Hibah	(58.008.132.285,00)
2.	Penyesuaian awal dan koreksi	283.303.994.224,21
3.	Mutasi antar skpd	99.603.364.442,71
4.	Penghapusan	(42.819.303.694,60)
5.	Ekstrakomtabel	(4.125.491.529,73)
6.	Penerimaan Hibah	(245.651.981.179,02)
7.	Koreksi Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas	(10.000.636.578,39)
8.	Koreksi Penyisihan Piutang TGR	(11.010.000,00)
9.	Penyesuaian Investasi Non Permanen	(9.333.400,00)
10.	Pencatatan persediaan dari hasil produksi	2.646.177.920,00
11.	Penyesuaian Penyisihan Piutang	(409.087.276,85)
12.	Penyesuaian Pendapatan diterima Dimuka	3.913.456.061,81
13.	Pencatatan Barang hasil sensus	13.874.024.887,64
14.	Koreksi double pencatatan di SKPD dan PPKD	2.648.505,00
15.	Lain-lain	767.557.297,66
	Jumlah	43.076.247.395,44

Tabel 5.127
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar per SKPD

No	Uraian	Dampak Perubahan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	121.055.112.088,49
2	Dinas Kesehatan	6.602.114.869,00
3	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	(2.276.577.861,00)
4	Rumah Sakit Paru Respira	-97.516.909,73
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	397.129.071.816,34
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	(622.755.299.500,08)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	582.464.710,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-356.191.286,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	383.064.859,40
10	Dinas Sosial	414.560.499,22
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.023.095.953,99
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	-3.684.500,00
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	101.540.549,99
14	Badan Lingkungan Hidup	-890.962.350,00
15	Dinas Perhubungan	3.150.755.358,58



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Dampak Perubahan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.299.906.037,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	167.668.000,00
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	12.676.343,00
20	Dinas Kebudayaan	(34.957.721.232,05)
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	662.429.616,90
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.077.607.128,79
23	Dinas Pariwisata	6.194.955.505,00
24	Dinas Pertanian	(1.929.342.190,00)
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.491.944.037,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.004.876.159,06
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	0,00
28	Sekretariat Daerah	178.364.963.294,50
29	Sekretariat Parampara Praja	(25.171.745,01)
30	Kantor Perwakilan Daerah	(68.253.705,47)
31	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
32	Sekretariat DPRD	(4.195.804.782,75)
33	Inspektorat	(11.021.302,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.313.634.375,00)
35	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	209.908.116.131,09
36	PPKD/BUD	(255.712.925.522,80)
37	Badan Kepegawaian Daerah	166.198.000,00
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(122.766.300,02)
	Jumlah	43.076.247.395,44

5.5.4 Ekuitas Akhir

Rp. 9.095.978.154.318,13 Rp7.731.723.566.685,84

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.095.978.154.318,13 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Ekuitas Akhir per SKPD

No	Uraian	Ekuitas Akhir
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.436.967.170.489,42
2	Dinas Kesehatan	51.347.478.339,90
3	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	65.518.962.956,80
4	Rumah Sakit Paru Respira	54.897.913.409,14
5	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2.726.713.519.498,52
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	563.181.352.581,01
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.943.261.495,98
8	Satuan Polisi Pamong Praja	5.056.435.933,53
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.751.474.897,01
10	Dinas Sosial	96.617.292.411,52
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.109.439.658,81
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	23.648.839.393,17
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	10.110.263.500,31
14	Badan Lingkungan Hidup	21.607.959.972,81



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Uraian	Ekuitas Akhir
15	Dinas Perhubungan	160.716.681.661,07
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.619.817.450,56
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11.911.474.247,67
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	4.391.697.212,74
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.205.756.831,40
20	Dinas Kebudayaan	457.769.396.663,48
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	162.438.859.177,27
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	169.345.561.006,56
23	Dinas Pariwisata	38.900.686.422,49
24	Dinas Pertanian	211.248.294.800,45
25	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	73.875.362.880,48
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31.142.437.858,08
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	0,00
28	Sekretariat Daerah	217.780.143.652,83
29	Sekretariat Parampara Praja	1.183.755.617,90
30	Kantor Perwakilan Daerah	25.554.190.054,72
31	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
32	Sekretariat DPRD	149.254.021.010,82
33	Inspektorat	5.263.901.447,65
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.503.237.437,10
35	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	747.318.814.561,57
36	PPKD/BUD	1.422.540.828.724,90
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.684.102.948,94
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	27.857.768.111,52
	Jumlah	9.095.978.154.318,13



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.6. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya dan Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Kejadian Luar Biasa dalam Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Masuk Kas **Rp5.440.671.834.465,93** **Rp5.083.722.844.862,27**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.440.671.834.465,93 berasal dari:

Tabel 5.129
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.717.291.718.438,00	1.583.875.063.883,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	43.625.223.035,16	41.432.293.725,53
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.097.737.606,37	71.411.759.885,57
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	192.201.359.404,40	153.735.904.145,17
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	93.097.809.176,00	98.447.376.907,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44.756.323,00	36.078.889,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.314.262.108.053,00	1.314.372.147.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	910.032.137.851,00	967.000.859.044,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	973.435.532.429,00	784.272.397.752,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	37.250.000.000,00	53.998.349.000,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	651.492.150,00	655.378.100,00
12	Penerimaan Hibah	73.681.960.000,00	14.485.236.531,00
13	Penerimaan Dana Darurat		
14	Penerimaan Lainnya		
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
	Jumlah Arus Masul Kas	5.440.671.834.465,93	5.083.722.844.862,27



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.6.1.2. Arus Keluar Kas (Rp4.163.575.804.386,43) (Rp3.873.896.635.080,08)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.163.575.804.386,43 dipergunakan untuk:

Tabel 5.130
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.512.793.109.461,00	1.428.694.957.043,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.122.418.868.628,08	
3	Pembayaran Bunga		
4	Pembayaran Subsidi		
5	Pembayaran Hibah	718.940.165.615,57	
6	Pembayaran Bantuan Sosial	37.041.423.324,40	
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	79.918.246.200,00	78.428.154.242,00
8	Pembayaran Tidak Terduga		7.655.049.640,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	692.463.991.157,38	647.149.357.812,70
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.163.575.804.386,43	2.161.927.518.737,70

5.6.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp1.277.096.030.079,50 Rp1.209.826.209.782,19

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.277.096.030.079,50 berasal dari:

Tabel 5.131
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	5.440.671.834.465,93	5.083.722.844.862,27
2	Arus Keluar Kas	(4.163.575.804.386,43)	(3.873.896.635.080,08)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	1.277.096.030.079,50	1.209.826.209.782,19

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembentukan Dana Cadangan, perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1. Arus Masuk Kas Rp5.459.506.979,00 Rp3.780.660.435,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.459.506.979,00 dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.132
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Penjualan Atas Tanah	-	-
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.194.652.600,00	586.877.676,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	764.650.000,00	664.210.000,00
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		103.818.750,00
6	Penjualan atas Aset Lainnya	548.007.447,00	163.468.000,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-
8	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	2.952.196.932,00	2.262.286.009,00
	Jumlah	5.459.506.979,00	3.780.660.435,00

Penjelasan:

Arus kas masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.194.652.600,00 merupakan penjualan peralatan/perengkapan kantor yang tidak terpakai sebesar Rp158.000.000,00, penjualan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp220.077.347,00 dan penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp816.575.253,00. Aset yang dijual tersebut merupakan aset yang akan dihapuskan karena telah usang dan rusak berat.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp764.650.000,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan (bongkaran) yang akan dihapuskan.

Arus kas masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp548.007.447,00 merupakan penjualan alat tepat guna sebesar Rp20.000.000,00, penjualan produksi dari SMK sebesar Rp2.458.447,00 dan penjualan/lelang ternak sebesar Rp525.549.000,00.

Arus kas masuk dari penerimaan investasi non permanen sebesar Rp2.952.196.932,00 merupakan penerimaan pembayaran dana bergulir dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian	
	Dana Bergulir DPM PHP Tahun 2010	6.750.000,00
	Dana Bergulir DPM PHP Tahun 2012	7.500.000,00
2	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	
	Dana Bergulir DPM LUEP	164.000.000,00
3.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
	Dana Bergulir Prospek Mandiri Campus Enterpreneur Tahun 2009	3.000.000,00
	Dana Bergulir Program Fasilitas Pengembangan Koperasi 2010	3.263.000,00
	Dana Bergulir Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan Tahun 2003	2.400.000,00
	Dana Bergulir Fasilitas Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa 2006)	7.500.000,00
	Dana Bergulir Ketahanan Pangan Tahun 2007	6.500.000,00
	Dana Bergulir Koperasi Pasca Gempa Tahun 2008	2.400.000,00
	Dana Bergulir Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tahun 2011	3.100.000,00
	Dana Bergulir Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tahun 2013	59.349.400,00
	Dana Bergulir Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tahun 2016	1.148.842.232,00
	Dana Bergulir Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tahun 2017	1.029.196.700,00
	Dana Bergulir Fasilitas Pemberdayaan Koperasi Tahun 2017 Tahap II	508.395.600,00
	Jumlah	2.952.196.932,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.6.2.2. Arus Keluar Kas (Rp1.154.827.726.327,74) (Rp1.061.650.141.538,60)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar (Rp1.154.827.726.327,74) dipergunakan untuk:

Tabel 5.134
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan		-
2	Perolehan atas Tanah	362.819.024.678,00	247.052.455.730,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	147.918.637.501,00	142.207.808.761,60
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	280.823.210.093,93	307.820.582.766,80
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	309.525.083.527,81	324.810.707.765,20
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	29.185.301.667,00	18.633.561.515,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	2.556.468.860,00	6.205.025.000,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	10.220.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	2.000.000.000,00	4.700.000.000,00
	Jumlah	1.154.827.726.327,74	1.061.650.141.538,60

Penjelasan:

Arus kas keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal PT. Bank BPD DIY.

Arus kas keluar Pengeluaran Investasi Non Permanen sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan penambahan investasi non permanen dana bergulir melalui BUKP.

5.6.2.3. Arus Keluar Kas Bersih (Rp1.149.368.219.348,74) (Rp1.057.869.481.103,60) - Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.149.368.219.348,74 berasal dari:

Tabel 5.135
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	5.459.506.979,00	3.780.660.435,00
2	Arus Keluar Kas	(1.154.827.726.327,74)	(1.061.650.141.538,60)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	(1.149.368.219.348,74)	(1.057.869.481.103,60)

5.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.6.3.1. Arus Masuk Masuk Rp0,00 Rp0,00

Arus masuk kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp0,00.

5.6.3.2. Arus Keluar Kas (Rp0,00) (Rp0,00)

Arus keluar Kas untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00.

**5.6.3.3. Arus Kas Bersih (Rp0,00) (Rp0,00)
Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan**

Arus Keluar Kas Bersih untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 berasal dari:

5.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

ArusKas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1. Arus MasukKas Rp1.635.075.731.546,00 Rp1.302.883.523.975,12

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.635.075.731.546,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.73
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	185.040.982.042,00	62.039.730.207,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	33.736.212.554,00	36.662.101.154,12
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	1.409.472.321.917,00	1.203.699.765.704,00
4	Sisa Uang Persediaan	6.826.215.033,00	481.926.910,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.635.075.731.546,00	1.302.883.523.975,12

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan arus masuk kas dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga oleh BUD sebesar Rp185.040.982.042,00, Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp33.736.212.554,00, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.409.472.321.917,00 dan Sisa Uang Persediaan yang belum disetorkan kepada BUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.826.215.033,00.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp185.033.597.908 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Iuran Wajib Pensiun	55.777.665.397,00
2.	PPh Pasal 21	914.335.989,00
3.	Taperum	1.083.750.000,00
4.	PPn	102.569.516.555,00
5.	PPh Pasal 22	2.907.622.197,00
6.	PPh Pasal 23	3.486.989.802,00
7.	PPh Pasal 4 (2)	18.293.717.968,00
	Jumlah	185.033.597.908,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp33.736.212.554,00, Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.409.472.321.917,00 dan Sisa Uang Persediaan sebesar Rp6.826.215.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian	Sisa Kas
1.	Sekretariat Daerah Gabung	54.372.440.953,00	52.173.609.237,00	2.198.831.716,00	
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.309.584.007,00	5.251.084.993,00	58.499.014,00	
3.	Badan Kepegawaian Daerah	12.380.394.604,00	12.117.033.429,00	263.361.175,00	
4.	Sekretariat DPRD	64.291.888.814,00	54.346.463.419,00	9.945.425.395,00	
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.523.069.789,00	8.346.087.068,00	176.982.721,00	
6.	Inspektorat	8.579.902.663,00	8.295.968.691,00	283.933.972,00	
7.	BPBD	8.194.574.690,00	8.004.801.996,00	189.772.694,00	
8.	Kantor Perwakilan Daerah	3.232.301.679,00	3.184.793.609,00	47.508.070,00	
9.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.260.296.595,00	8.145.079.191,00	115.217.404,00	
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.188.931.898,00	5.917.648.372,00	271.283.526,00	
11.	Sekretariat Parampara Praja	310.820.342,00	299.557.317,00	11.263.025,00	
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.890.335.382,00	5.775.527.161,00	114.808.221,00	
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.898.979.885,00	5.838.190.008,00	60.789.877,00	
14.	Dinas Pertanian	9.597.470.847,00	9.145.669.262,00	451.801.585,00	
15.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	10.342.636.670,00	10.215.670.499,00	126.966.171,00	
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.267.443.366,00	7.063.890.355,00	203.553.011,00	
17.	Dinas Pariwisata	12.864.013.896,00	12.300.773.017,00	563.240.879,00	
18.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	21.574.614.160,00	20.814.217.994,00	760.396.166,00	
19.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2.635.236.893,00	2.593.961.997,00	41.274.896,00	
20.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1.965.664.276,00	1.902.031.718,00	63.632.558,00	
21.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.521.168.716,00	2.485.883.427,00	35.285.289,00	
22.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	60.647.227.631,00	59.739.704.923,00	601.354.916,00	306.167.792,00
23.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	371.441.419.698,00	370.250.091.123,00	1.191.328.575,00	
24.	Dinas Perhubungan	90.505.611.595,00	90.446.834.796,00	58.776.799,00	
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.715.856.409,00	11.401.163.493,00	314.692.916,00	
26.	Badan Lingkungan Hidup	9.036.395.150,00	8.854.754.935,00	181.640.215,00	
27.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	368.842.707.038,00	354.753.795.012,00	7.568.864.785,00	6.520.047.241,00
28.	Dinas Kebudayaan	176.532.465.183,00	170.236.463.344,00	6.296.001.839,00	
29.	Dinas Kesehatan	54.648.802.673,00	54.057.059.711,00	591.742.962,00	
30.	Dinas Sosial	19.311.191.246,00	19.107.418.515,00	203.772.731,00	
31.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.435.205.052,00	8.272.669.015,00	162.536.037,00	
32.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.591.001.184,00	8.332.504.944,00	258.496.240,00	
33.	BPPM	7.284.730.659,00	6.971.476.301,00	313.254.358,00	
34.	RS Grhasia	737.468.000,00	732.156.000,00	5.312.000,00	
35.	RS Respira	2.102.897.861,00	2.098.287.045,00	4.610.816,00	
	JUMLAH	1.450.034.749.504,00	1.409.472.321.917,00	33.736.212.554,00	6.826.215.033,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.6.4.2. Arus Keluar Kas **Rp1.635.075.731.546,00** **Rp1.302.883.523.975,12**

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.635.075.731.546,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	185.040.982.042,00	62.039.730.207,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	1.450.034.749.504,00	1.240.843.793.768,12
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.635.075.731.546,00	1.302.883.523.975,12

5.6.4.3. Arus Kas Bersih **Rp0,00** **Rp0,00**

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.137
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	1.635.075.731.546,00	1.302.883.523.975,12
2	Arus Kas Keluar	(1.635.075.731.546,00)	(1.302.883.523.975,12)
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas **Rp127.727.810.730,76** **Rp151.956.728.678,59**

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp127.727.810.730,76 berasal dari:

Tabel 5.138
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	1.277.096.030.079,50	1.209.826.209.782,19
2	Aktivitas Investasi	(1.149.368.219.348,74)	(1.057.869.481.103,60)
3	Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	127.727.810.730,76	151.956.728.678,59

5.6.6 Saldo Akhir Kas **Rp474.856.235.612,94** **Rp346.433.140.959,52**

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2018 sebesar Rp474.856.235.612,94 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp346.433.140.959,52 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.139
Rincian Kas Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	Kas di Kasda	164.745.158.077,68	203.315.495.722,53
6	Deposito Berjangka	270.000.000.000,00	110.000.000.000,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	11.380.663.802,42	7.147.496.065,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	31.101.900,00	369.973.815,00
9	Kas di BLUD	25.637.323.088,84	23.233.470.535,65
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	471.794.246.868,94	344.066.436.138,18
1	Kas di Bendahara Pengeluaran (Hutang Pajak)	-	30.645.494,00
2	Kas Lainnya	3.061.988.744,00	2.336.059.327,34
	Jumlah Kas (Neraca)	474.856.235.612,94	346.433.140.959,52

Penjelasan:

Rekening Giro BPD DIY sebesar Rp162.625.255.299,39 merupakan saldo rekening Kas Daerah per 31 Desember 2018.

Kas di Kasda sebesar Rp164.745.158.077,68 merupakan kas dalam penguasaan BUD terdiri dari saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 sebesar Rp162.625.255.299,39 dan Kas di Pihak Ketiga sebesar Rp2.119.902.778,29 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja dengan SP2D LS.

Deposito Berjangka sebesar Rp270.000.000.000,00 merupakan Kas di Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito on call pada Bank BNI sebesar Rp50.000.000.000,00, Bank BTN sebesar Rp100.000.000.000,00, Bank BRI sebesar Rp50.000.000.000,00, Bank BPD DIY sebesar Rp50.000.000.000,00, Bank Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp11.380.663.802,42 merupakan sisa uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.700.336.046,42 dan sisa Dana BOS Tahun 2018 pada rekening sekolah SMA/SMK/SLN Negeri sebesar Rp5.680.327.756,00. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran meliputi:

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Balai Pendidikan Menengah Kab. Gunungkidul) sebesar Rp839.719.485,00
- Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (Balai PSDA) sebesar Rp306.167.792,00
- Sekretariat DPRD sebesar Rp3.276.255.261,00,
- Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Protokol) sebesar Rp99.501.408,00
- Dinas Perhubungan sebesar Rp1.178.692.100,42.

Sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran belanja dengan sumber dana SP2D UP/GU/TU namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum dikembalikan ke rekening Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah yaitu pada :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.500.000,00.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp896.400,00.
- Dinas Perhubungan sebesar Rp28.230.500,00.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp475.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kas di BLUD sebesar Rp25.637.323.088,84 merupakan merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Grhasia	9.357.171.662,55
2	RS Paru Respira	8.101.676.897,00
3	Balai Pelayanan Jamkessos	2.001.184.103,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	2.270.947.256,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan	1.419.738.208,00
6.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.486.604.962,00
	Jumlah	25.637.323.088,84

Kas Lainnya sebesar Rp3.061.988.744,00 merupakan sisa Kas di Rekening SMA yang berasal dari serah terima P3D Tahun 2016 dan beasiswa.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB VI.

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan mendasarkan latar belakang sejarah tersebut maka telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

6.1.1. Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Persyaratan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang antara lain memenuhi syarat:

- a. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- d. Bukan sebagai anggota partai politik.

6.1.2. Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.

6.1.3. Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

6.1.4. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tanahkeprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

6.1.5. Tata Ruang

Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

6.1.6. Pendanaan

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

6.1.7. Ketentuan Lain-Lain

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas:

- a. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
- b. Mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan terkait.
- c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- d. Mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada lembaga pertanahan;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain yang merupakan warisan budaya bangsa; dan
- f. Merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

6.2. Informasi Non Keuangan Lainnya

Terdapat aset tetap Tanah dalam proses penyelesaian sengketa sebagai berikut:

No	Luas Tanah	Lokasi	Penjelasan
1	20.317 m ²	Jl. Argolubang 19, Baciro, Yogyakarta	Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Perkara Nomor:108/Pdt.G/2016/PN.Yyk.Jo.No.77/PDT/2017/PT.YYK tanggal 19 Februari 2018 diketahui penyelesaian sengketa dalam proses penyerahan kontra memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2018. Pemda D.I. Yogyakarta sebagai pihak termohon kasasi/terbanding/tergugat.
2	1.004 m ² 296 m ² 279 m ² 2.900 m ² 421 m ² 268 m ²	Tanah eks Bioskop Indra, Jl. Jenderal Achmad Yani No. 13, Yogyakarta	Berdasarkan Surat Nomor W3.TUN.5/32/HK.06/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 perihal Pengiriman Surat Panggilan Perkara Nomor 01/G/2018/PTUN.YK, diketahui penyelesaian sengketa dalam proses sidang perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Penggugat atas nama SK dkk melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Tergugat II. Pemda D.I. Yogyakarta dalam kasus ini sebagai pihak intervensi/saksi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 merupakan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 38 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 117 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2018 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2018

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGGU BUWONO X